

PERS DI BAWAH ORDE BARU

Tinjauan atas Kebebasan Pers tahun 1974-1996

Studi Kasus : Terbunuhnya Udin- Pelaku Pers di Yogyakarta

SKRIPSI

**Disusun untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Sastra
Program Studi Ilmu Sejarah**



Disusun oleh :

Fenni Setiawati

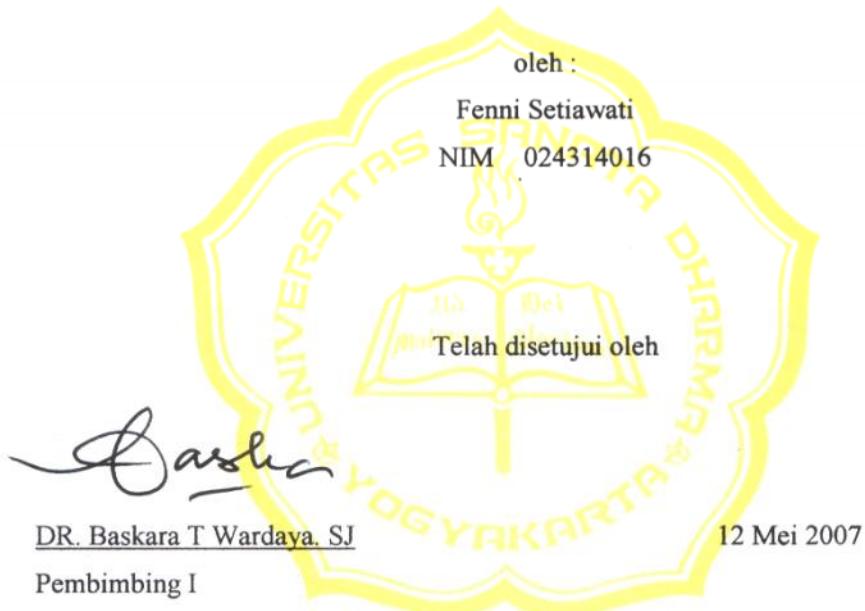
NIM 024314016

**FAKULTAS SASTRA
JURUSAN ILMU SEJARAH
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2007**

PERS DI BAWAH ORDE BARU

Tinjauan atas Kebebasan Pers tahun 1974-1996

Studi Kasus : Terbunuhnya Udin-Pelaku Pers di Yogyakarta



Drs. Hieronimus Purwanta MA

Pembimbing II

12 Mei 2007

PERS DI BAWAH ORDE BARU
Tinjauan atas Kebebasan pers tahun 1974-1996
Studi Kasus : Terbunuhnya Udin-Pelaku pers di Yogyakarta

Oleh :
Fenni Setiawati
NIM 024314016

Dipertahankan di depan panitian penguji Program Studi Ilmu Sejarah dan dinyatakan
diterima pada tanggal 29 Mei 2007

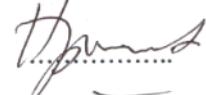
Panitia Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. P.J. Suwarno. SH



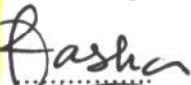
Sekretaris : Drs. Hieronimus Purwanta M.A



Anggota

Tanda Tangan

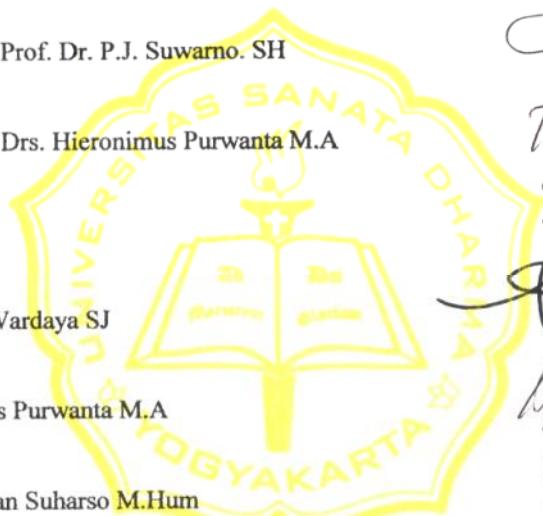
Dr. Baskara T Wardaya SJ



Drs. Hieronimus Purwanta M.A

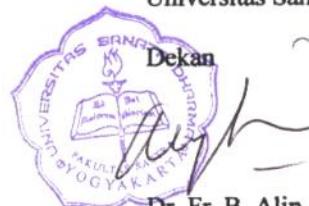


Drs. G. Sandiwan Suharso M.Hum



Yogyakarta, 27 Juni 2007

Fakultas Sastra
Universitas Sanata Dharma



Dr. Fr. B. Alip, M.Pd., M.A

NO PAIN NO GAIN.....

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- **IBUNDA TERCINTA CH. KRISTI PURNAMI**
- **AYAHANDA ALM. LEO AGUNG SOECIPTO**
- **KEDUA ADIKKU WINAS DAN RANGGA**
- **060806 KU**
- **SEGALA PENGORBANAN, BANTUAN DAN DOA SEMUA PIHAK**

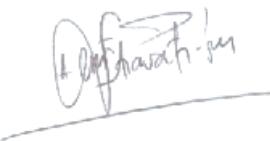
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan karya sendiri dan belum pernah saya ajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi.

Skripsi ini tidak memuat karya orang lain atau suatu lembaga atau bagian dari karya orang lain atau suatu lembaga, kecuali bagian-bagian tertentu yang dijadikan sumber.

Yogyakarta, 19 Mei 2007

Penulis



Fenni Setiawati

ABSTRAK

Fenni Setiawati, Skripsi. PERS DI BAWAH ORDE BARU Tinjauan atas Kebebasan Pers tahun 1974-1996: Studi Kasus Terbunuhnya Udin-Pelaku Pers di Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, 2007.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana asal mula munculnya pemerintahan militer di Indonesia, juga bagaimana Orde Baru menciptakan sistem pemerintahan fasis, serta apa pengaruh system pemerintahan fasis bagi pers pada umunya dan bagaimana pengaruhnya bagi pers daerah dengan pendekatan metodologi sejarah.

Dalam perjalanannya peneliti menemukan beberapa hal yang menjawab perumusan masalah. Dari berbagai sumber yang diperoleh, peneliti menemukan beberapa praktek fasisme tersebut diantaranya adalah tidak memberikan ruang kebebasan berpikir secara kritis / rasional, pengelompokan golongan / suku-suku tertentu, aksi kebohongan dan kekerasan, pemerintahan oleh salah satu kelompok elit, totaliterisme, rasis dan imperialis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa beberapa praktek-praktek yang terjadi pada masa Orde Baru memenuhi ciri-ciri fasisme tersebut, hal ini menguatkan peneliti mengambil hipotesis sementara bahwa pemerintahan Orde Baru menerapkan praktek-praktek militerisme fasis.

Pada kesimpulannya, deskripsi mengenai praktek-praktek militerisme fasis di masa Orde Baru dalam penelitian ini, diharapkan mampu memberikan pandangan baru terhadap perkembangan dan juga wacana-wacana sejarah di Indonesia.

ABSTRACT

Fenni Setiawati, Skripsi. PERS DI BAWAH ORDE BARU Tinjauan atas Kebebasan Pers tahun 1974-1996: Studi Kasus Terbunuhnya Udin-Pelaku Pers di Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: History departement, Faculty of letters, Sanata Dharma University, 2007.

This Qualitative research aims at describing the beginning of military government system in Indonesia, and at figuring out how Orde Baru created a facism government system as well as its influence to media that further affects the local media by using history methodology approach.

During this research, the researcher encountered several things as the answer of the formulated problems. The researcher found out that Orde Baru government system had great potentials for facism practices. Some of such practices are : distrust of reason, denial of basic human equality, code of behaviour based on lies and violence, government by an elite group, totalitarianism, racism, the findings show that several practices done in Orde Baru are characterized by facism practices during Orde Baru.

As a conclusion, the description on facism practices in the era of Orde Baru is expected to provide a brand new view point of the development of Indonesian history.

Kata Pengantar

Puji syukur yang terhingga penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perlindungan, tuntunan, dan rahmat yang sungguh besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pers Di Bawah Orde Baru : Tinjauan atas kebebasan Pers Tahun 1974-1996. Skripsi ini tak akan terwujud tanpa dukungan bantuan dan bimbingan dari banyak pihak, oleh karenanya terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Dr.Fr.B.Alip, M.pd.,MA selaku Dekan Fakultas Sastra, beserta segenap staff nya yang telah memberikan kesempatan serta ijin nkepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Hb. Hery Santosa, M. Hum selaku Ketua Jurusan Sejarah yang telah memberikan ijin, bimbingan dan segala bantuan serta nasehat-nasehat nya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Rm. Baskara Tulus Wardaya SJ selaku pembimbing I yang telah memberi banyak dukungan, bimbingan, nasehat serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Purwanta MA selaku pembimbing II yang telah begitu sabar membimbing, mengoreksi, dan menuntun penulis hingga terselesaiannya penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen Ilmu Sejarah, Pak Rio, Pak Sandiwan, Pak Anton, Alm. Pak Moedjanto, Prof. Suwarno, Pak Budiawan, Rm. Banar, Pak Sunardi, yang telah dengan setia menuntun penulis dalam sebuah perjuangan panjang hingga mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat berarti sebagai bekal melangkah ke masa depan, Bu Ning terima kasih atas bimbingan dan segenap kasih sayangnya yang telah membuat perjalanan ini begitu berwarna.
6. Keluargaku tercinta, terutama Ibuku CH.Kristi Purnami, dan kedua adikku Winastiti Romana serta Rangga Drie Ananda Praba , semua ini untuk kalian, juga pak Budi untuk doa dan dukungannya.

7. Rekan-rekan PUSDEP, Mbak Mita dan Mas Tri, special untuk Mbak Monic dan Mas Doninya yang telah menyelamatkan naskah skripsi ini dari virus yang sangat kejam.
8. Mas Tri di sekretariat sastra yang telah banyak membantu dalam keperluan administrasi selama kuliah.
9. Risang Yuwono, Makasih buat 060806 kita yang membuatku selalu mampu mantap dalam melangkah.
10. Teman-teman Ilmu Sejarah, Devi, Mamik, Vila, Eva, Nana, Markus, Yosi, Eko, Daniel, Yuda, Opet, Eko, Vianey, Halim, Roger, Yuhan, Nanto, Elang, kakak-kakak dan adik-adik angkatanku yang tak dapat penulis sebutkan seluruhnya, masa-masa indah bersama kalian tak akan dapat terlupakan. Thanks
11. Sahabat-sahabatku tercinta, Itin, Boncu, Anggi, Iken, Rudi, Dodo, Celsy, Nancy, maaf ya atas keusilan dan kekonyolanku, tanpa kalian gak akan ada kata istimewa.
12. Yudha Kurniawan, thanks udah bantu belajar dan kasih support dalam nyiapin ujian pendadaran.
13. Teman-teman di Jakarta Wawan, Mas Rudy"director", atas nasehat dan dukungan kalian, juga Ody atas segala kebaikannya.
14. Saiful Bachtiar, atas segala bantuan, nasehat, sumbangannya pemikiran, dan diskusi yang memperkaya skripsi ini, yang pasti juga buat persahabatan yang begitu indah
15. Iken untuk pinjaman printernya
16. Segenap staff LP3Y, untuk kesempatan mendapatkan banyak sumber.
17. Teman-teman Unisi Radio, dan Jogja TV untuk segala dukungan yang membuat persahabatan kita begitun berarti.
18. Pak Priyo dan staff Lativi yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan ujian pendadaran.
19. Mas Adink / Masduki untuk wawancara, diskusi, dan data-datanya.
20. semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan semua satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode dan Sumber Bahan Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Landasan Teori.....	11
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II RUNTUHNYA ORDE LAMA DAN MUNCULNYA ORDE BARU

A. Tragedi 65	
1. AD sebagai pendukung utama Soekarno dalam Dekrit 5 Juli 1959.....	23
2. Pasca Dekrit Presiden.....	24
3. Nasakom.....	26
4. Pengkultusan.....	26
5. Gestok sebagai puncak konflik AD vs PKI.....	30
B. Pengambilalihan Pemerintahan oleh AD	
1. Penyingkiran PKI dan Ormas-ormasnya.....	32
2. Supersemar dan pendudukan posisi penting pemerintahan	36
C. Berakhirnya Pemerintahan Soekarno.....	40

BAB III BERKEMBANGNYA ORDE BARU MENJADI FASIS

Teori Fasis dan Pelaksanaannya

A. Ketidakpercayaan terhadap rasionalitas.....	46
B. Penolakan terhadap kesetaraan hak dasar manusia.....	48
C. Perilaku yang menekankan pada kebohongan dan kekerasan.....	49
D. Pemerintahan yang dikuasai oleh elit tertentu.....	51
E. Totalitarisme.....	59
F. Rasisme dan imperialisme.....	61
G. Oposisi terhadap hukum dan perintah Internasional.....	63

BAB IV PERKEMBANGAN PERS YOGYAKARTA : KASUS UDIN

A. Latar Belakang Terpasungnya Pers Daerah

1. Penguasa daerah sebagai perpanjangan tangan pusat.....	68
a. Sistem Komando.....	68
b. loyalitas pada atasan (hierarki).....	69
c. Identik dengan kekuatan dan kekerasan.....	70
d. Pemusnahan sebagai solusi terakhir bagi pihak yang tak dapat berkompromi.....	71
2. Militerisme di tingkat daerah.....	73
3. Pers daerah sebagai miniatur pers nasional.....	76

B. Contoh Kasus : Meninggalnya wartawan senior Bernas, Udin

1. Cengkeraman Kuat Militerisme dalam tangan-tangan Kekuasaan.....	79
2. Kronologi meninggalnya Udin.....	82
3. Penyelesaian kasus udin.....	84
a. pihak kepolisian.....	85
b. TPF PWI.....	87
c. Gambaran umum penyelesaian kasus Udin.....	89
4. Embrio sistem kekerasan yang tumbuh subur.....	97
5. Reproduksi kultural dan kehidupan pers.....	99
6. News Framing.....	102
V KESIMPULAN.....	107

LAMPIRAN

DAFTAR INFORMAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

- Muhammad Syafruddin (Udin) hlm 82

DAFTAR LAMPIRAN

- Data dari Tim Pencari Fakta PWI untuk Kasus Udin

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan Sejarah Indonesia diwarnai berbagai peristiwa yang menarik untuk dikaji, baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik. Meskipun demikian, dalam perkembangan historiografi, penulisan sejarah politik nampaknya masih cukup mendominasi. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kehidupan suatu bangsa mustahil terlaksana tanpa adanya proses politik dengan segala problematikanya. Dalam suatu negara yang menganut paham demokrasi, partisipasi masyarakat secara aktif dalam segala aktivitas politik beserta problematika yang terjadi merupakan faktor penting yang harus selalu ada. Oleh karena itu, tentu saja pendidikan politik bagi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran atas status politiknya dalam suatu kehidupan bernegara.

Pendidikan politik sedini mungkin bagi masyarakat menjadi penting untuk diwujudkan mengingat Indonesia pernah mengalami kemerosotan hampir di segala bidang kehidupan termasuk politik yaitu pada masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru ingin terus melanggengkan kekuasaan mereka, dan membiarkan warga negara “bodoh”, “buta”, dan “bisu” secara politik.¹ Pendidikan politik saat itu menjadi suatu hal yang perlu sebisa mungkin ditekan karena akan menyadarkan warga negara dan menimbulkan “perlawan”. Inilah kondisi yang menyebabkan warga negara menjadi kurang terdidik dalam bidang politik, sebab jaminan kebebasan berpolitik diantaranya adalah adanya kebebasan masyarakat untuk berpikir, berpendapat, dan mendapat informasi. Jika akses-

¹ M. Nur Khoirun, dkk, Pendidikan Politik Bagi Warga Negara, LKiS, 1999, Yogyakarta

akses untuk terwujudnya berbagai hal tersebut terhambat maka tak akan tercipta pula ruang berpikir kritis bagi masyarakat, apalagi turut andil dalam permasalahan politik suatu pemerintahan, artinya bahwa kecil kemungkinan terciptanya proses pendidikan politik bagi masyarakat. Sementara kondisi ini sudah terlanjur menjadi proses pembodohan pada masyarakat yang cukup efektif bagi penguasa saat ini, sehingga masyarakat sendiripun telah menjadi sulit untuk menyadari atas kondisi yang ironis semacam ini. Oleh karenanya walaupun bukan suatu hal yang mudah untuk dapat mewujudkan Negara Indonesia dengan proses demokrasi sesungguhnya, namun tidak mustahil hal ini terwujud yaitu dengan upaya pendidikan politik bagi masyarakat.

Panggung politik Indonesia pernah menampilkan sebuah babak tragedi memilukan tentang melemahnya tiang demokrasi negeri ini yang sekaligus menandai merosotnya moralitas bangsa, dicerminkan dari banyaknya terjadi tindakan korupsi, pergolakan antar daerah yang menelan korban dalam jumlah yang tidak pernah sedikit, terkungkungnya kebebasan rakyat dalam berbagai bidang, dan lain sebagainya. Yang harus segera disadari adalah apa yang melatar belakangi pemerintahan ini menjadi begitu kuat dengan otoriterisme dan kediktatorannya tersebut.

Kontrol oleh penguasa memang harus dan akan selalu ada, namun kiranya dengan mempertimbangkan kebutuhan akan kebebasan rakyat dalam konteks negara demokrasi termasuk berbicara, memperoleh informasi dan berpendapat maka cara-cara yang ada dalam sistem pemerintahan Orde Baru telah mempersempit ruang bagi berkembangnya demokrasi, dan cukup mematikan kreatifitas rakyat. Hal ini dapat dilihat dari banyak terjadinya pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan berbicara, berkreasi dan mendapat informasi disertai ancaman dan intimidasi yang menekan hak asasi manusia

dan yang sarat dengan kekerasan sehingga tidak adanya ruang berpikir kritis pada masa itu. Pers termasuk lembaga penting yang saat itu, juga mengalami tindakan represif tersebut. Perlakuan pemerintah terhadap pers masa itu, memaksa pers akhirnya keluar dari fungsi utamanya. Tindakan represif Orde Baru terhadap pers dilakukan dalam rangka mensukseskan program-program politiknya dan mempertahankan kekuasaan melalui pembentukan sistem pemerintahan. Orde Baru sengaja menghalalkan tindakan ini dengan dalih menjaga stabilitas nasional. Namun demikian, sebagai reaksi yang muncul tetap saja selalu ada usaha-usaha untuk keluar dari belenggu tersebut, walaupun tidak sedikit yang harus berakhir dengan penangkapan, pembredelan, bahkan pembinasan. Penjara adalah sebuah konsekuensi perjuangan yang pasti akan dilalui dalam menghadapi rezim yang otoriter.²

Dalam militerisme, untuk dapat muncul sebagai pahlawan haruslah memenangkan pihak-pihak lain yang menjadi pesaingnya, ini sudah seperti menjadi hukum alam yang wajar saja terjadi. Maka konflik dalam hal ini akhirnya disadari sebagai suatu momen penting yang harus selalu ada untuk dapat muncul sebagai bintang di tengah suasana yang suram itu. Dengan militerisme sebagai senjata ampuh, kekuasaan memang berhasil didapat dan dipertahankan dengan terus mereproduksi sistem yang telah terbentuk guna melegitimasi kekuasaan, termasuk dengan menekan ruang gerak media massa. Bermodal dalih utama yaitu usaha menciptakan stabilitas nasional, rakyat diberlakukan sebagai “*subject of rules*”, tanpa kecuali termasuk media yang seharusnya berperan sebagai kontrol sosial.

² Budiman Sudjatmiko , ketua Partai Rakyat Demokratik, “Siaran Pers Atas Pengadilan 14 Aktivis PRD”, google.com

Dalam penulisan ini, dipilih Kota Yogyakarta sebagai tempat dari sample kasus tindakan penekanan Orde Baru, karena Yogyakarta sebagai salah satu daerah bagian dari Republik Indonesia, yang relatif jauh dari Jakarta, sehingga dengan ini akan dapat dilihat pula bagaimana dampak sistem pemerintahan Orde Baru yang terus mengakar, termasuk bagi pers pada masa itu bagi kehidupan pers di daerah yang tentu saja tak bisa terlepas juga dari berbagai persoalan lokal yang unik, kemungkinan tidak terjadi di daerah lain.

B. Perumusan Masalah

Skripsi ini akan menelaah bagaimana Orde Baru menciptakan sebuah sistem pemerintahan dengan basis militerisme yang berkembang menjadi pemerintahan fasis dan bagaimana pengaruhnya terhadap berbagai bidang termasuk dalam hal ini pers, sehingga banyak pihak menilai pers baik di pusat maupun di daerah-daerah saat itu mengalami ketertindasan, oleh banyak penekanan yang dilakukan. Selanjutnya penulis melakukan pembatasan waktu pembahasan yaitu dari sekitar tahun 1974 hingga 1996 karena pada tahun-tahun inilah Bangsa Indonesia mengalami beberapa peristiwa penting yang di antaranya merupakan akumulasi dari tindakan represif terhadap pers tersebut. Pada *range* waktu tersebut Bangsa Indonesia mengalami beberapa peristiwa yang telah banyak membawa perubahan terutama pada bidang politik dan yang sekaligus memberi garis tegas bagi rangkaian perjalanan Sejarah Indonesia. Disadari atau tidak hal ini telah mempengaruhi berbagai bidang kehidupan yang lain.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika yang terjadi pada masa itu berkaitan dengan tindakan-tindakan Orde Baru yang berpengaruh pada kehidupan pers, maka perlu ditentukan beberapa permasalahan di dalamnya, yaitu :

1. Bagaimana asal mula munculnya pemerintahan militer di Indonesia ?
2. Bagaimana Orde Baru menciptakan sistem pemerintahan Fasis ?
3. Apa pengaruh sistem pemerintahan fasis bagi pers pada umumnya dan bagaimana pengaruhnya bagi pers daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Riset yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, memiliki beberapa tujuan di dalamnya, antara lain yaitu:

1. Mengetahui bagaimana kondisi awal Bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dengan kekuatan besar militer sebagai penyokong utama berdirinya pemerintahan saat itu.
2. Mengetahui bagaimana praktek-praktek pemerintahan yang ada di masa Orde Baru hingga sampai mengarah ke bentuk pemerintahan fasis.
3. Melihat kembali bagaimana militerisme sebagai landasan sistem pemerintahan yang ada merambah sampai ke daerah dan mempengaruhi tindakan-tindakan penguasa lokal dalam pemerintahannya, sehingga banyak pihak termasuk instansi pers dan para pekerjanya juga mengalami tindakan kekerasan, bentuk nyata akan hal ini akan nampak dalam contoh kasus mengenai terbunuhnya wartawan BERNAS Udin, di Yogyakarta yang akan disinggung pada bagian selanjutnya.

D. Manfaat Penelitian

Bagaimanapun juga seluruh rangkaian peristiwa saat itu merupakan bagian penting dari proses perkembangan bangsa Indonesia sehingga dengan mengetahui dan memahaminya, tentu akan memberi banyak manfaat termasuk pelajaran untuk menentukan kemana arah perjuangan di masa yang akan datang, diantaranya yaitu:

1. Sebagai informasi bagi masyarakat dan pemerintah khususnya mengenai perjalanan sejarah bangsa masa Orde Baru yang sempat mengalami keterbelengguan dalam sebuah pemerintahan militer, sehingga dengan ini pemerintah yang ada dapat selalu mempertimbangkan kembali model mana yang cocok bagi kehidupan bangsa ini serta berusaha mengambil kebijakan tanpa mengorbankan beberapa pihak, terutama rakyat, dalam hal ini melalui media massa sebagai media informasi rakyat.
2. Dengan mengetahui ciri-ciri dan model pemerintahan yang ada di masa Orde Baru, maka hal ini dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai bahan pertimbangan dan refleksi agar selalu mawas diri, menghindari hal-hal yang tidak sesuai bagi kehidupan bersama dan memperjuangkan hal-hal yang memihak kepentingan masyarakat demi kesejahteraan bersama.
3. Menambah pengetahuan mengenai sejarah bangsa Indonesia terutama menyangkut kehidupan pers sebagai bagian dari elemen penting dalam kehidupan masyarakat, dengan selalu mengingat bahwa hakikat utama pers adalah sebagai media informasi rakyat. Sehingga segala aktifitas media massa juga hendaknya diketahui oleh masyarakat, guna terwujudnya keharmonisan bersama.

Bertolak dari hal-hal diatas, maka pembahasan bidang politik dalam penulisan skripsi ini dilakukan sebagai usaha mewujudkan suatu pendidikan politik bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat mempengaruhi dan bahkan turut andil dalam pengambilan keputusan dalam seluruh aktifitas politik dan problematika dalam negaranya.

E. Metode dan jalannya Penelitian

Penelitian sejarah terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang peneliti sejarah. Tahapan tersebut adalah :

1. Penentuan topik
2. Pengumpulan sumber / heuristik
3. Kritik sumber
4. Analisis data
5. Interpretasi
6. Rekonstruksi

Sedangkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam setiap tahapan penelitian tersebut adalah :

1. Penentuan topik

Penentuan topik merupakan langkah utama dan penting dalam sebuah penelitian sejarah. Hal ini terkait dengan bagaimana hasil penelitian dapat bermanfaat bagi pengembangan kualitas kebaikan hidup bermasyarakat. Selanjutnya topik yang dipilih hendaknya mengandung nilai kebaruan / kekinian artinya bahwa perlu diperhatikan apakah

topik ini sudah pernah diteliti oleh orang lain atau belum, sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi dunia akademik. Ketersediaan datapun harus diperhatikan, apakah data tentang topik yang akan diteliti dapat diperoleh atau tidak.

2. Pengumpulan sumber / heuristik

Tahapan ini bertujuan untuk menemukan fakta-fakta yang terkait dengan peristiwa sejarah yang diteliti.

3. Kritik sumber

Kritik sumber perlu dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta yang kebenarannya meyakinkan, sehingga dapat digunakan sebagai data penelitian.

Macam-macam kritik sumber :

- a) Kritik intern : menguji kebenaran isi sumber melalui penelitian terhadap kesesuaian usia sumber dengan peristiwa yang dikaji. Dapat dilihat dari usia kertas, usia tinta, gaya bahasa, dan gaya tulisan)
- b) Kritik ekstern : menguji kebenaran isi sumber melalui perbandingan sumber satu dengan sumber-sumber lain yang sama-sama membicarakan satu permasalahan. Suatu fakta dapat dipercaya jika ada kesesuaian isi antara sumber satu dengan sumber lain.
- c) Kritik sosio-kultural : menguji kebenaran isi sumber melalui penelitian terhadap latar belakang sosial dan budaya dari tokoh pembuat sumber.

4. Analisa data

Penganalisaan data bertujuan untuk mensistemasi data dan menemukan keterkaitan antar data. Tahapan analisis meliputi :

- a) klasifikasi data yaitu pengelompokan data sesuai dengan jumlah pertanyaan pada perumusan masalah.
- b) merinci kelas menjadi sub kelas untuk kemudian menemukan kaitan antar data dalam satu kelas, misalnya adanya relasi temporal, relasi sebab akibat, relasi kebetulan / accidental, ataukah relasi kesetaraan.
- c) menemukan kaitan data antar kelas misalnya untuk melihat adakah aspek-aspek yang kontinue dan berubah selama proses berlangsung.

5. Interpretasi

Interpretasi data dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang rangkaian peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau juga untuk menyatukan fakta-fakta menjadi uraian / penjelasan yang logis, rasional, dan memiliki kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam tahapan ini harus disadari bahwa ilmu-ilmu sosial diperlukan sebagai ilmu bantu bagi ilmu sejarah.

6. Rekonstruksi

Tahap selanjutnya yang merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah adalah menyusun rekonstruksi sejarah berdasarkan data-data yang telah diuji validitas dan keobjektifannya melalui tahap-tahap sebelumnya.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber literatur guna menambah informasi berkaitan dengan topik sehingga dapat menjelaskan segala sesuatunya dengan jelas dan akurat. Beberapa bukti kajian yang digunakan itu antara lain yaitu mengenai tekanan terhadap pers Indonesia yang telah banyak dikaji, salah satunya adalah *Kisah Pers Indonesia 1966-1974*, karya Akhmad Zaini Abar dan diterbitkan tahun 1995. Buku ini memberi penjelasan yang cukup mengenai keadaan pers dalam kurun waktu 1966-1974, dimana mulai terjadi pembredelan disana-sini, hingga sempat membuat pers kalang kabut, bahkan beberapa diantaranya mencoba merebut belas kasih pemerintah agar selamat dari pembredelan atau setidaknya tetap boleh beroperasi walaupun harus berperan sebagai corong pemerintah semata saat itu. Buku ini mengkaji keadaan pers pada masa sebelum terjadinya peristiwa Malari tahun 1974, namun sayang buku yang mengambil batasan waktu akhir yaitu tahun 1974 ini, dimana saat itu Peristiwa Malari sebagai tonggaknya, justru masih kurang banyak membahas mengenai peranan pers dalam pemberitaan peristiwa Malari, yang akhirnya menimbulkan kondisi dimana pers semakin terpojok dan yang juga mengakibatkan banyak pengamat dan wartawan menilai Malari sebagai titik krusial dalam *performance* pers di masa Orde Baru.³

Kajian lain yang menarik disajikan pada *Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia*, oleh DR. Krisna Harahap SH., MH. Buku ini menarik karena banyak memaparkan kondisi pers dari masa ke masa, sehingga lebih nampak bagaimana perkembangannya dengan disertai kasus-kasus beserta pencantuman pasal-pasal

³ Akhmad Zaini Abar, 1995, *Kisah Pers Indonesia 1966-1974*, Yogyakarta, LkiS
hlm 1

perundangan yang berlaku dari masa ke masa. Namun sayang sekali, dikarenakan buku ini menjelaskan kondisi pers dalam kurun waktu yang cukup panjang yaitu masa kolonial sampai dengan era reformasi, sehingga penjelasan yang disajikan dalam setiap pembabagan waktu menjadi kurang mendalam.

Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik. karya Masduki mengkaji perkembangan pers dari aspek peran pers, kode etik pers, ancaman bagi kebebasan pers, dan juga memaparkan macam-macam sistem pers yang ada dan diakui. Buku ini lebih cenderung memberi eksplanasi berkaitan dengan masalah-masalah teknis saja, dan contoh-contoh kasus sebagai gambaran realita kehidupan pers tidak banyak terdapat dalam buku ini.

Kajian pers dari aspek hukum terdapat pada *Politik Hukum Pers Indonesia*, oleh Wikrama Iryans Abidin. Buku ini membedah dan membahas segi politik dan hukum pers, demokrasi pers, serta kemerdekaan pers pada masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi dilengkapi lampiran peraturan dan Undang-undang mengenai pers. Buku ini tidak secara khusus membedah bagaimana kondisi pers masa Orde Baru, jadi seperti halnya beberapa buku sebelumnya, penjelasan yang ada mengenai kondisi pers masa Orde Baru kurang mendalam.

G. Landasan Teori

Pembahasan dalam lingkup sejarah politik tidak akan terlepas dari penelaahan kembali mengenai sistem kekuasaan, dan penguasa. Setiap penguasa membutuhkan sistem pemerintahan agar kekuasaannya dapat dijalankan. Ditinjau dari beberapa sistem

pemerintahan yang diakui internasional, paling tidak ada 7 macam sistem pemerintahan⁴, yaitu :

1. Otokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang,
2. Totalitarian adalah bentuk pemerintahan dari suatu negara yang bukan hanya selalu berusaha menguasai segala aspek ekonomi dan politik masyarakat, tetapi juga selalu berusaha menentukan nilai-nilai 'baik' dan 'buruk' dari perilaku, kepercayaan dan paham dari masyarakat.
3. Republik adalah sebuah negara di mana tumpuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan.
4. Plutokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki.
5. Pemerintah federal adalah sebutan yang umum untuk pemerintah dalam sebuah federasi.
6. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer.
7. Monarkisme adalah sebuah dukungan terhadap pendirian, pemeliharaan, atau pengembalian sistem kerajaan sebagai sebuah bentuk pemerintahan dalam sebuah negara.

⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/>

Orde Baru dalam skripsi ini dikategorikan sebagai pemerintahan totalitarien karena dalam masa pemerintahan Orde Baru terjadi keseragaman nilai hampir di semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, dan tentu juga politik yang didoktrinkan dalam pola pikir masyarakat, dan keberadaan partai politik tunggal agar seluruh komponen masyarakat bisa dimobilisir melalui sebuah partai tunggal. Sebagai akibatnya tak ada batas pemisah antara hak dan kewajiban oleh negara dan oleh masyarakat. Dalam sistem pemerintahan ini pula masyarakat sebagaimana mungkin harus bisa melayani Negara, khususnya mereka yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan dengan diwajibkan melaksanakan berbagai tugas untuk membantu penguasa membangun Negara ke arah ideal, bukan Negara yang melayani rakyat.⁵

Keberadaan secara fisik aparat rahasia (inteligensi) atau aparat militer yang langsung melakukan operasi pengontrolan dan pemaksaan nilai-nilai juga merupakan salah satu ciri yang terdapat dalam sistem pemerintahan ini. Militer menjadi sebuah kekuatan yang begitu memegang peranan penting, Bertolak dari hal ini, maka pengertian militerisme menjadi penting untuk dikaji guna dimengerti, selanjutnya fenomena maraknya praktik inteligen dalam masa Orde Baru dimaknai penulis sebagai penanda terjadinya pergeseran model kekuasaan ke arah militerisme fasis.

1. Militerisme

Praktek militerisme dalam suatu negara selalu muncul dari suatu kondisi dimana adanya dominasi militer yang begitu besar dalam satu wilayah pemerintahan. Dari tujuan awal terbentuknya, maka militer dari dan sejak kapanpun hanya akan mempunyai

⁵ Ibid, wikipedia.

konsentrasi dalam tugas utamanya sebagai benteng pertahanan yang mengandalkan keunggulan strategi pemimpin-pemimpinnya dan kekuatan fisik.

Militerisme banyak dimaknai orang sebagai dominasi dan intervensi militer dalam seluruh sektor kehidupan masyarakat.⁶ Sementara itu sudah menjadi suatu hukum alam bahwa jika dominasi militer terjadi dalam kehidupan masyarakat niscaya akan melahirkan sebuah pemerintahan yang militeristik. Militerisme berarti pula merasuknya nilai-nilai, sikap, dan perilaku militer dalam pemerintahan dan masyarakat, seperti komando, hirarkhi, disiplin, pemaksaan, loyalitas, kekompakan, dan sebagainya. Oleh karenanya Militerisme akan selalu erat kaitannya dengan penggunaan kekerasan dalam pemerintahan dan dalam masyarakat itu sendiri. Untuk dapat diterapkan hampir di seluruh bagian kehidupan masyarakat, tentu saja ada suatu tindakan kelanjutan sebagai rangkaian dari proses yang ada, yaitu militerisasi, dan ini terjadi dalam suatu pemerintahan militerisme dimanapun juga. Militerisasi artinya militer masuk dan melakukan intervensi kedalam dunia politik yang sebenarnya menjadi urusan kaum sipil. Intervensi militer inilah yang menimbulkan tumbuhnya rezim otoriter atau rezim militer. Kemudian terjadi internalisasi nilai-nilai, ideologi, perilaku, organisasi, dan wacana militer kedalam kehidupan sosial atau masyarakat sipil.

Dalam wacana sebuah Negara demokrasi, tentu saja perwujudannya akan sangat berseberangan dengan konsep pemerintahan militerisme, sebab Demokrasi tidak akan tegak apabila jabatan-jabatan publik masih diduduki oleh tentara; lembaga militer

⁶ Sutoro Eko, “*Masyarakat Pascamiliter :Tantangan dan Peluang Demiliterisme di Indonesia*” IRE, Yogyakarta, 2000, hlm 15

diterima sebagai kekuatan politik alternatif; dan perilaku-perilaku militeristik diterima dan tumbuh subur di tengah kehidupan masyarakat.⁷

2. Fasisme

Fasisme adalah sebuah gerakan politik penindasan yang pertama kali berkembang di Italia setelah tahun 1919 dan kemudian di berbagai negara di Eropa, sebagai reaksi atas perubahan sosial politik akibat Perang Dunia I. Sebagaimana ditekankan Mussolini, gagasan utama di balik fasisme adalah ide Darwinis mengenai konflik dan perang. Sebab, sebagaimana kita bahas dalam prakata, Darwinisme menegaskan bahwa “yang kuat bertahan hidup, yang lemah punah”, yang karenanya berpandangan bahwa manusia harus berada dalam perjuangan terus-menerus untuk dapat bertahan hidup. Karena dikembangkan dari gagasan ini, Fasisme membangkitkan kepercayaan bahwa suatu bangsa hanya dapat maju melalui perang, dan memandang perdamaian sebagai bagian yang memperlambat kemajuan.⁸ Fasisme merupakan ideologi nasionalistik dan agresif yang didasarkan pada rasisme.

Nasionalisme semacam ini sama sekali berbeda dari sekadar kecintaan pada negara. Dalam nasionalisme agresif pada fasisme, seseorang mencita-citakan bangsanya menguasai bangsa-bangsa lain, menghinakan mereka, dan tidak menyesali timbulnya penderitaan hebat terhadap rakyatnya sendiri dalam prosesnya. Selain itu, nasionalisme fasistik menggunakan peperangan, pendudukan, pembantaian, dan pertumpahan darah

⁷ <http://www.kalyanamitra.or.id/kalyanamedia/1/2/fokus.htm>

⁸ <http://www.harunyahya.com/indo/buku/fasisme2.htm>

sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan politis tersebut. rezim fasis juga menggunakan kekuatan dan penindasan terhadap bangsa mereka sendiri.

Dasar kebijakan sosial fasisme adalah pemaksaan gagasan, dan keharusan rakyat menerimanya. Fasisme bertujuan membuat individu dan masyarakat berpikir dan bertindak seragam. Untuk mencapai tujuan ini, fasisme menggunakan kekuatan dan kekerasan bersama semua metode propaganda. Fasisme menyatakan siapa pun yang tidak mengikuti gagasan-gagasannya sebagai musuh, bahkan sampai melakukan *genocide* (pemusnahan secara teratur terhadap suatu golongan atau bangsa), seperti dalam kasus Nazi Jerman. Fasisme tidaklah semata sistem politik, melainkan juga mentalitas. Bahkan bila mentalitas ini tak lagi mengarah kepada pembentukan rezim politik, misalnya Nazi Jerman atau Mussolini di Italia, ia bagaimanapun terus menyebabkan penderitaan pada umat manusia di seluruh dunia. Dalam bukunya *Today's Isms*, William Ebenstein, menjelaskan beberapa konsep pokok fasisme, diantaranya yaitu :⁹

- Tidak memberikan ruang kebebasan berpikir secara kritis/ rasional
- Pengelompokan golongan/suku-suku tertentu
- Aksi kebohongan dan kekerasan
- Pemerintahan oleh salah satu kelompok elit
- Totaliterisme
- Rasis dan imperialis
- Melawan hukum-hukum atau peraturan internasional

Dari penjabaran konsep-konsep dasar militerisme dan fasis diatas, maka ditemukan benang merah antar keduanya. Fasisme memiliki keterkaitan yang erat dengan kekuatan

⁹ Ebeinstein, William., *Today's Isms*, Prentice-Hall.Inc., Englewood, New Jersey, 1985, hlm. 107

militer dalam prosesnya untuk dapat berkuasa. Sedangkan militerisme yang identik dengan kekerasan perlu terus diwaspadai agar tidak menjelma ke dalam sebuah bentuk baru pemerintahan fasis, sebab fasisme menyediakan konsep-konsep dasar yang selalu mengandalkan kekuatan militer dan tentu efektif untuk majunya sebuah pemerintahan yang berbasis militer. Bahkan sebuah pemerintahan fasis oleh pemimpin sipilpun akan menerapkan konsep-konsep militerisme dalam proses berkuasanya, sebab bertolak dari prinsip dasarnya, kekerasan dan perang memiliki nilai-nilai yang sakral dalam fasisme.¹⁰

Upacara, keseragaman, simbol-simbol dan bendera yang menjadi identitas dari militer memiliki kesamaan dengan kebiasaan sebuah rezim fasis yang cenderung sangat mementingkan rapat-rapat akbar, defile, pertemuan-pertemuan dan berbagai upacara dengan tujuan yang nyaris sama yaitu membentuk rasa persatuan antar masyarakat atau golongan dengan satu missi yang sama / seragam. Militerisme akan sangat mudah menjelma menjadi sebuah kekuatan fasis ketika berkuasa dengan segala bentuk kekerasan dalam suatu kondisi sosial masyarakat yang penuh dengan pergolakan. Sudah menjadi hukum alam jika situasi sarat pergolakan merupakan celah yang strategis bagi naiknya sebuah kekuatan militer, disisi lain, kondisi semacam ini merupakan sarat penting bagi tumbuhnya sebuah kekuatan fasis, sebab semua negara fasis menciptakan musuh-musuh imajiner, dan menyatakan perang habis-habisan terhadap mereka. Dalam pemikiran fasis manusia hanya bisa maju dengan melibatkan diri di dalam peperangan. Oleh karena itu, militerisme adalah karakteristik fasisme yang paling menentukan.¹¹

¹⁰ Pengaruh dianggapnya Dewa perang sebagai kekuatan tertinggi pada masa Pagan di Eropa, sehingga praktek-praktek kekerasan merupakan sesuatu hal yang dianggap sakral oleh penganut fasisme.

¹¹ <http://www.harunyahya.com/indo/buku/fasisme2.htm>

Satu lagi bukti yang menggambarkan betapa dekatnya keterkaitan antara militer dan fasisme yaitu oleh karena karakteristik negara fasis adalah kecurigaan pada rakyatnya sendiri, maka kaum fasis sadar bahwa mereka memperoleh kepatuhan dan loyalitas hanya dari kekerasan dan tindakan-tindakan yang menanamkan rasa takut, mereka membentuk polisi rahasia dan unit-unit intelijen yang sasarannya adalah rakyatnya sendiri. Perdamaian bagi paham fasisme hanyalah sesuatu yang menghalangi kemajuan umat manusia.

Terdapat beberapa strategi penting dalam pemerintahan fasis, diantaranya yaitu strategi propaganda. Strategi ini diterapkan untuk melegitimasi massa dan “mencuci otak”, sebab seperti yang ada dalam penjabaran sebelumnya mengenai fasisme bahwa fasisme tidaklah semata-mata merasuk dalam sistem politik, melainkan juga mentalitas. Oleh karenanya pemerintahan fasis selalu merasa perlu untuk melakukan strategi propaganda. Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan pers yang merupakan bagian penting dan berpengaruh besar dalam membentuk opini rakyat. Itulah sebabnya mengapa dari masa ke masa mulai dari munculnya rezim fasis di Eropa, sampai pada bentuk-bentuk baru fasisme dalam pemerintahan modern saat ini, pers selalu mendapat penekanan sebagai bagian dari propaganda sistem pemerintahan tersebut. Pemimpin pemerintahan fasis selalu ingin memaksakan keinginan mereka kepada publik. Oleh karenanya pers adalah media yang tepat untuk mewujudkannya, media yang sangat efektif untuk memprovokasi massa.

Bentuk-bentuk propaganda dengan memanfaatkan pers terwujud dalam tindakan-tindakan pemerintah menekan pers agar melakukan pemberitaan sesuai preferensi pemerintah. Tak jarang pemerintah hingga membentuk jawatan-jawatan khusus untuk

memandu dan mengawasi kegiatan-kegiatan pers dalam suatu wilayah pemerintahan.¹²

Bentuk penekanan yang lain, yaitu dengan memberangus suatu media ataupun melakukan tindakan-tindakan kekerasan bagi jurnalis yang tidak mematuhi atau menyalahi aturan pemerintah. Hal ini cukup dapat dipahami jika kita kembalikan pada konsep dasar fasisme yang mensyahkan disingirkannya siapapun yang tidak mematuhi aturan pemerintah. Wewenang tertinggi tetap selalu ada di tangan penguasa, sehingga siapapun yang membangkang atau tidak setuju harus disingkirkan karena tidak lain hanyalah merupakan penghalang, dan praktek kekerasan sangat wajar untuk dilakukan. Jika didasarkan pada beberapa konsep pokok ilmu politik, diantaranya pembagian (*distribution*) nilai-nilai dalam masyarakat, dan juga pengambilan keputusan,¹³ maka pertama, praktek-praktek represifitas terhadap pers yang dilakukan ini bertentangan dengan konsep pemerataan pembagian nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai-nilai yang dimaksud disini dapat bersifat abstrak seperti penilaian (*judgement*) atau suatu azas seperti kebebasan berpendapat, kebebasan mimbar, dll, sehingga menimbulkan konflik antara penguasa dan masyarakat.

Berdasar pada landasan teori ilmu politik mengenai bagaimana kekuasaan dalam suatu negara , maka kekuasaan militerisme fasis dimana penguasa melakukan perjuangan kekuasaan (*power struggle*) lebih untuk kepentingan kelompok/golongan dengan cara-cara kekerasan yang sangat menyakitkan rakyat merupakan bentuk nyata dari penyalahgunaannya terhadap kekuasaan yang ada.¹⁴ Kontinuitas bentuk-bentuk

¹² Wawancara dengan Ketjuk Sahana, Direktur penyiaran Unisi Radio

¹³ Beberapa bidang-bidang ilmu politik yang termuat dalam *Contemporary Political Science*, terbitan Unesco 1950, lihat dalam buku Prof. Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, 1972

¹⁴ Ibid, Miriam Budiharjo.

kekerasan yang telah terlanjur ada, tak jarang menjadi kultur yang tumbuh subur dalam sistem pemerintahan suatu lingkungan masyarakat. Artinya iklim yang ada telah membuat pejabat-pejabat, sampai ke tingkat daerah sekalipun disengaja atau tidak telah melakukan reproduksi bentuk kekuasaan dari sistem yang telah berkembang itu, selain itu reproduksi bentuk kekuasaan militerisme fasis banyak terjadi pada pemerintahan modern karena dirasa konsep-konsep pemerintahan seperti ini cukup efektif untuk sesegera mungkin mencapai kekuasaan absolut, walaupun harus menutup mata bagi kebenaran.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi mengenai Tinjauan atas kebebasan pers antara tahun 1974-1996 dengan mengangkat contoh kasus di Yogyakarta ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Bagian ini merupakan bagian pendahuluan, yang akan memuat latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode dan jalannya penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Dalam bab ini akan membahas mengenai bagaimana lahir dan terbentuknya suatu pemerintahan baru saat itu yang kemudian lebih dikenal dengan Orde Baru. Kondisi politik pada sekitar tahun 1964/1965 akan menjadi bahasan pokok dalam bab ini, sebab disinilah pijakan awal naiknya pemerintahan Orde Baru dengan terjadinya tragedi 1965. Lahirnya pemerintahan Orde Baru juga memungkinkan naiknya golongan-golongan tertentu yaitu militer sebagai golongan yang paling banyak memegang posisi kunci juga pada masa-masa setelahnya. Pada bagian ini akan lebih dikonsentrasi untuk melihat bagaimana gejala-gejala awal penguasa Orde Baru ini dalam rangka mewujudkan tujuan utamanya yaitu merebut kekuasaan dengan mengandalkan kekuatan

militer dan memanfaatkan berbagai elemen penting yang ada, termasuk dalam hal ini pers.

Akan nampak disini bagaimana usaha awal penguasa rezim ini menancapkan dan memperkuat tali pancang kekuasaanya terutama pada masa awal pemerintahan lewat berbagai kebijakan yang diambil. Pada perkembangannya Orde Baru menggunakan bebagai cara-cara dalam usaha mengontrol pers sehingga membuat nyawa pers menjadi sangat tergantung pada kebijakan pemerintah saat itu. Dapat dikatakan klimaks dari tindakan represif tersebut terjadi pada sekitar tahun 1974 dan terus berlanjut sampai dengan 1996, di masa-masa akhir kejayaannya. Berbagai peristiwa sejarah memiliki hungan korelasi di dalamnya. Salah satunya yaitu peristiwa Malari yang jika ditarik mundur maka akan disadari bahwa dalam hal ini terjadi suatu rangkaian yang saling mempengaruhi. Pada tahun-tahun ini pula terjadi pembredelan dimana-mana, selain juga teror-teror dalam bentuk lain yang ditujukan bagi kalangan pers.

Bab III Pembahasan dalam bab ini akan berbicara mengenai langkah-langkah awal yang diambil oleh pemerintahan Orde baru setelah rezim ini berhasil berkuasa. Dengan militerisme yang diusung Orde Baru, maka akan dilihat bagaimana penerapannya semasa pemerintahan ini berlangsung. Hampir di sebagian besar bidang kehidupan pada masa itu menerima dampak secara langsung atas model kekuasaan pemerintahan Orde Baru dari mulai bidang politik, ekonomi, dan sosial. Dengan mengacu penjabaran pada Bab I sebagai landasan teori, disini akan dijelaskan bagaimana bukti konkretnya dalam kehidupan masyarakat di masa itu. Penjabaran dengan bukti konkret pada bab ini dilakukan guna mendapat gambaran umum mengenai pengaruh militerisme dalam suatu

pemerintahan, dalam hal ini terjadi pada pemerintahan di Indonesia pada masa Orde Baru.

Sebagai sebuah penulisan sejarah yang diakronis, maka periodisasi di dalamnya menjadi unsur penting yang tak boleh ditinggalkan dalam pembahasan ini, dan akan ditemukan pada bab ini dengan mengangkat kembali mengenai bagaimana produk-produk Orde Baru melalui kebijakan di berbagai bidang atas dasar landasan teori yang ada.

Bab IV. Bagian ini akan mendeskripsikan mengenai tataran selanjutnya dari pengaruh militerisme di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Penerapan di lapangan dengan kebijakan-kebijakan yang ada, menjadikan tindakan-tindakan represifitas sangat tinggi. Kebijakan-kebijakan pusat ternyata juga diikuti oleh kebijakan-kebijakan di daerah saat itu, contohnya Yogyakarta. Dari sekian banyak media cetak di Yogyakarta, mereka juga digiring untuk memberitakan hal-hal sesuai preferensi pemerintah, sampai akhirnya ketika terjadi “penyelewengan” maka muncullah tindakan pemberangus yang lebih kejam seperti dalam contoh kasus terbunuhnya Udin, pelaku pers di Yogyakarta.

Bab V Bab ini merupakan bagian penutup, yang di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran-saran bagi upaya pemajuan kehidupan media massa di Indonesia pada umumnya dan Yogyakarta khususnya, bertolak dari pengetahuan yang dimiliki mengenai Sejarah Pers Indonesia serta kesadaran atas pentingnya pelayanan kebutuhan informasi yang benar bagi masyarakat melalui media massa yang berjalan sesuai peranannya dalam kehidupan bernegara.

BAB II

Runtuhnya Orde Lama dan Munculnya Orde Baru

A.Tragedi 1965

1.AD sebagai pendukung utama Soekarno dalam Dekrit 5 Juli 1959.

UUD 1945 salah satu dasar Hukum Negara Indonesia pernah dikoalisikan dengan konstitusi RIS dalam sebuah wujud UUD 1950, ketika pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia yang sebelumnya pernah memilih bentuk pemerintahan federal, kembali memutuskan untuk kembali dalam sebuah wadah Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI), sebab dinilai bentuk pemerintahan ini lebih sesuai dan nyaman untuk diterapkan. Presiden Soekarno sebagai kepala Negara saat itu sebenarnya telah mengusahakan diberlakukannya kembali UUD 1945 melalui pemungutan suara dalam konstituante, namun hasilnya selalu mengecewakan. Dari 3 kali pemungutan yang dilakukan, yaitu pada tanggal 30 Mei, 1 dan 2 Juni 1959, hasilnya selalu tidak memenuhi 2/3 suara, sehingga tidak ada hasil.¹⁵ Kinerja konstituante semakin diragukan dengan sering tidak hadirnya beberapa anggota konstituante dalam beberapa kali sidang yang telah diagendakan. Kondisi semacam ini sangat mengganggu jalannya pemerintahan, apalagi pada masa-masa ketidakpastian hukum seperti saat itu, dimana Undang-undang dasar yang telah sekian waktu ditunggu-tunggu pembentukannya oleh masyarakat, tidak juga dapat terealisasi, oleh karena lambannya kinerja badan konstituante.

Presiden Soekarno dengan wewenangnya sebagai Kepala Negara segera

¹⁵ Nugroho Notosusanto SNI IV, hlm 282

mengambil kebijakan untuk membubarkan badan Konstituante yang dinilai tidak efektif tersebut, seiring diberlakukannya kembali UUD 1945.¹⁶ Kebijakan ini terangkum dalam Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 juli 1959. Segera setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi Negara menyatakan keabsahan Dekrit tersebut, yang disusul dengan dukungan anggota DPR hasil pemilu 1955 dengan pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sesuai UUD 1945 juga segenap jajaran AD dengan kesediaan mengamankan Dekrit Presiden setelah mendapat instruksi dari KSAD sebagai konseptornya.¹⁷

2. Pasca Dekrit Presiden

Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang mengakhiri upaya Konstituante dalam membuat UUD baru pengganti UUD 1945, telah berakibat sangat luas dan mendalam atas sistem politik Indonesia selama kurang lebih 40 tahun, baik dalam hal struktur politik, proses dan budaya politik, hubungan negara-masyarakat, hubungan luar negeri maupun komunikasi dan informasi. Pasca Dekrit 5 Juli 1959, kedudukan presiden yang sebelumnya hanya merupakan jabatan kenegaraan yang bersifat simbolik belaka, kembali menjadi sangat kuat dan dominan.

Badan konstituante yang telah dinilai gagal melaksanakan tugasnya, secara tidak langsung membawa dampak bagi para anggotanya yang segera menyandang *image* negatif atas besarnya keegoisan mereka karena mengutamakan kepentingan golongan yang diusungnya masing-masing, sehingga lupa akan tugas utamanya merumuskan sebuah Undang-undang yang telah dinanti rakyat sebagai landasan untuk sebuah bentuk pemerintahan baru.

¹⁶ Ibid, Nogroho Notosusanto, hlm 283

¹⁷ Ibid, hlm 311

Keinginan besar Soekarno untuk mengutamakan kepentingan rakyat, dan kesejahteraan sebagai tujuan program berikutnya, menggiring pemikiran Soekarno pada pencarian kembali bentuk pemerintahan yang paling pas sehingga dapat membuka kesempatan seluas mungkin bagi tersalurnya aspirasi rakyat. Pancasila akhirnya dinilai menjadi solusi terbaik bagi terwujudnya cita-cita tersebut. Gagasan ini dilandasi pemikiran atas tercakupnya berbagai nilai dasar yang membela kepentingan rakyat, seperti aspek kemanusiaan yang dijunjung tinggi, cita-cita kerakyatan yang adil dan beradab, musyawarah untuk mufakat, dan keadilan sosial yang secara teoritis hal-hal tersebut sangat menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat.¹⁸

Masyarakat dengan segala kebudayaannya berusaha ditempatkan pada tujuan utama pemerintahan saat itu. Kebudayaan yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia, bagi Soekarno harus terus dilestarikan sebagai wujud penghormatan tertinggi atas martabat manusia sehingga segala cita-cita, tujuan dan pemikiran tersebut diwujudkan dengan membentuk sebuah tatanan baru sistem pemerintahan yang berlandaskan pada asas gotong royong. Hal ini ditegaskan Presiden Soekarno dalam pidatonya di Hari Ulang Tahun RI pada tahun 1959 yang berjudul “Tahun Penemuan Kembali”.¹⁹ Bersamaan dengan hal ini sistem ketatanegaraanpun mengalami beberapa perubahan, diantaranya yaitu dibubarkannya DPR hasil Pemilu 1955 dan diganti dengan DPR Gotong Royong, selain itu dibentuklah MPR Sementara (MPRS) sebagai pengganti atas konstituante yang dibubarkan. Sistem Gotong Royong memiliki makna mendalam tidak hanya sebagai sebuah landasan baru pemerintahan namun juga sebagai wahana meminimalisir adanya egoisme individual/golongan, sebab trauma politik masa lalu telah mengajarkan akan

¹⁸ Lihat isi yang terkandung dalam Pancasila

¹⁹ Sejarah Nasional Indonesia, loc.cit, hlm 313

pentingnya persatuan bangsa dalam meraih kemerdekaan.²⁰ Seperti yang sempat dikatakan Pramoedya Ananta Tour bahwa Soekarno berusaha mengerahkan rakyat untuk menjadi satu tinju untuk melawan imperialisme.²¹

3. Nasakom

Soekarno pada dasarnya adalah seorang tokoh nasionalis yang sangat menjunjung tinggi semangat persatuan. Seluruh elemen masyarakat dengan berbagai ideologi dan golongan sah dan memang diharapkannya dapat bersatu dengan tujuan kemerdekaan bangsa. Pemikiran Soekarno akan hal ini begitu nampak pada tulisannya yang berjudul *Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme* pada tahun 1926. Tak heran jika kemudian pada masa pemerintahannya muncul sebuah semangat baru yang terwujud dalam Nasakom dimana memungkinkan bersatunya golongan Nasionalis, Agama, dan Komunis.²² Walaupun Soekarno merupakan seorang pemimpin, namun bukan berarti segala gagasan dapat diterima begitu saja oleh seluruh golongan sebagai sebuah solusi yang paling tepat. Nasakom dalam prakteknya juga terbentur oleh berbagai hambatan, yang menjadi sandungan untuk dapat secara murni diterapkan.

4. Pengkultusan

Begitu kuatnya kharisma Seorang Presiden Soekarno yang bahkan masih dapat dirasakan hingga saat ini dapat ditelusuri pembentukannya dari kondisi sosial yang tercipta pada sekitar tahun 1945 di mana Soekarno seorang tokoh pemimpin bangsa telah

²⁰ Belajar dari pengalaman bahwa konstituante yang dibubarkan seolah menjadi arena persaingan untuk memenangkan kepentingan (meminjam istilah yang disampaikan oleh H Purwanta dalam buku Sejarah XII, terbitan Grasindo)

²¹ Baskara T Wardaya (ed), *Menuju Demokrasi Politik Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Gramedia, Jakarta, 2001, hlm 52

²² Op.cit, Nugroho Notosusanto, hlm 317

berhasil menorehkan begitu besar kekaguman dalam diri rakyat Indonesia dengan keberhasilannya mengakhiri penderitaan rakyat atas penjajahan dengan cara memproklamirkan kemerdekaan RI tahun 1945 tersebut. Selain itu, sosok Bung Karno yang sarat dengan paradok, menjadikannya sebagai tokoh sejarah dengan popularitas dan daya tarik yang luar biasa.²³ Tanpa banyak disadari kekaguman tersebut menimbulkan usaha-usaha dari berbagai pihak untuk sebisa mungkin menguak gagasan-gagasan setiap pidato Presiden Soekarno.²⁴ Sayangnya penyerapan secara mentah tanpa adanya cukup analisis menempatkan Soekarno pada posisi sosok yang selalu benar dan amat sangat dikagumi sehingga terjadilah pengkultus-individuan Soekarno.

Pada perkembangan selanjutnya sebagai seorang tokoh tertinggi yang mempunyai begitu besar kekuasaan, posisi terdekat dengan Soekarno menjadi sebuah target yang seolah diperebutkan oleh berbagai golongan. Tujuannya adalah untuk dapat berkuasa dengan mendapat posisi penting dalam panggung politik saat itu. Pada masa-masa awal pemerintahan, partai-partai besar seperti PNI, PKI dan tak ketinggalan AD menjadi golongan yang begitu getol bersaing.²⁵ Diangkatnya Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS dalam sidang tahun 1963 menjadi puncak proses pengkultusan tersebut.

Pengkultusan ini membawa pengaruh pula bagi lahirnya pemikiran-pemikiran yang mensakralkan seorang pemimpin, sehingga hal ini cukup berpengaruh pula terhadap kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perbedaan yang pada awalnya

²³ Agus Sudibyo, *Citra Bung Karno : Analisis Berita per Orde Baru*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1999, hlm 9

²⁴ H. Purwanta

²⁵ Nugroho Notosusanto, hlm 321

dijamin keberadannya dengan keBhinneka Tunggal Ika an yang dimiliki Indonesia mulai kurang mendapat ruang untuk berkembang. PKI sebagai salah satu partai besar yang memiliki banyak massa rakyat kecil berhasil menduduki posisi strategis dalam panggung perpolitikan kala itu, sehingga kepentingan PKI menjadi sesuatu yang harus didukung oleh berbagai pihak. Namun pada prakteknya, oleh karena adanya berbagai kepentingan dalam setiap golongan maka tidak semua elemen dalam negara saat itu berpihak pada kepentingan-kepentingan PKI dan juga pemerintahan Soekarno. Hal ini nampak ketika seniman-seniman yang tidak turut tergabung menjadi anggota LEKRA mendapat predikat sebagai musuh karena dianggap tidak mendukung pemerintah apalagi dengan mengeluarkan Manifesto Kebudayaan (Manikebu), yang berbuntut dilarangnya Manikebu pada 8 Mei 1964. Situasi ini otomatis mengawali terciptanya politik kubu pada masa itu. Sedangkan AD sebagai kelompok rival yang juga dari awal turut bersaing mendapatkan kekuasaan di panggung politik merasa perlu untuk mendukung Manikebu sebagai kekuatan baru mengalahkan kekuasaan PKI . Alhasil pada tahun-tahun setelahnya banyak terjadi konflik-konflik antara Lekra dan AD. Berhasil didudukinya beberapa kedudukan di dalam DPR-GR dan DPA bahkan dalam Pengurus besar Front Nasional dan Pengurus Front Nasional Daerah pada sekitar tahun 1960an, segera diimbangi oleh kelompok TNI-AD dengan mengajukan calon-calon nya sebagai referensi bagi pemerintah untuk melakukan *cheking* terhadap komposisi personil PKI tersebut.²⁶ Pengawasan terhadap PKI diperketat menyusul adanya kecurigaan pihak TNI AD atas tindakan-tindakan pengacauan yang dilakukan PKI di Jawa Tengah, pimpinan TNI AD terus mengadakan laporan atas perbuatan-perbuatan yang didasari beberapa bukti akan diadakannya

²⁶ Ibid, hlm 318

pengacauan di Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.²⁷ Ketegangan juga menemui puncaknya ketika usaha TNI-AD menjegal PKI yang diantaranya dengan melarang terbit *Harian Rakjat*, serta memerintahkan ditangkapnya DN Aidit cs serta pembekuan kegiatan-kegiatan PKI di daerah, ternyata tidak disetujui oleh Presiden Soekarno yang malahan disikapi dengan dilarangnya Peperda untuk mengambil tindakan-tindakan politis terhadap PKI pada bulan September 1960 dalam sidang Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) dengan Penguasa Perang Daerah se Indonesia (Peperda) yang dilakukan di Istana Negara.²⁸

Badan-badan yang dirasa menentang komunis segera dilarang untuk eksis, seperti halnya yang dialami oleh Badan Pendukung Soekarno (BPS) pada tahun 1964 yang ditutup karena dinilai anti komunis, diikuti diberangusnya sejumlah surat kabar dan majalah yang pro BPS. Pembentukan Poros Jakarta – Peking, pembentukan blok NEFO (New Emerging Forces) dan GANEFO (*Games of the New Emerging Forces*) serta pemberlakuan politik konfrontasi terhadap pembentukan Federasi Malaysia pada awal tahun 1960-an menjadi cermin betapa besarnya kekuatan PKI yang notabene sangat anti barat. Sedangkan Dwikora (Dua Komando Rakyat) yang dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 1964, dan berisi :

- 1) Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia.
- 2) Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, Brunei, untuk membubarkan negara boneka Malaysia

menjadi puncak adanya konfrontasi saat itu. Konflik-konflik kecil yang sudah sering terjadi antara AD dan PKI memicu terjadinya tragedi 1965 sebagai letusan yang lebih

²⁷ Ibid, hlm 319

²⁸ ibid, hlm 318-319

besar atas konflik yang telah lama terjadi tersebut.

5. Gestok sebagai puncak konflik AD vs PKI

Angkatan Darat yang pada masa-masa sebelumnya merasa telah banyak mendukung pemerintahan Soekarno, termasuk dengan mengamankan Dekrit Presiden, menginginkan sebuah kedudukan yang layak dalam sebuah tumpuk kekuasaan Orde Lama. Namun kekecewaan akhirnya memuncak dengan terus berpengaruhnya PKI dalam pemerintahan saat itu. Akhirnya pada tahun 1965 situasi semakin memanas dengan terhembusnya isu Dewan Jenderal dan ditemukannya dokumen *Gilchrist* (duta besar Inggris untuk Indonesia)²⁹ oleh Menteri Luar Negeri yang merangkap kepala BPI (Badan Pusat *Intelligence*) saat itu. Dokumen tersebut berisi rencana Amerika Serikat dan Inggris yang akan melakukan serangan terbatas terhadap Indonesia. Serangan itu akan dilakukan dengan bantuan “*our local army friends*”. Dokumen ini semakin meyakinkan kebenaran akan terjadinya kudeta oleh Dewan Jenderal yang disinyalir sebagai pihak yang membantu rencana serangan AS dan Inggris. Keadaan semakin memanas ditengah perseteruan AD dan PKI yang terus memuncak. Banyak pihak mengeluarkan berbagai dugaan dan pendapatnya mengenai siapa dalang dibalik peristiwa yang menewaskan 7 pejabat tinggi AD ini, yaitu Letnan Jendral Ahmad Yani, Mayor Jendral R. Suprapto, Brigadir Jendral D.I. Panjaitan, Brigadir Jendral Soetomo S., Mayor Jendral Harjono M.T., Mayor Jendral S. Parman, Letnan Satu P.A. Tendean dan Brigadir Polisi K.S. Tubun.

Dalam perkembangannya muncul istilah ‘G 30 S/PKI’, istilah ini seolah muncul untuk mencerminkan bahwa PKI-lah yang dituduh sebagai pihak yang paling harus

²⁹ Bandingkan dengan tulisan Kolonel Abdul Latief, *Pledoi Kolonel A Latief : Soeharto Terlibat G 30 S*, ISAI, Jakarta 2000, hlm 137

bertanggung jawab atas peristiwa ini, selain itu munculnya istilah ‘Gestok’ untuk menyebut peristiwa berdarah saat itu mengandung makna bahwa pemerintah saat itu ingin memusatkan perhatian masyarakat pada peristiwa yang terjadi tanggal 1 Oktober 1965 yaitu dibunuhnya 7 jendral AD “oleh PKI” disinilah strategi *news framing* atau pembingkaian berita mulai nampak, hal lain yang juga bisa dicermati terkait hal ini ialah muncul juga istilah ‘Gestapu’, yang identik dengan ‘Gestapo’, yang merupakan istilah yang muncul dalam negara komunis Jerman. Namun seiring dengan itu semua semakin banyak pula pendapat-pendapat berbagai pihak yang muncul dengan disertai data dan bukti hasil temuan mereka atas peristiwa ini dan siapa dugaan dalang tragedi G 30 S tersebut. Mari kita lihat beberapa pendapat yang muncul terkait tragedi ini :

a. Versi resmi Pemerintah.

Pemerintah menerbitkan berbagai buku tentang peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 dengan didukung oleh hasil persidangan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub). Secara singkat dapat dikatakan bahwa pemerintah berpendapat gerakan itu sebagai pemberontakan atau pengkhianatan PKI. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru kemudian menumpas seluruh kekuatan PKI.³⁰

b. Versi Warman Adam.

Peristiwa G 30 S terjadi karena adanya konspirasi politik dalam dan luar negeri. Kepentingan luar negeri adalah kepentingan AS untuk menahan kekuatan Komunis, sedang kepentingan dalam negeri adalah konflik internal TNI AD, yang ingin menyingkirkan PKI dari pemerintahan Sukarno.³¹

³⁰ Sepanjang masa Orde Baru isu bahaya latent komunis terus santer terdengar.

³¹ Lihat dalam buku Baskara T Wardaya “Bung Karno Menggugat” Galang Press, Jogjakarta, 2006

- c. Menurut Sir Andrew Gillchrist. Dia adalah seorang Dubes Inggris untuk Indonesia memberikan analisis bahwa peristiwa G 30S 1965 dilakukan untuk menjatuhkan Komunis dengan cara menjatuhkan Sukarno. Kudeta akan dilaksanakan 5 Oktober 1965 oleh Tentara dan CIA. Rencana ini dimengerti oleh Kolonel Untung. Dengan persetujuan Aidit dan Syam Kamaruzaman, Untung menggerakkan resimen Cakrabirawa. Namun rencana ini gagal dan menjadi kesalahan fatal, bahkan akibatnya pihak yang persalahkan adalah PKI.³²
- d. Menurut Benedict Anderson. Tokoh ini mengatakan bahwa G 30S adalah sebuah gerakan kudeta merangkak yang dilakukan oleh kubu Suharto melawan kubu A. Yani dalam rangka perebutan kedudukan eksekutif untuk menggulingkan Sukarno dan kekuatan PKI di Indonesia.³³

B. Pengambilalihan Pemerintahan oleh AD

1. Penyingkiran PKI dan Ormas-ormasnya

Tragedi 1965 menandai munculnya Orde Baru sebagai sebuah pemerintahan baru. Peristiwa berdarah yang terjadi pada awal bulan Oktober 1965 ini telah memaksa rakyat untuk memaklumi lahirnya penguasa baru dengan segala atribut militernya. Soeharto seorang Jenderal AD, namun yang tidak menjadi korban penculikan dalam tragedi 1965 tiba-tiba muncul sebagai sosok pemenang, yang pada bulan-bulan setelah terjadinya operasi G 30 S kemudian menghabisi PKI dan antek-anteknya dalam tempo relatif singkat, dengan alasan telah membunuh 7 Jendral Angkatan Darat dalam tragedi '65.

³² Lihat pengakuannya dalam film dokumenter “*Shadow Play*”

³³ Dalam kata pengantar buku *Pledoi Kolonel. A. Latief*

Bagaimanapun Soeharto sebagai sosok yang memegang peran penting pada masa darurat itu telah menjelaskan kondisi dan situasi pada malam kejadian, sehingga bisa lolos dari penculikan dan pembunuhan tersebut, namun bersamaan dengan hal ini banyak pula muncul bukti-bukti setelahnya. Pemaknaan dan kesimpulan akhirnya kembali kepada publik sebagai pihak yang netral dalam melihat realita ini.

Pasca terjadinya Tragedi 1965, situasi politik menjadi semakin ramai dengan adanya aksi-aksi penentangan terhadap PKI dan ormas-ormasnya oleh rakyat pada umumnya. Hal ini terjadi sebab begitu santernya kabar di kalangan masyarakat, dan mahasiswa mengenai betapa kejinya PKI yang kembali telah melakukan pemberontakan kali ini dengan penculikan dan pembunuhan 7 jendral. Angkatan Darat, pihak yang mendadak sedikit gontai dengan terbunuhnya 7 perwira tinggi AD tersebut, dan yang sedari awal telah banyak menyimpan kekecewaan terhadap PKI, segera menyimpulkan bahwa PKI lah yang ada di balik peristiwa ini, dan Soeharto sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) segera bertindak capat untuk dapat menguasai keadaan. Jendral Soeharto dengan menggunakan kekuatan KOSTRAD yang kebetulan sedang ada di Jakarta dalam rangka parade HUT ABRI, yang terdiri dari Batalyon 328 Kujang/Siliwangi, Batalyon 2 Kavaleri, dan Batalyon 1 Resimen Para Komando Angkatan Darat (Men Parako atau RPKAD), segera melakukan gerakan penumpasan terhadap PKI.

34

Operasi dimulai di Kota Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965, dengan segera didudukinya gedung RRI Pusat dan Gedung Telekomunikasi serta menguasai beberapa badan publik lainnya. Dengan operasi ini, maka AD berhasil menguasai kembali ibukota dalam jangka waktu yang sangat singkat, bahkan kurang dari 24 jam. Dengan dalih untuk

³⁴ Nugroho Notosusanto, loc.cit hlm 392

menentramkan hati rakyat, Mayor Jendral Soeharto segera melakukan pengumuman melalui RRI pada pukul 20.00 WIB tentang usaha perebutan kekuasaan oleh Gerakan G 30 S, juga penculikan terhadap para perwira tinggi AD. Namun yang terjadi setelah itu justru sebaliknya, massa seolah menjadi garang begitu pula berbagai golongan-golongan lain seperti halnya mahasiswa, yang kemudian pada awal tahun 1966 mulai nampak luapan-luapan emosi berbagai pihak tersebut yang terwujud dengan adanya berbagai aksi demo, hingga dikeluarkannya TRITURA, tanggal 12 Januari 1966.³⁵

Soekarno sebagai Presiden yang masih aktif menjabat saat itu, segera membentuk koordinasi-koordinasi dengan angkatan-angkatan bersenjata RI, oleh karena itu pada tanggal 2 Oktober 1965 bertempat di Istana Bogor diadakan pertemuan dengan semua panglima angkatan.³⁶ Dalam kesempatan itu Mayor Jendral Soeharto mendapat mandat untuk melaksanakan pemulihian keamanan dan ketertiban yang menyangkut tragedi 1965. RRI menjadi saksi atas diberikannya mandat tersebut, dimana pada tanggal 3 Oktober 1965 pukul 01.30 ditempat ini Mayor Jendral Soeharto menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan mandat tersebut sebaik-baiknya, tugas tersebut meliputi penyelesaian aspek militer teknis.

Mayor Jendral Soeharto dengan seluruh kekuatan Angkatan Daratnya segera meneruskan operasi-operasi pemberantasan PKI di berbagai wilayah lain seperti Jawa Tengah yang bermaskas di Kodam VII Diponegoro. Di solo, dengan kekuatan Batalyon M mengadakan penculikan terhadap Komandan 6 Kolonel Azahari, kepala staf Brigade 6 Letnan Kolonel Parwoto, Komandam Kodim 0735 Letnan Kolonel Ezi Soeharto, Kepala staf Kodim 735 Mayor Soeparjan, Komandan Polisi Militer Detasemen Surakarta Kapten

³⁵ ibid, hlm 404

³⁶ ibid, hlm 395

Pravoto, dan Batalyon M Mayor Darso. Di Semarang, Solo dan Magelang, penumpasan PKI dilakukan menggunakan 5 Batalyon yang berkedudukan di magelang, dan sebagian anggota Batalyon dari Gombong dan Semarang.³⁷

Seiring terus dilakukannya pengejalan terhadap ormas-ormas PKI di berbagai daerah, aksi-aksi menuntut penyelesaian seadil mungkin bagi pelaku G 30 S/(PKI) semakin meningkat, baik oleh para pemuda (KAPPI), mahasiswa (KAMI), ataupun pelajar (KAPI), dan diikuti kasatuan-kesatuan aksi lainnya seperti KABI (buruh), KASI (sarjana) KAWI (wanita), dan lain-lain, hingga pada 26 oktober 1965 mereka membentuk 1 barisan dalam wadah Front Pancasila.³⁸ Keadaan ekonomi yang semakin mengalami penurunan pasca tragedi 65 juga mempengaruhi melonjaknya emosi rakyat yang akhirnya terwujud dalam berbagai macam aksi tersebut. Laju inflasi Indonesia bahkan sempat mencapai 650 %, yang berakibat menurunnya nilai mata uang (devaluasi) rupiah dari Rp 1.000,00 turun menjadi Rp.1.00. Kekecewaan rakyat semakin memuncak dengan diangkatnya tokoh-tokoh yang dinilai sebagai kader-kader PKI seperti Dr. Soebandrio, Ir, Surrachman, dan lain-lain dalam *reshuffle* kabinet yang dilakukan Presiden Soekarno pada tanggal 21 Februari 1966. Kekecewaan diwujudkan massa dengan aksi-aksi pengempesan ban-ban mobil di jalan-jalan raya seluruh ibukota pada tanggal 24 Februari 1966 saat terjadi pelantikan menteri kabinet baru itu. Situasi ini sangat berpengaruh pada wibawa kepemimpinan Soekarno, akibatnya krisis kepemimpinan nasional semakin menjadi.³⁹ Mengatasi situasi ini, Presiden Soekarno segera melakukan beberapa kali pertemuan dengan front Pancasila, dan partai-partai yang ada, namun hasilnya tetap tidak

³⁷ Ibid, hlm 396-403

³⁸ Ibid, 404

³⁹ Ibid, 405-407

dapat meyelesaikan kondisi sosial politik yang ada saat itu. Aksi protes massa terus berlangsung. Sementara situasi yang ada antar AD dan pemerintah nampaknya menjadi kurang sehat ketika AD dengan tugas utamanya sebagai pertahanan dan mengatasi bentrokan-bentrokan fisik yang ada, nampak tidak serius mengatasi kondisi yang kian memanas tersebut. Ditengah aksi masa yang seolah sangat susah dipadamkan, namun AD tetap menjalin hubungan sebaik mungkin dengan Front Pancasila, yang notabene sedang tidak berpihak dengan pemerintah pimpinan Soekarno tersebut. Hal ini nampaknya terkait dengan sikap AD ketika pada tanggal 16 januari 1965 pernah menyatakan ketidak berpihakannya terhadap pembentukan Barisan Soekarno yang dikabarkan memiliki tujuan mempertahankan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, AD saat itu menyatakan tidak setuju atas pembentukan Barisan Soekarno secara fisik.

2. Supersemar dan pendudukan posisi penting pemerintahan

Kondisi sosial politik yang semakin memanas saat itu membuat Presiden Soekarno berada dalam posisi terpojok, di mana kondisi saat itu memaksa Beliau untuk sesegera mungkin membubarkan PKI. Hal ini cukup berat bagi Soekarno mengingat pembubaran tersebut bertentangan dengan doktrin Nasakom yang pernah dicanangkannya. Beberapa perwira tinggi AD yang terus mengikuti Presiden Soekarno pergi ke Bogor, dengan berbekal sebuah pesan dari Jendral Soeharto mengenai kesanggupan dirinya mengatasi segala keadaan terkait pemberantasan PKI dengan syarat diberi wewenang khusus kepadanya, membuat Presiden Soekarno semakin tertekan akan keadaan yang menuntut dibubarkan dan diberantasnya PKI secepat mungkin.

Diantara 3 orang perwira tinggi AD dan pasukan pengawal presiden (Cakrabirawa) Soekarno kemudian menandatangani sebuah *Surat Perintah 11 Maret* (SUPERSEMAR), yang berisi amanat pengalihan kekuasaan untuk sementara kepada Mayor Jenderal Soeharto, guna merampungkan masalah yang ada.⁴⁰ Inilah titik awal lahirnya sebuah jaman Orde Baru dengan segala atribut kemiliterannya. Dimana politik Indonesia yang semula dikuasai rakyat / sipil menjadi dipegang oleh militer, dari arah kerakyatan menjadi berkiblat ke elit politik, orientasi politikpun menjadi pro barat dan anti kolonialisme menjadi meredup.⁴¹ Dengan naiknya Soeharto menjadi penguasa sementara saat itu, dalam waktu relatif singkat golongan mahasiswa dan kesatuan-kesatuan lain yang sebelumnya gencar melakukan aksi protes segera dapat diatasi dan ditertibkan. Tanpa menunggu waktu lama, Soeharto juga segera melakukan perubahan pada tatanan pemerintahan yang ada, dimana pejabat-pejabat yang disinyalir sebagai antek PKI segera dicopot dari jabatannya digantikan dengan beberapa tokoh lain yang ditunjuk. Menteri-menteri yang harus lengser saat itu adalah Dr. Soebandrio, Dr. Chairul saleh, Ir. Surachman, Ir. Setiadi Rekso prodjo, Oei Tjoe Tat SH, Jusuf Muda Dalam, Mayjen Achmadi, Drs. Achadi, Sumardjo, Armunanto, Sutomo Martoprado, Astraminata SH, J. Tumakaka, mayjend dr. Sumarno, dan Letkol Syafei. Sementara beberapa pejabat yang menggantikan diantaranya yaitu Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Dr. Roeslan Abdulgani, dll.⁴²

⁴⁰ Baskara T Wardaya, Makalah “Mencari Cara Lain Memandang Supersemar” dalam rangka launching buku *Membongkar Supersemar*, USD, 10 Maret 2007. hlm 2

⁴¹ Ibid, Baskara T Wardaya, hlm 1

⁴² Sejarah Nasional Indonesia IV, loc.cit hlm 414-415

Supersemar yang menandai lahirnya Orde Baru ini akhirnya dikukuhkan menjadi ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 yang memberikan wewenang kepada Letnan Jendral Soeharto selaku Menteri/Panglima Angkatan Darat untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu demi kestabilan politik. Bersamaan dengan sidang yang dilakukan MPRS tersebut, lahir pula sebuah ketetapan yang menetapkan bahwa Pemilu harus terlaksana paling lambat tanggal 5 Juli 1968, juga dibentuknya kabinet Ampera yang bertujuan memenuhi dan melaksanakan Tritura di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan. Letnan Jenderal Soeharto sebagai pengembang Ketetapan MPRS No: IX/MPRS/1966 mendapat tugas untuk membentuk kabinet ini. Oleh karenanya dalam pelaksanaan tugasnya tersebut Jenderal Soeharto menggunakan segenap kekuatan AD untuk mendukung program-program kerja kabinet yang diembannya. Bertempat di Sekolah Staf dan komando Angkatan Darat (Seskoad) Bandung, dari mulai 25 sampai 31 Agustus 1966 diadakan Seminar AD II dengan tujuan memberi dukungan kepada kabinet Ampera melalui sumbangan pikiran mengenai konsep strategi dan Operasi kabinet Ampera. Akhirnya kabinet yang diresmikan tanggal 28 Juli 1966 berkonsentrasi pada tugas-tugas pokok penyelesaian proses revolusi.

Sebagai pemimpin Kabinet Ampera, sesuai UUD 1945 maka Jenderal Soeharto bertugas memimpin pelaksanaan pemerintahan sehari-hari, dan menjabat sebagai Ketua Presidium. Sesuai dengan prinsip komando dalam militer, maka kabinet ampera dengan fokus desentralisasi teritorialnya meletakkan tanggung jawab seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah dengan memberikan wewenang menjalankan politik dekonsentrasi berdasar tujuan swadaya dan swasembada di berbagai bidang. Pembahasan masalah ini dapat ditemukan dalam ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1968. Berdasarkan alasan

penerapan asa demokrasi Kabinet Ampera juga melakukan pengaturan dalam hal kepartaian, keormasan, dan kekaryaan. Doktrin-doktrin komunisme seperti masrxisme dan leninisme berusaha ditekan pengembangannya dengan mengintensifkan pendidikan agama.⁴³ Selaku pejabat presiden saat itu Soeharto dapat dikatakan sukses mengatasi keadaan dengan semakin meredanya pertentangan-pertentangan politik setelah itu .

Orde Baru sebagai sebuah pemerintahan baru muncul dengan membawa banyak penyesuaian dan perubahan, termasuk bagi hukum-hukum yang sebelumnya berlaku di masa Orde Lama. Ketetapan MPRS No: XXXIV/MPRS/1967 tentang manifesto Politik RI sebagai GBHN, dan masalah gelar atau pengertian Pemimpin Besar Revolusi akhirnya harus ditinjau kembali. Selain itu berdasarkan ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966 maka predikat pemimpin Besar Revolusi yang diberikan kepada Dr. Ir. Sukarno dianggap sebagai gelar biasa karena dinilai tidak membawa wewenang hukum. Karya-karya Bung Karno yang lebih dikenal sebagai ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi seperti yang tercantum dalam Ketetapan MPRS No. XVI/MPRS/1966, tidak lagi memiliki keistimewaan khusus sebab dinyatakan mempunyai kedudukan yang sama dengan karya-karya pemimpin Indonesia lainnya, bahkan ketetapan MPRS tentang penelitian ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno akhirnya harus dicabut. Pada tanggal 29 Februari 1968 Soeharto sebagai pejabat Presiden berbicara di depan DP-MPRS mengenai perlunya segera dilakukan penyegaran DPRGR dan MPRS supaya tidak menghambat Pembangunan Nasional, dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui wakil-

⁴³ Pasal 11 UU No 11/1966 Jo. UU 21/1982 tentang UU Pokok Pers menyebutkan “Penerbitan pers yang bertentangan dengan Pancasila seperti halnya yang bertolak dari paham komunisme/marxisme/leninisme dilarang” dikutip dari buku *Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia*, PT Grafitri, Bandung, 2003, hlm 62, juga dalam Resolusi MPRS No: III/Res/MPRS/1966 mengenai penerapan system pendidikan Pancasila, baca lebih lanjut dalam buku SNI IV hlm 418

wakil tersebut, sehingga pelaksanaan Pembangunan Nasional mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Kuatnya sistem konstitusional, penegakan hukum dan demokratisasi menjadi syarat utama bagi stabilitas politik saat itu. Selain itu masalah nasional yang juga menjadi fokus di masa-masa akhir transisi ini yaitu Pelaksana PELITA I dan pemberantasan PKI.

Kebebasan pers menjadi salah satu tonggak perubahan yang nampak di masa itu.⁴⁴ Pendekatan dengan masyarakat dan lembaga-lembaga penting lainnya seperti pers terus dilakukan sebagai upaya menekan pergolakan sosial dan guna suksesnya program pemerintahan Orde Baru.

C. Berakhirnya Pemerintahan Soekarno

Soekarno yang masih berpredikat sebagai Presiden RI saat itu, pada sidang umum MPRS tahun 1966 diminta untuk mempertanggung jawabkan segala kebijaksanaan yang dilakukan, dan khususnya mengenai G 30 S. Presiden yang memberi nama pidato pertanggung jawabannya tersebut dengan Nawaksara yang mana mengandung arti sembilan pokok masalah,⁴⁵ menjadi sangat mengecewakan bagi MPRS, karena tidak memuat sama sekali mengenai masalah G 30 S, sehingga oleh pimpinan MPRS pertanggung jawaban tersebut dinilai tidak lengkap dan meminta presiden untuk segera melengkapi pertanggungjawabannya tersebut dengan penjelasan mengenai G30 S serta perihal terjadinya kemunduran ekonomi dan moral yang mengikutinya. Presiden memenuhi permintaan tersebut dengan kembali memberikan pidato pertanggungjawaban,

⁴⁴ Melalui Undang-Undang Pokok Pers Nomor 11 tahun 1966, Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm 66-67

⁴⁵ Sedjarah Nasional Indonesia, hlm 422

kali ini dengan sebutan pelengkap Nawaksara (pel Nawaksara). Sangat disayangkan bahwa ternyata mayarakat justru semakin banyak yang tidak puas atas pertanggungjawaban kedua ini. Alasan yang muncul diantaranya karena pertanggungjawaban tersebut dinilai tidak memenuhi Tritura, tidak sesuai ketetapan MPRS No. V/MPRS/1066, bahkan para alim ulama Jawa Barat menyatakan tidak lagi mengakui jabatan Presiden Soekarno sebagai Presiden sebab telah melakukan pelanggaran terhadap Syariat Islam dan undang-Undang Dasar 1945 juga ketetapan MPRS. Alhasil konflik semakin tajam terjadi.⁴⁶

Di tengah situasi yang semakin memanas dikarenakan banyaknya reaksi-reaksi rakyat yang ada, ABRI muncul mencoba menyelesaikan masalah dengan melakukan pendekatan pribadi dengan Presiden Soekarno. Pimpinan ABRI menyarankan agar sebelum Sidang Umum MPRS, Presiden segera melakukan penyerahan kekuasaan kepada Pengembang TAP IX/MPRS/1966, Jenderal Soeharto. Dalam kondisi yang semakin terpojok, akhirnya Presiden Soekarno melalui surat rahasianya pada tanggal 7 Februari 1967 menugaskan Soeharto untuk memimpin pemerintah sehari-hari.⁴⁷ Namun ternyata setelah diadakan perundingan diantara Panglima AD, Jenderal Soeharto dan rekan-rekannya tidak dapat menerima konsep yang ada dalam surat penugasan tersebut. Jenderal Soeharto menginginkan sebuah konsep yang lebih jelas dan mengarah pada penyelesaian konflik yang ada. Perundingan demi perundingan antar Soeharto dan Panglima-panglima AD dengan Presiden Soekarno terus terjadi, sebab sangat sulit untuk mendapatkan kesepakatan bersama, seolah terjadi tarik ulur, tawar menawar mengenai konsep dan isi surat penyerahan kekuasaan diantara kedua belah pihak tersebut terus

⁴⁶ ibid

⁴⁷ Ibid, hlm 423

terjadi. Hingga akhirnya atas undangan Jenderal Soeharto semua menteri berkumpul di kantor Presidium Kabinet tanggal 23 Februari 1967 sore untuk kemudian bersama-sama menuju Istana Negara, tidak ada yang mengetahui maksud undangan Jenderal Soeharto kecuali para Panglima AD. Disaksikan oleh Ketua Presidium Kabinet Ampera, dan para menteri, Presiden Soekarno selaku Presiden/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata RI resmi menyerahkan kekuasaan pemerintah pada Jenderal Soeharto, melalui surat pengumumannya tertanggal 20 Februari 1967.⁴⁸

Memasuki masa-masa awal pemerintahan yang banyak disebut sebagai masa konsolidasi, pemerintah bersama DPR-GR merasa perlu untuk menyusun strategi sebagai kunci keberhasilan program-program Orde Baru. Sesuai Sistem Komando yang ada dalam militer, maka penguasa-penguasa daerah perlu suatu tatanan yang jelas mengenai hubungannya dengan pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Berkaitan dengan hal ini, maka penyelesaian berbagai macam Undang-Undang menjadi agenda utama pada masa awal pemerintahan, termasuk dalam hal ini Undang-undang yang mengatur hubungan antara Pusat dan Daerah sesuai ketetapan MPRS, sedangkan untuk melancarkan sistem yang ada maka sistem kerja yang konstitusional begitu ditekankan supaya koordinasi dapat berjalan lancar.

Berbagai koreksi dilakukan pemerintah dengan pertimbangan yang juga dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA), untuk urusan keuangan pemerintah melakukan koreksi dengan pertimbangan dari Bapeka, Badan Pemeriksa Keuangan. Pada masa-masa itu perubahan juga segera nampak dalam bidang hukum. Semua produk Orde Lama yang dianggap tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dihapuskan. Badan-badan

⁴⁸ Ibid, 424-425

pengadilan dapat bergerak lebih leluasa dalam tugasnya. Usaha pemberantasan korupsi nampak dilakukan dengan serius dengan dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) tahun 1968, dan juga Komisi Empat.⁴⁹ Tak hanya itu masalah-masalah penyelundupan pun dapat diminimalisir melalui pembentukan Tim Penyelidikan dan Pengusutan Perkara penyelundupan (TP-4) yang sampai pada tahun 1969 kedua lembaga ini berhasil mengajukan 140 perkara korupsi dan penyelundupan.

Menjelang Pemilu tahun 1971 melalui surat keputusan nomor 43⁵⁰ Presiden menetapkan berbagai ormas yang boleh mengikuti pemilu dengan kriteria partai politik yang boleh ikut yaitu yang pada saat pemilihan umum sudah ada dan diakui juga memiliki wakil di DPR/DPRD. Partai-partai tersebut yaitu Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Murba, Nahdatul Ulama (NU), Partai Isla Persatuan Tarbiyah Islam (PI.Perti), Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Sekber Golkar. Pasca dilaksanakannya Pemilu tanggal 3 Juli 1971 dengan Golkar sebagai pemenang mutlak mendapat 227 kursi mengalahkan banyak pesaing dibawahnya seperti NU :58 kursi dan PNI:20 kursi, aparatur pemerintahan semakin mudah disatubahasakan.

Hubungan antara pemerintah dengan pers pada masa 1966 hingga 70an banyak dikatakan sebagai masa bulan madu.⁵¹ Istilah ini muncul dikarenakan situasi yang diciptakan pemerintah pada masa itu begitu melegakan bagi para pelaku pers Indonesia,

⁴⁹ ibid, hlm 428

⁵⁰ ibid, hlm 427

⁵¹ Bandingkan dengan pendapat Masduki dalam bukunya “*Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*” hlm 4, UII Press, Yogyakarta, 2003, dan DR. Krisna Harahap SH.,MH dalam buku “*Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia*”, PT. GrafitriBandung, 2003, hlm 50

yang sebelumnya, yaitu pada masa Orde Lama kurang mendapat kebebasan dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai kontrol sosial. Bahkan Presiden Soekarno dalam sebuah kesempatan pidato dalam rangka Ulang tahun PWI ke-19, mengatakan, "*Saya dengan tegas menyatakan sekarang bahwa dalam suatu revolusi tidak boleh ada kebebasan pers. Hanya pers yang mendukung revolusi yang dibolehkan hidup.*" Pada masa Orde Baru keadaan segera berubah terutama dengan dikeluarkannya produk hukum responsif yaitu TAP MPRS Nomor XXXII/1966 dan UU Nomor 11 Tahun 1966 yang mencabut segala bentuk ketentuan hukum yang pada periode Orde Lama dianggap sebagai faktor penghambat praktik kemerdekaan pers. Hal ini juga mencerminkan paradigma politik yang telah berubah dari otoritarian ke arah yang lebih demokratis.⁵²

Dicabutnya Peraturan Panglima Perang Tertinggi Nomor 10 tahun 1960 yang mewajibkan SIT bagi setiap penerbit, melalui UU Nomor 11 tahun 1966,⁵³ semakin memberikan ruang bernafas yang melegakan bagi para pekerja pers. Peraturan tentang sensor, bredel, dan izin cetak pers pun dihapus. Dengan kebijakan yang diambil pemerintah Orde Baru tersebut, mengakibatkan didapatnya banyak dukungan tidak hanya dari pers namun juga dari berbagai elemen masyarakat lain mahasiswa dan kaum intelektual yang notabene mendukung demokratisasi yang tengah diusahakan tersebut.

⁵² Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia* (Jakarta: Grasindo , 2005) hal. 77

⁵³ Loc.cit, DR. Krisna Harahap SH.,MH

BAB III

Berkembangnya Orde Baru menjadi Fasis

Teori Fasis dan pelaksanaannya

Selama rejim Nazi menguasai Jerman (1933 – 1945), Jerman adalah negara yang memiliki kekuatan fasis terkuat saat itu. Namun sejak kekalahan trio negara fasis (Jerman, Jepang dan Italia) dalam Perang Dunia II, bisa dipastikan tidak ada negara yang

benar-benar menerapkan dan „mengklaim“ dirinya negara fasis murni. Berbicara mengenai negara fasis beberapa ciri yang bisa kita lihat diantaranya:

- A. Ketidakpercayaan terhadap rasionalitas
- B. Penolakan terhadap kesetaraan hak dasar manusia
- C. Perilaku yang menekankan pada kebohongan dan kekerasan
- D. Pemerintahan yang dikuasai oleh elit tertentu
- E. Totalitarisme
- F. Rasisme
- G. Oposisi terhadap hukum dan perintah Internasional⁵⁴

Namun mari kita lihat lebih cermat ciri-ciri tersebut di negara kita, dalam masa pemerintahan Orde Baru banyak sekali berbagai pelanggaran yang mengarah kepada penerapan faham fasis dalam penyelenggaraan negara.

A. Ketidakpercayaan terhadap rasionalitas

Penerapan ketidakpercayaan terhadap rasionalitas ditandai dengan pemikiran yang dilandaskan ketidak percayaan, dan perilaku mistis yang melingkupi. Secara psikologis, fasisme lebih bersifat fanatik daripada reflektif, dogmatik daripada open-mind, dan pemimpin yang susah sekali menerima kritik atau masukan. Gambarannya bisa kita lihat pada era Musolini (1922 – 1945) yang mengatakan „Mussolini selalu benar“.⁵⁵

Begitupun jika kita bandingkan era ORBA, bagaimana sosok pemimpin saat itu mampu menerapkan hal tersebut. Untuk kasus-kasus yang sering terjadi dan sangat dekat dengan media, saat itu media selalu dalam posisi yang tidak „benar“. Sedikit

⁵⁴ Ebenstein, William., ibid, hlm 107

⁵⁵ Todays Isms, hlm 107

ketidaksesuaian berita yang dilakukan pers terutama mengenai pemerintah sangat mungkin membuat pelaku dan lembaga pers tersebut lumpuh untuk selamanya.⁵⁶ Hal ini akhirnya menjadi sebuah bayangan traumatis tersendiri bagi para pelaku pers masa itu walaupun beberapa upaya telah dilakukan, diantaranya tercermin dengan pernyataan PWI dalam memorandumnya di Konferensi kerja di Kinilaw tanggal 17-21 Juni 1969 yang sekaligus juga sebagai kritikan atas UU Pokok Pers tahun 1966 yang mengganggu pertumbuhan pers, bahwa menurut mereka isi dan jiwa UU Pokok Pers yang baru hendaknya lebih menjamin adanya kebebasan pers yang bertanggung jawab, menjamin adanya penerbitan pers yang berdasarkan asas kekeluargaan antara penerbit dan karyawan, menjamin tegaknya demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵⁷

B. Penolakan terhadap kesetaraan Hak Dasar Manusia

Sementara untuk ciri yang kedua, penolakan terhadap kesetaraan hak dasar manusia yang menjadi denominator pergerakan dan negara fasis.⁵⁸ Banyaknya korban kekerasan fasisme Jepang di masa kejayaan Kaisar Hirohito menjadi contoh dalam hal ini, hak dasar sebagai manusia seolah tak dihargai dengan banyaknya berjatuhan korban pembantaian Nauling oleh tentara Kaisar Hirohito, juga adanya perbudakan seks pada

⁵⁶ Terkait pasal 8 Peraturan Menteri Penerangan tentang lembaga SIT (27 Mei 1969) “Penerbitan Pers yang dikenakan pencabutan SIT sebagai akibat larangan terbit, dengan sendirinya SIPK-nya dan lain-lain fasilitasnya ...dicabut”

⁵⁷ *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, hlm 188

⁵⁸ *Todays Isms*, hlm 108

masa itu yang lebih dikenal dengan Jyugun Ianfu. Ditarik dalam konteks pemerintah ORBA sangat jelas kentara melakukan hal tersebut. Di antaranya yaitu sempat merebaknya kasus SARA, yang tentu saja saat itu dirasakan sebagai suatu bentuk diskriminasi bagi warga keturunan Tionghoa.

Tragedi Mei 1998 yang terjadi di Jakarta dan Surakarta menjadi salah satu contoh dari konflik berbau SARA yang sempat terjadi di masa akhir Orde Baru. Di Jakarta misalnya, kerusuhan rasial ini banyak menghancurkan pusat-pusat pertokoan di kawasan Glodok dan Jakarta Barat, yang sebagian besar pemiliknya adalah warga Tionghoa. Selain itu korban kekerasan seksual dan pembunuhan pada kejadian itu juga warga keturunan Tionghoa. Korban pembakaran sejumlah tidak kurang dari 1.140 orang, dan umumnya berasal dari keluarga pegawai kecil, buruh harian, tukang cuci, pembantu rumah tangga atau dengan kata lain mereka adalah bagian dari rakyat pekerja yang miskin, dimakamkan secara massal di pinggiran kota Jakarta.⁵⁹ Sebagian keluarga korban takut hadir di pemakaman karena pemerintah mengeluarkan perintah tembak di tempat bagi para ‘penjarah’ dan ‘perusuh’ hanya dalam beberapa jam setelah peristiwa. Selama beberapa hari warga di sekitar pusat-pusat pertokoan menjadi sasaran intimidasi dan pemeriksaan oleh aparat keamanan yang menuduh mereka ikut melakukan penjarahan. Keluarga korban maupun warga lainnya tidak berdaya ketika Gubernur DKI memerintahkan aparat keamanan menggeledah rumah-rumah mereka dan dalam beberapa kejadian mengambil barang-barang yang masih baru karena dianggap barang jaraan.⁶⁰ Pasca peristiwa ini, tidak sedikit masyarakat yang mendadak memproklamirkan diri sebagai pro-reformasi, hal ini dilakukan karena adanya penekanan dari pemerintah

⁵⁹ http://www.sekitarkita.com/comments.php?id=183_0_7_0_C

⁶⁰ http://www.sekitarkita.com/comments.php?id=183_0_7_0_C

dengan menjatuhkan vonis bagi mereka yang tewas terbakar sebagai ‘penjarah’ dan menetapkan hukuman tembak di tempat bagi siapa pun yang ingin mengikuti jejak mereka.

C. Perilaku yang menekankan pada kebohongan dan kekerasan

Peristiwa-peristiwa kekerasan dan kebohongan terhadap publik menjadi ciri fasisme selanjutnya.⁶¹ Terungkapnya berbagai kasus-kasus korupsi selama pemerintahan ORBA dan penekanan penyelesaian permasalahan dengan pendekatan militer, sebuah bukti nyata ORBA bermain dengan faham fasis. Di Aceh, lembaga-lembaga Hak Asasi Manusia yang tergabung dalam Koalisi NGO HAM mencatat 650 orang tewas, termasuk sejumlah aparat keamanan, 1280 orang ditahan secara sewenang-wenang dan mengalami siksaan, serta 119 orang lainnya hilang, setelah status DOM di daerah itu dicabut oleh pemerintah. Setelah kesepakatan damai dan ‘jeda kemanusiaan’ kekerasan masih terus terjadi.⁶²

Di Banyuwangi pada tahun 1998 terjadi pengejaran dan pembunuhan terhadap sejumlah guru agama dan santri yang dituduh ‘dukun santet’. Aksi-aksi kekerasan paling banyak terjadi pada bulan September-Oktober, menjelang Sidang Istimewa MPR di Jakarta, dan mengakibatkan sekurangnya 250 orang tewas.⁶³

Di Ambon, kekerasan mulai meledak sejak Januari 1999 dan tercatat 177 insiden terjadi dalam waktu satu tahun. Pemerintah mencatat 2.573 orang tewas sementara 3.475

⁶¹ *Todays Isms*, hlm 108

⁶² *Perundingan Menuju Aceh Damai*, Divisi Kampanye Koalisis NGO HAM Aceh, koalisi@asia.com

⁶³ Hendardi (Ketua Badan Pengurus PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia) *Pelanggaran HAM di Indonesia*, Suara Pembaharuan, 11 Desember 1998

lainnya luka-luka berat dan ringan. Selama bulan Januari-Juni terjadi sejumlah insiden yang kembali menelan ratusan korban jiwa dan luka-luka parah.

Segregasi yang dipraktekkan oleh TNI di Maluku membuat banyak orang hidup dalam kondisi seperti pengungsi dengan sulitnya akses ke sumber pendapatan dan makanan. Setelah peristiwa 23 Juli 1999 di Desa Poka, Kotamadya Ambon, seluruh Pulau Ambon seperti terbelah menjadi dua wilayah, dan warga Islam maupun Kristen terkurung di lokasi-lokasi tertentu, sementara jalur transportasi terputus sama sekali karena para pengemudi tidak mau ambil resiko masuk ke wilayah yang lain. Beberapa pemilik kendaraan harus membayar aparat keamanan untuk jaminan memasang harga sangat tinggi sehingga hanya orang berkecukupan yang bisa melintasi perbatasan. Harga barang dengan sendirinya melonjak tinggi, dan situasi semakin parah karena segregasi kemudian berpengaruh terhadap kantor, toko, bank, dan bahkan rumah sakit. Saluran komunikasi seperti telepon dan sambungan listrik sering terputus tanpa alasan jelas sehingga membuat orang berhari-hari hidup tanpa penerangan dan komunikasi dengan orang dari daerah lain. Segregasi itu juga membuat ribuan orang yang semula bekerja sebagai nelayan, petani, pegawai kecil dan pedagang kehilangan pekerjaan dan akhirnya harus hidup bergantung pada bantuan dari luar.

Perang terhadap golongan rakyat kecil juga terjadi di wilayah Timor Leste dari tahun 1975 hingga sekitar tahun 1998. Ketidaksetujuan atas pendudukan Indonesia atas wilayah ini kebanyakan dilakukan oleh rakyat kecil seperti petani dan pegawai kecil. Sementara itu warga yang telah hidup makmur lebih memilih untuk memihak Indonesia. Oleh karena adanya anggapan mengenai warga yang berseberangan dengan kepentingan Indonesia dianggap sebagai pemberontak, maka banyak rakyat dari golongan kecil ini

menjadi korban kekerasan di Timor Lorosae. Pembunuhan petani banyak terjadi disusul disematkannya banyak predikat “Janda GPK” ataupun “anak pemberontak” sebagai bentuk intimidasi, sehingga mengakibatkan disisihkannya mereka secara sosial, ekonomi maupun politik. Munculnya milisi pro-integrasi di beberapa wilayah disertai meningkatnya operasi-operasi militer, membuat kegiatan-kegiatan produktif sempat terhenti. Bahkan di beberapa kamp pengungsi asal Timor Lorosae, milisi pro-integrasi memaksa sejumlah perempuan menjadi pelayan untuk mencuci baju, memasak dan juga melayani kebutuhan seksual. Seorang perempuan yang selamat dari paksaan itu menggambarkan situasinya bahkan lebih buruk dari nasib para *jugun ianfu* di masa pendudukan Jepang.⁶⁴

D. Pemerintahan yang dikuasai oleh elit tertentu

Dalam ORBA bisa dipastikan mayoritas suara saat pemilu dikuasai oleh kelompok GOLKAR. Dalam semua bidang, orang-orang GOLKAR menduduki jabatan strategis. Penguasaan kelompok elit tertentu dalam pemerintahan menjadi ciri tersendiri dalam faham fasis. Hal ini dimulai ketika pada tahun 1971 pemerintah mengeluarkan gagasan mengenai pentingnya dilakukan penyederhanaan partai-partai dengan cara mengadakan pengelompokan partai-partai yang telah ada. Strategi pengelompokan partai ini didasari oleh alasan adanya trauma masa lalu atas pemerintahan Orde Lama yang sempat terlalu didominasi oleh kepentingan partai. Dengan persetujuan dan dukungan dari partai-partai politik yang ada atas gagasan tersebut, maka pengelompokan dengan sistem Dwi-Partai ini

⁶⁴ ibid

segera dilaksanakan. Partai-partai yang ada saat itu dikelompokkan dengan formasi sebagai berikut :

- Kelompok Persatuan Pembangunan : NU, Parmusi, PSII, dan Perti
- Kelompok Demokrasi Pembangunan : Partai Katolik, Parkindo, PNI, IPKI
- Golongan Karya yang pada awalnya bernama Sekretariat bersama (Sekber) Golkar.

Keberhasilan strategi pengelompokan partai dalam kelompok-kelompok ini mengindikasikan keberhasilan Orde Baru menciptakan stabilitas politik dalam negeri, dan yang kemudian ditandai dengan adanya fusi dalam partai-partai politik tersebut, dimana Kelompok Persatuan Pembangunan sejak tanggal 5 Januari 1973 berubah nama menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan kelompok Demokrasi Pembangunan mulai tanggal 10 Januari 1973 berubah nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).⁶⁵

Para anggota legislatif, pada prakteknya lebih banyak mewakili kepentingan Partai/Golongan darimana mereka berasal daripada mendahulukan kepentingan Rakyat yang seharusnya diwakilinya. Dalam sistem ini, GOLKAR memang termasuk sebagai salah satu kontestan dalam pemilu masa itu, namun dalam prakteknya lebih merupakan sebuah wadah yang sengaja dibentuk oleh pemerintah sebagai kendaraan yang akan terus membawa bangsa ke arah suatu pemerintahan otoriterisme selama tetap berlangsungnya rezim ini. Sebagian besar keanggotaan partai saat itu didapat dari sistem pendekatan sosiologis seperti halnya model pendekatan sosiologis yang dikenal sebagai mazhab Columbia (dikembangkan di Universitas Columbia)⁶⁶ menekankan bahwa kecenderungan sikap, opini atau perilaku yang diberikan oleh masyarakat dipengaruhi oleh latar belakang

⁶⁵ Nugroho Notosusanto, SNI IV (Jakarta, Balai Pustaka, 1984) hlm 430

⁶⁶ <http://www.suaramerdeka.com/harian/0403/16/nas4.htm>

sosiologis dan karakteristik sosial ekonomi, kelas, agama, etnis, ras, pekerjaan, pendidikan, dan konteks sosiologis lainnya. Artinya bahwa anggota tidak dapat dengan bebas mencerahkan pemikiran untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam penentuan partai politik, namun atas dasar identitas rakyat yang dimiliki dan melengkapinya dengan penentuan syarat mutlak tetap masuk atau tidaknya dalam entitas tertentu, maka pemerintah memaksakan dengan mewajibkan keanggotaan suatu partai politik tersebut.

Hakekat demokrasi menghendaki terwujudnya pemberian porsi yang cukup pada masyarakat dalam berbagai bidang termasuk politik yang bahkan menjadi ranah paling penting bagi setiap warga negara, demikian juga hendaknya yang terjadi di Indonesia. Melalui sistem kepartaian, pada dasarnya sudah merupakan salah satu solusi tepat untuk menuju ke arah demokratisasi yang sejati, melalui bidang politik. Berbicara mengenai kondisi perpolitikan di Indonesia, maka tidak dapat dilepaskan dengan adanya kekuatan militer yang begitu erat dengan bidang ini.⁶⁷ Militerisasi di Indonesia dimulai dengan masuknya militer ke wilayah politik. Hal ini dilakukan oleh kalangan perwira yang mengambil-alih urusan-urusan non-militer, sebelum kemudian militer merambah ke wilayah kehidupan sipil lainnya.

Sistem proporsional murni⁶⁸ yang merupakan bagian dari aspek keterwakilan justru tidak menguntungkan bagi sebagian besar partai-partai kecil yang ada, sebab pada prakteknya golongan-golongan tertentu telah terbelenggu oleh kewajiban memilih Golkar, sehingga sebagian besar suara sudah jelas masuk ke Golkar, yang akhirnya

⁶⁷ Wawancara langsung dengan Masduki, Kamis 16 november 2006, jam 20.00 wib

⁶⁸ sistem proporsional seperti yang dipakai di Indonesia, kursi dibagi berdasar jatah. (<http://pjvermonte.wordpress.com/2007/02/24/diskusi-sistem-politik-dan-pemilu-kita/>)

menjadi tidak menguntungkan bagi partai-partai kecil yang ada. Jika kembali ke hakekat dari sistem proporsional murni maka akan terlihat bahwa sistem ini memungkinkan adanya multipartai, namun pembatasan jumlah partai yang tidak mendukung adanya multi partai justru telah bertentangan dengan istilah proporsional murni yang didengungkan dalam pemerintahan Orde Baru.⁶⁹

Menyangkut masalah keotoritasan partai, guna menelaah masalah ini nampaknya harus dilihat bagaimana atau seberapa besar kekuasaan pemerintah dibandingkan dengan kekuasaan partai dalam pemilu. Mengingat adanya banyak campur tangan pemerintah dalam mengatur jalannya pemilu, mengkotakkan golongan-golongan tertentu yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ABRI ke dalam sebuah wadah Golongan Karya, dan adanya banyak peraturan lain menyangkut Pemilu, membuat sangat jelas terlihat bahwa kekuasaan pemerintah lebih besar dibanding kekuasaan partai yang ada. Dengan memanfaatkan perangkat birokrasi dan didukung oleh kekuatan ABRI di dalamnya, tak heran jika selama 6 fase Pemilu, Golkar selalu menjadi jawara di dalamnya. Eep Saefuloh Fatah dalam tulisannya berjudul Pemilu dan Demokratisasi : Evaluasi terhadap Pemilu-Pemilu Orde Baru; Evaluasi pemilu Orde Baru, halaman 13-32)⁷⁰ menjabarkan bahwa dalam 6 kali pemilu Orde Baru Golkar selalu menjadi pemenang dengan perolehan suara mayoritas mutlak antara 62,11 persen hingga 73,16 persen. Tidak hanya itu, pemilu-pemilu Orde Baru juga ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi politik, data yang ada menyebutkan :

- Tahun 1971 : 94,2 persen

⁶⁹ *Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 1971 – 1997*,
http://www.transparansi.or.id/majalah/edisi5/5berita_11.html

⁷⁰ *ibid*

- Tahun 1977 : 90,93 persen
- Tahun 1982 : 92,03 persen
- Tahun 1987 : 91,3 persen
- Tahun 1992 : 90,91 persen, dan termasuk tertinggi di dunia.

Sayangnya angka partisipasi politik yang tinggi ini masih tercipta oleh karena tingginya mobilisasi politik terhadap pemilih dan juga oleh karena dipertahankannya stigma politik standar bahwa “penduduk yang tidak menggunakan hak pilih adalah warga negara abnormal” senada dengan satu lagi ciri fasisme yaitu siapapun yang membangkang adalah musuh.

Rakyat kecil menjadi memilih untuk diam di antara serangkaian birokrasi yang telah terskenario tersebut. Kondisi seperti ini setidaknya menjadi cukup bukti bahwa kesadaran berpolitik masyarakat saat itu menjadi sangat rendah. Bagaimana tidak? Rupanya hal ini merupakan hasil dari proses penanaman kesadaran berpolitik masyarakat yang dilaksanakan secara setengah-setengah pada masa itu, bahkan hanya sebagai “*make up*” saja, terbukti dengan adanya peraturan bahwa organisasi partai hanya sampai daerah tingkat II dan tidak boleh sampai ke desa, kecuali Golkar yang memanfaatkan perangkat birokrasi.⁷¹

Melihat adanya dominasi Golkar yang merupakan tangan panjang pemerintah yang selalu memenangkan Pemilu. Dan jika kembali ke landasan teori awal pada penulisan ini, maka jelas hal ini menunjukkan adanya bentuk pemerintahan militerisme fasisme yang dijalankan dalam masa pemerintahan Orde baru, dimana disebutkan dalam teori fasisme yang penulis gunakan bahwa salah satu ciri pemerintahan model ini adalah

⁷¹ Ibid

pemerintahan oleh salah satu kelompok elit dan yang otomatis membawa ke arah pemerintahan totaliterisme.⁷²

Dalam sekian lama masa pemerintahan Orde Baru dan sekian kali Pemilu, kehadiran unsur Organisasi Partai Politik (OPP) di dalamnya dapat dilihat lebih sebagai “pelengkap”/pemanis belaka. Pemerintah tetap saja melenggang dengan dominasinya yang besar, dengan didukung segenap kekuatan militer. Panitia pelaksana pemilu yang seharusnya memiliki otoritas penuh di dalamnya menjadi sebagai sebuah formalitas oleh karena campur tangan pemerintah yang begitu besar. Totaliterisme dalam hal ini nampak dari dipimpinnya LPU dan Panwaslakpus oleh pejabat-pejabat pemerintahan. LPU diketuai oleh Mendagri, Panwaslakpus oleh Jaksa Agung. Begitu pula dengan PPI (Panitia Pemilihan Indonesia), PPD (Panitia Pemilihan Daerah) dan PPS yang didominasi oleh pemerintah. Terlebih lagi dengan KPPS dan Pantarlih yang hanya diisi oleh unsur-unsur pemerintah.⁷³

Terkebirinya hak sebagian besar masyarakat untuk turut berpartisipasi secara bebas dalam perpolitikan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk penindasan terhadap bangsanya sendiri. Disadari atau tidak rakyat dibuat terlena oleh gairah pembangunan masa Orde Baru, namun tetap dibodohi dengan terkebirinya hak politik mereka, selain juga hak-hak dan kebebasan dasar lain mereka. Kontrol pemilih dan juga partai terhadap penyelenggaraan Pemilu menjadi sangat lemah sehingga hal ini tentu juga menimbulkan tanda tanya besar atas keabsahan pemilu tersebut. Intimidasi terhadap warga masyarakat di pedesaan, untuk memilih golkar yang juga terjadi pada masa

⁷² Lihat *Today's Isms*, William Ebenstein dan Edwin Fogelman, Prentice Hall, Inc, Korea, 1985, hlm 107

⁷³ http://www.transparansi.or.id/majalah/edisi5/5berita_11.html

tenang menjadi salah satu bagian dari rentetan bukti ketidakabsahan pemilu. Bahkan terjadinya pelaksanaan pemungutan suara bukan pada hari libur dan TPS di lingkungan kantor pemerintah dapat dilihat sebagai tekanan terselubung terhadap PNS dan yang tak kalah penting untuk dipertimbangkan adalah pelaksanaan penghitungan suara pada masa itu cenderung dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan OPP ataupun saksi yang independen.

Penyimpangan-penyimpangan dalam Pemilu-pemilu Orde Baru⁷⁴

Berikut beberapa data yang disajikan terkait penyimpangan yang terjadi semasa pemerintahan Orde Baru.

⁷⁴ Ibid., Media Transparansi on line Edisi 5/Feb 1999

Bentuk-bentuk penyimpangan	Jumlah	Persen
• Campur tangan birokrasi terlampaui besar dalam mempengaruhi pilihan masyarakat	255	79,7
• Panitia pemilu tidak independen, memihak salah satu kontestan.	161	50,3
• Kompetisi antarkontestan tidak leluasa.	134	41,9
• Rakyat tak bebas mendiskusikan dan menentukan pilihan.	121	37,8
• Penghitungan suara tak jujur.	94	29,4
• Kontestan tak bebas kampanye karena dihambat aparat keamanan/ perizinan.	90	28,1

Dikuasainya berbagai bidang kehidupan oleh satu golongan elit politik ini seolah kemudian mencetak sebuah *free pass* bagi golongan ini untuk dapat dengan leluasa menggunakan tangan-tangan kekuasaannya dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, Golkar dengan didukung oleh pemerintah yang memang berkepentingan, memiliki peran

untuk mengalokasikan sumber-sumber yang dipunyai pemerintah kepada kelompok-kelompok strategis perkotaan, diantaranya Pegawai negeri dan kelas menengah profesional serta para pemilik tanah di pedesaan. Dana yang diperoleh pemerintah mengucur deras selain dari hasil minyak bumi yang meningkat juga dari teknokrat dan organisasi keuangan internasional seperti Bank dunia, IMF, ADB dan bantuan-bantuan asing bilateral dari Jepang, Eropa Barat dan Amerika Serikat.⁷⁵ Urusan politik yang berubah menjadi bisnis politik ini terbukti dengan keterlibatan Barito Pasific, sebuah perusahaan swasta yang memiliki utang terbesar di bank-bank pemerintah, dalam pemilihan Umum 1999.⁷⁶ Sebuah laporan yang dimuat di dalam majalah *Far Eastern Economic Review* menyebutkan bahwa dari sekitar Rp 350 miliar yang dihabiskan oleh Golkar pada Pemilu bulan Juni 1999, sebesar Rp 80 miliar merupakan kontribusi pemilik Barito, Prajogo Pangestu. Selain itu Prajogo juga diduga telah melakukan transfer ke rekening milik mantan Jaksa Agung Andi Ghalib.

E. Totalitarisme

Negara yang menganut fasisme, menekankan pada totalitarianisme sebagai pandangan hidup mereka melebihi dari sistem pemerintahan mereka ⁷⁷. Kemunculan kekuasaan yang absolut, akan melahirkan kekuasaan yang diktator. Negara totaliter bukan hanya sekadar mengontrol kehidupan masyarakat dengan ketat dan mempertahankan dengan tegas kekuasaan elite politik kecil, juga bukan sekadar rezim seorang diktator yang haus kuasa. Negara totaliter adalah sebuah sistem politik yang dengan melebihi bentuk-bentuk kenegaraan despotik tradisional, mengontrol secara

⁷⁵ ibid

⁷⁶ ibid

⁷⁷ Todays Isms, hlm 110

menyeluruh, menguasai dan memobilisasikan segala segi kehidupan masyarakat.⁷⁸ Dalam prakteknya kehadiran lembaga-lembaga ekstrakonstitusional semacam Kopkamtib atau Bakorstanas di masa Orde Baru menandai begitu kuatnya kewenangan politik penguasa daripada kedudukan hukum yang ada. Lembaga-lembaga ini menjadi semacam perwujudan otoriter-resif pemerintah yang selalu mengatasnamakan stabilitas dan pembangunan. Dengan hal ini, maka sepanjang masa pemerintahan dapat dirasakan bahwa praktek-praktek penerjangan Hak Asasi Manusia dengan mengekang dan mengontrol kebebasan masyarakat dan terjadinya penyeragaman kehidupan masyarakat, contohnya melalui penggolongan ke dalam partai tertentu serta munculnya banyak ancaman dan teror untuk membungkam masyarakat, yang juga banyak dirasakan oleh pelaku pers menjadi wajar untuk dilakukan, sebagai sebuah bentuk totaliterisme penguasa yang jika tidak diwaspadai maka akan menjurus kearah pemerintahan fasis.

Dalam hal ini bahkan totaliterisme yang terjadi pada masa Orde Baru dapat pula dilihat dari sisi budaya. Terkait dengan hal ini. Sindhuṇata pernah mengatakan bahwa penguasa sentral yang Jawa selama Orba cenderung memasang aparat Jawa, baik sipil maupun tentara, di wilayah-wilayah yang jauh dari sentral kekuasaan. Birokrasi Jawa melingkupi daerah mana saja di luar Jawa sehingga birokratisasi itu sangat dimungkinkan, karena penguasa pusat memasang kekuatan tentara sampai ke pelosok-pelosok. Militerisme Orba untuk mempertahankan kekuasaan pusat yang totaliter itu adalah upaya-upaya yang lazim dikerjakan oleh rezim fasis. Sistem yang nyaris fasis memang sangat menjamin dalam menjalankan estetifikasi politik Orba, yang didominasi kebudayaan Jawa itu. ⁷⁹Pernyataan Theodor Adorno⁸⁰ yang menyebut jawanisasi sebagai

⁷⁸ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0003/13/NASIONAL/domi07.htm>

⁷⁹ Sindhuṇata, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/9907/23/OPINI/deja04.htm>

estetifikasi politik yang merupakan bentuk penindasan individu oleh masyarakat melalui penyeragaman kesadaran dan tingkah laku dalam masyarakat nampaknya semakin memperkuat pendapat Sindhuṇata bahwa sistem yang nyaris fasis memang sangat menjamin dalam menjalankan estetifikasi politik Orba, yang didominasi kebudayaan Jawa itu. Sebab dalam hal ini yang muncul adalah pemahaman bahwa hanya dengan ras yang unggul dapat membentuk kultur yang unggul., sehingga sudah selayaknya kultur yang unggul mengestetifikasi kehidupan, termasuk kehidupan politik. Pada akhirnya totaliterismepun akan mengarah ke bentuk-bentuk pemahaman rasis.

F. Rasisme

Pemberlakuan yang kurang adil masih sangat membekas di hati etnis Tionghoa yang telah lama tinggal di Indonesia, khususnya saat rejim ORBA berkuasa. Rasisme yang sangat kentara dengan berbagai kebijakan saat itu yang mereproduksi kekerasan. Diberlakukannya SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) pada awal pemerintahan Orde Baru menjadi gerbang pemisah yang lebih dirasakan sebagai sebuah bentuk diskriminasi bagi warga keturunan yang ada di Indonesia.⁸¹ Penegasan perbedaan ras yang ada secara nyata dirasakan sebagai suatu kondisi ironis bagi warga keturunan terutama tiong hoa masa Orde Baru. Ketika berbicara mengenai kegiatan ekonomi pada masa ini, maka yang tidak mungkin ditinggalkan ialah peranan pengusaha-pengusaha tionghoa di Indonesia yang banyak digandeng oleh pemerintah saat itu guna memperkuat bidang ekonomi, namun di sisi lain perlakuan diskriminatif seperti sulitnya perjuangan mereka, warga keturunan tionghoa di tingkat bawah hanya untuk mendapat sebuah surat

⁸⁰ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/9907/23/OPINI/deja04.htm>

⁸¹ <http://www.suaramerdeka.com/harian/0501/07/kot25.htm>

pengakuan kewarganegaraan di tanah dimana mereka lahir, hidup dan akhirnya mati tersebut sangat menyakitkan untuk diingat. Sebuah contoh kasus yang dialami salah seorang warga Tionghoa bernama Hok Hiong berikut mencerminkan kondisi sulit saat itu.⁸² Hok Hiong mengaku keluarganya saat itu harus membayar biaya yang sangat mahal bagi sebuah SBKRI, hingga harus mencari pinjaman hutang, beberapa kali ia mencoba mengganti nama dengan nama Indonesia tetapi saja selalu dipanggil dengan Hok Hiong, sementara itu Tan Djoe Sing alias Trianto Harjono warga Jl Sanggrahan 14 Ambarawa mengaku sangat kesulitan dalam mengurus akte kelahiran bagi kedua putranya, dan hingga kini mereka tak pernah berhasil mendapat SBKRI. Situasi yang lebih memberatkan terkait masalah kewarganegaraan ini ialah mereka harus membayar hingga jutaan rupiah untuk mengurus Surat Keterangan Tanda Penduduk (KTP) yang seharusnya tidak dikenai pungutan biaya.⁸³

Kondisi diskriminatif ini nampaknya juga telah cukup disoroti oleh Negara-negara lain saat itu. Hal ini nampak pada pernyataan Menteri mentor Singapura Lee Kuan Yew, dalam sebuah forum tentang *good governance* di Singapura bahwa menurutnya di Indonesia dan Malaysia orang-orang Tionghoa adalah pekerja keras dan orang-orang yang berhasil, namun mereka dimarjinalkan secara sistematis⁸⁴ Lee yang sangat dekat dengan Presiden Soeharto tersebut sangat tahu bahwa di masa Soeharto justru terjadi diskriminasi dan marjinalisasi yang hebat terhadap etnis Tionghoa dalam 61 tahun.

⁸² *ibid*

⁸³ *Ibid, Suara Merdeka*

⁸⁴ *The Straits Times*, 16 September 2006

Rezim Orde baru yang sangat anti tionghoa⁸⁵, telah menciptakan kondisi ini sejak awal berdirinya yaitu ketika Orba mulai berkuasa tahun 1965, bersamaan dengan peristiwa 30 September 1965, etnis Tionghoa mulai terpinggirkan bahkan tiarap, apalagi etnis Tionghoa ditengarai temasuk dalam kubu PKI yang berorientasi ke Peking (RRT). Kedekatan etnis Tionghoa dengan Soekarno, membuat Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia), sebagai media aspiratif etnis Tionghoa paling populer saat itu harus menerima kenyataan dibubarkan. Sejak peristiwa itu, hal-hal yang berbau Tionghoa ditabukan. Di Jatim misalnya, Pangdam Brawijaya kala itu (1966) langsung mengeluarkan serangkaian peraturan yang sangat sinofobia (sangat anti-Tionghoa). Peredaran semua koran berbahasa Tionghoa dilarang, termasuk Harian Indonesia yang dikelola Angkatan Darat. Pangdam juga mengeluarkan empat kebijakan diskriminatif. Pertama, mereka hanya diperbolehkan berdagang di Surabaya. Kota-kota lain di Jawa Timur tertutup bagi mereka. Kedua, mereka dilarang pindah keluar dari Jawa Timur. Ketiga, mereka yang tinggal di Jawa Timur dikenai pajak Rp 2.500 per orang. Keempat, melarang huruf atau apa pun yang berbau Cina atau Tionghoa.⁸⁶

Namun demikian, rasisme memang bukan dimiliki satu-satunya oleh faham fasis. Dalam faham demokrasi pun, penerapannya sering kali muncul rasisme. Negara seperti Amerika pun sampai sekarang masih sangat kesusahan untuk menangulangi permasalahan ini.⁸⁷

G. Oposisi terhadap hukum dan perintah Internasional

⁸⁵ Tom S Saptaatmaja, teolog dan aktivis Tionghoa Surabaya, dalam <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0610/10/opi01.html>

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Today's isms, hlm 111

Efek dari kesemua ciri tersebut di atas adalah munculnya berbagai keputusan yang „mengingkari hukum-hukum dan perintah yang bersifat Internasional“.⁸⁸ Fasisme menekankan pada „hukum kebenaran“ pemimpin. Pemimpin dan kebijakannya adalah hukum.⁸⁹ Dalam konteks pemerintahan ORBA adalah bagimana kuatnya pengaruh Presiden saat itu. Sebagian besar Perkataannya adalah perintah sekaligus hukum yang berlaku. Kebijakan yang dikeluarkan pemimpin memang harus berjalan menjadi aturan atau bahkan hukum yang wajib untuk dipatuhi. Nampak salah satunya ketika presiden hendak mengadakan reshuffle pemerintahan kala itu. Karena pembangunan menjadi target utama yang terus diusahakan pencapaiannya pada masa Orde Baru.⁹⁰ Maka dalam upaya tersebut pemerintah mencoba untuk mengkoordinasi masyarakat sebaik mungkin demi lancarnya program pembangunan. Berkembangnya pembangunan di beberapa kawasan negara ketiga lainnya pada masa itu nampaknya mempengaruhi pemerintah Orde Baru untuk mengejar ketertinggalan, dan menjadikan pembangunan sebagai ideologi Orde Baru. Sehingga dalam pelaksanaannya butuh dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Stabilitas keamanan bagi Orde Baru merupakan syarat penting terlaksananya pembangunan tersebut, karena disadari dengan terciptanya keamanan sekaligus dapat miminimalisir terjadinya pergolakan dalam masyarakat, dan terciptanya dukungan dari masyarakat bagi program pembangunan yang dilancarkan pemerintah.

Untuk mewujudkan suatu stabilitas keamanan maka diperlukan koordinasi yang baik antar pemerintah pusat dengan pejabat di jajaran pemerintahan di bawahnya ataupun juga di daerah. Dalam rangka mengatur tata hubungan kelembagaan, maka konsep

⁸⁸ Ebenstein, William, *ibid*, hlm 107

⁸⁹ *Ibid*, hlm 112

⁹⁰ Bertolak dari Ketetapan No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, keuangan dan Pembangunan.

sentralistik inilah yang terus dipertahankan pada masa Orde Baru, otoritas ini dipegang secara sentralistik pada eksekutif yaitu pemerintah pusat.⁹¹ Untuk dapat mempermudah proses pemerintahan, sangat dibutuhkan orang-orang dalam birokrasi pemerintahan yang senantiasa dapat berkoordinasi dengan baik dengan atasan. Sistem komando yang dimiliki militer memungkinkan terlaksananya pemikiran tersebut. Oleh karena itulah pemerintah Orde baru memutuskan untuk memanfaatkan orang-orang yang berasal dari militer guna menduduki posisi-posisi penting dalam birokrasi pemerintahan, dengan harapan akan mempermudah proses koordinasi.

Berdasarkan alasan diatas, maka pemerintah Orde Baru melalui presiden segera memperkenalkan konsep Dwi Fungsi ABRI yang dikukuhkan menjadi hukum pada bulan Mei 1982. Sebagai bagian dari konsep tersebut, maka melalui sebuah bentuk fungsi kekaryaan yang menjadi begitu populer pada masa Orde Baru, sejumlah personel militer didudukan dalam sebagian besar jabatan publik. Praktek kekaryaan tersebut masih terbagi dalam 2 kategori yaitu, *pertama*, penugasan yakni personil militer yang sengaja dipilih untuk menempati jabatan tertentu karena dianggap lebih tepat dan berkualitas dibanding calon dari pihak sipil, *kedua* penyaluran yang mencakup personil-personil militer yang memperoleh jabatan-jabatan publik berkat loyalitas dan jasa-jasanya terhadap lembaga militer.⁹² Fungsi kekaryaan yang berada di bawah kendali langsung MaBes melalui Kepala Staf Sosial politik (Kassopol) ini berjalan cukup efektif. Di masa awal Orde baru para perwira menduduki separuh dari jabatan kementerian di kabinet, dua pertiga jabatan gubernur, 56 % jabatan bupati dan walikota, 78 % jabatan direktur jenderal, 84%

⁹¹ http://www.transparansi.or.id/artikel/artikel_pk/artikel_15.html

⁹² Sutoro Eko (ed), *Masyarakat Pasca Militer* (Yogyakarta :IRE, 2000) hal. 36

sekretaris menteri, dan hampir separuh jabatan duta besar.⁹³ Selain itu pembentukan fraksi ABRI di MPR, DPR, DPRD Tk I dan DPRD Tk II merupakan contoh representasi dari kepentingan militer di tingkat legislatif. Dengan penempatan perwira-perwira tersebut dalam jabatan dan fungsi-fungsi politik maka akan memperkuat dominasi kekuatan militer. Semua aturan ini menjelma menjadi sebuah doktrin yang memang harus dipatuhi.

Besarnya campur tangan militer dalam pemerintahan juga nampak dari adanya pembagian seluruh kepulauan Indonesia dalam banyak wilayah konstituensi, dan setiap anggota fraksi ABRI bertanggung jawab atas satu wilayah tersebut selama empat kali masa reses yang dimiliki DPR setiap tahun. Kemudian di daerah-daerah itulah mereka bekerjasama dengan komandan teritorial, gubernur, anggota DPRD, bupati atau camat. Di masa Orde Baru, sudah menjadi kebiasaan jika seorang Komandan Kodim (Dandim) diangkat menjadi Bupati.⁹⁴ Ini dilakukan atas pertimbangan kemanan dan realisasi dari Dwi Fungsi ABRI. Konsep ini diperuntukan bagi perwira militer yang tak lagi memiliki kesempatan menapaki jenjang karir yang lebih tinggi. Para perwira ini biasanya diplot menjadi kepala daerah baik ditingkat I atau II. Orde Baru menciptakan kategori daerah-daerah tertentu bagi penempatan perwira-perwira ini. Alhasil terjadilah internalisasi nilai-nilai, ideologi, perilaku, organisasi dan wacana militer ke dalam kehidupan sosial / masyarakat sipil tersebut. Dalam menjalankan "kekaryaan" mereka di bidang-bidang sipil untuk mengurus pemerintahan, ekonomi dan politik, pejabat-pejabat militer ini sering memakai pola berfikir kemiliteran juga.⁹⁵ Kondisi masyarakat Orde Baru yang tak bisa

⁹³ Ibid

⁹⁴ Ibid, hlm 32

⁹⁵<http://kontak.club.fr/Suharto%20bertanggungjawab%20terhadap%20kerusakan%20ABRI.htm>

dihindari sebagai konsekuensi atas besarnya dominasi militer adalah terjadinya pemberangus dan penghancuran seluruh kekuatan politik sipil yang berpotensi menentangnya. Hal ini terjadi karena tak jarang para pejabat-pejabat tersebut lebih senang memagari kekuasaannya dengan berbagai tindakan keras seperti manipulasi terhadap pemilihan ketua partai, pencabutan izin organisasi tertentu, pembreidelan media massa, dan pelarangan serta pemberhentian pertunjukkan.⁹⁶ Sebagai contoh konkritnya yaitu diberlakukannya Daerah Operasi Militer (DOM) di berbagai daerah, sehingga politik sipil baik yang berideologi kiri, tengah, radikal dan kanan hampir semuanya merasakan derita akibat operasi politik dan bersenjata yang digelar militer tersebut, dan dalam hal ini hanya mereka yang mau berkompromi serta memanfaatkan kesempatan yang selamat. Dari sini nampak bahwa pemimpin pemerintahan yang kala itu berasal dari militer telah membentuk sebuah pola kepemimpinan yang terus dipatuhi oleh jajaran-jajaran di bawahnya.

⁹⁶ Sutoro Eko, loc.cit, hlm 38

BAB IV

TERPASUNGNYA PERS YOGYAKARTA: KASUS UDIN

A. Latar Belakang Terpasungnya Pers Daerah

1. Penguasa daerah sebagai perpanjangan tangan pusat

Orde Baru dengan nuansa militerismenya telah berhasil membentuk suatu rangkaian panjang sistem pemerintahan yang berlandaskan kekuatan militer sekaligus sebagai solusi utama segala permasalahan. Senjata yang dianggap paling ampuh diandalkan untuk bicara merampungkan permasalahan yang ada. Tak dapat dihindari walaupun kondisi masyarakat Indonesia yang begitu plural tentu akan sangat menolak sistem tersebut, namun tetap saja dengan adanya dominasi militer di segala bidang, dan dalam kurun waktu yang cukup lama maka ideologi militerismepun akhirnya masuk dan berkembang mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, di antaranya ke birokrasi, dengan berkembangnya sifat-sifat dasar militerisme dan yang pasti tertanamnya ideologi. Sebab dipahami sebagai sebuah gejala ideologis, maka tidak selalu menghadirkan keterlibatan institusi militer ke ruang masyarakat sipil.⁹⁷ Wujud sistem pemerintahan di Indonesia saat itu menjadi elitis-birokratis Hal ini dapat dipahami tak lain adalah sebagai wujud dominannya militer di Indonesia, sebab militer di manapun juga selalu memiliki beberapa sifat yang tak dapat dipisahkan, diantaranya yaitu :⁹⁸

a. Sistem komando

Hanya militer yang mengenal sistem ini, sistem komando. Dengan sistem komando setiap anggota militer hanya akan menjalankan tugasnya atas perintah

⁹⁷ Sutoro Eko, *Masyarakat Pasca Militer*, IRE, Yogyakarta, 2000, hlm 16

⁹⁸ ibid

atasannya, bukan pihak lain, hal ini rupanya telah tertanam kuat dalam setiap personil militer, sehingga karena pada masa Orde Baru banyak personil militer yang dimasukkan dalam jabatan-jabatan penting pemerintahan,⁹⁹ maka sistem inipun berjalan pada masa itu, dan akhirnya juga mempengaruhi seluruh birokrasi yang ada hingga merasuk pola ini dijalankan juga oleh seluruh pejabat daerah walaupun tidak berasal dari militer, oleh karena telah terbiasa dan terlanjur berubah menjadi sebuah kultur.

b. loyalitas pada atasan (hierarki)

Nampaknya jiwa loyalitas yang dimiliki seorang personil militer harus diakui menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi jalannya pemerintahan. Sifat loyalitas ini pulalah yang juga mendasari berbagai sikap dan kebijakan para pejabat militer dan sipil dalam menjalankan tugasnya. Setidaknya akan jauh lebih mudah mengatur suatu pemerintahan jika memiliki tangan-tangan lain yang siap dikendalikan 1 otak yang sama, sinkronitas gerak akan mudah didapat dan diorder jika masih dalam 1 tubuh yang sama (berbasis militer, dalam hal ini AD lebih jauh berperan). Perumpamaan ini semoga cukup jelas menggambarkan situasi saat itu yang sarat dengan hubungan korelasi di dalamnya. Sifat loyalitas ini pulalah yang akhirnya juga memperengaruhi betapa tunduknya pemerintah daerah pada pusat yang dalam hal ini merupakan atasan yang harus dihormati dan dipatuhi apapun perintahnya. Militerisme di Indonesia seperti halnya yang ditulis Rudolf Rahabeat dalam bukunya *Politik Persaudaraan Membedah Peran Pers* merupakan penggunaan kekerasan secara sistematis dan ekstensif sebagai alat kebijakan oleh

⁹⁹ Melalui peran sosial politik sebagai pemberian atas intervensi para perwira dalam urusan non-militer, selanjutnya baca Sutoro Eko, *ibid*, hlm 62

militer untuk melakukan kontrol terhadap kelompok atau wilayah tertentu.¹⁰⁰

Rupanya dari sini jelas bahwa memang benar pemerintah Orde Baru dengan militerisminya terus berusaha untuk mengontrol seluruh kegiatan yang ada sampai ke tingkat yang paling kecil yaitu daerah, tentu saja ini dapat terlaksana jika dapat membentuk suatu sistem yang dapat disetir dengan mudah. Memasukkan militer yang loyal terhadap atasannya adalah strategi yang paling jitu.

c. Identik dengan kekuatan dan kekerasan

Militer dari tujuan awal dibentuknya pun adalah semata-mata sebagai angkatan bersenjata, benteng pertahanan negara dari ancaman serangan pihak lain, dan memang tidak pernah dipersiapkan untuk melebar ke bidang lain yaitu sipil., sebab konsep dasar militer adalah semata-mata kekuatan angkatan bersenjata yang bertugas untuk menjaga keamanan dan pertahanan sebuah negara, militer tidak boleh terlibat dalam urusan politik.¹⁰¹ Mulut mereka adalah senjata, dan bahasa mereka adalah kekuatan dan kekerasan. Sehingga memang dapat dipastikan seorang anggota militer yang masuk ke ranah sipil seperti bupati, ketua lembaga penting negara, dan lain sebagainya pasti akan terseok dalam menjalannya, sebab memang mereka bukan orang-orang dengan kemampuan menejerial bagus atau yang kredibel di bidang tersebut. Hanya saja kembali lagi karena telah terlanjur terbentuk suatu sistem politik yang sarat dengan praktik-praktik militerisme, maka segala tindakan pejabat-pejabat daerah tersebut akhirnya dilegalkan

¹⁰⁰ Rudolf Rahabeat, *Politik Persaudaraan Membedah Peran Pers*, Penerbit Buku Baik, Yogyakarta, 2004, hlm 131

¹⁰¹ Sutoro Eko, loc.cit, hlm 13

termasuk penggunaan kekerasan sebagai jalan terakhir penyelesaian masalah. Bagi militer yang selalu menerapkan metode war preparation, kekerasan merupakan suatu hal yang wajar. Mereka lebih suka menerjemahkan makna ke dalam realitas dengan jalan kekerasan, sebab selain itu tentu disadari bahwa perang sebagai salah satu bentuk kekerasan merupakan lahan subur ekspansi nilai ideologi dan model organisasi militer ke dalam kehidupan komunitas sipil.

d. Pemusnahan sebagai solusi terakhir bagi pihak yang tak dapat berkompromi

Sekian waktu berjalannya pemerintahan Orde Baru, tercatat banyak sekali terjadi kasus kekerasan seperti pembunuhan, penculikan, dan juga pemberangus pers.¹⁰² Dari mulai dibunuhnya banyak orang yang diduga anggota PKI, kekerasan yang terjadi pada peristiwa Malari, pemberangus pers atas berbagai pemberitaan yang tidak sesuai preferensi pemerintah, tragedi semanggi, kekerasan yang terjadi karena masalah DOM, dll. Dari ini semua akhirnya dapat disimpulkan adanya sebuah pola penyelesaian masalah yang telah mengakar di tubuh pemerintahan Orde Baru yaitu berdasarkan sebuah ideologi bahwa yang menentang adalah musuh, dan segera harus dimusnahkan jika tak dapat berkompromi lagi.

Berhasilnya Orde Baru menciptakan sebuah pola sistem pemerintahan dengan dominasi militer yang berbasis kekerasan, mengakibatkan nilai-nilai militerisme termasuk praktek-praktek kekerasan direproduksi secara terus

¹⁰² Lihat Y. Argo Twikromo dan Lukas Ispandiarno, *Tragedi Udin : Bingkai Kebusukan kekuasaan dan kekerasan*,(Galang press, Yogyakarta, 2001), hlm 33-39

menerus, dan sampai di tingkat daerah. Kultur militerisme terus berkembang mengakibatkan semakin banyaknya organisasi sosial di masyarakat yang menerapkan pula kultur militerisme di dalamnya. Akibatnya banyak permasalahan dan konflik yang timbul selalu diselesaikan dengan mengedepankan kekuatan-kekuatan fisik. Sampai hal-hal yang sangat sederhanapun ternyata terkadang telah mendapat pengaruh militerisme, hal ini jarang disadari karena sudah terlalu familiarnya masyarakat dengan hal-hal tersebut, contohnya yaitu pemakaian atribut militer oleh satgas-satgas partai, monumen kepahlawanan yang mengagungkan pejuang militer daripada sipil, dan lain-lain.¹⁰³ Ditinjau dari proses yang ada, pada dasarnya proses militerisasi di Indonesia dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu pertama adalah tahap pra intervensi dimana terangkai dalam sebuah cerita panjang sejarah bangsa yang sarat dengan cerita kepatriotan militer dalam membela bangsa ,termasuk dalam penumpasan PKI sebagai aksi lanjutan dari tragedi 1965. Tahap ini menjadi penting sebagai legitimasi historis, dan sekaligus tahap persiapan memasuki wilayah politik yang di dalamnya terdiri dari sejumlah proses seperti merumuskan pemberan, mencari bentuk yang aman, dan konsolidasi kekuatan.¹⁰⁴ Tahap selanjutnya yaitu militer memasuki kehidupan politik, ekonomi dan sosial, yang telah dipicu oleh rangkaian peristiwa sebelumnya, dan telah berhasil mencari pemberan dan mendapat dukungan bagi dominasi para perwira tersebut. Tahapan terakhir yaitu konsolidasi kekuasaan, dan terdiri dari 3 proses yaitu pemanfaatan sebuah wilayah intervensi untuk

¹⁰³ Sutoro Eko, loc.cit, hlm. 77

¹⁰⁴ Ibid, hlm 34

memperkuat kekuasaan, memperluas wilayah campur tangan, dan akhirnya menciptakan keberagaman intervensi.

Keberagaman yang selalu dijaga oleh militer membawa ekses yang kurang menguntungkan bagi perkembangan masyarakat Indonesia yang plural. Budaya ini menimbulkan sifat antipluralisme dalam masyarakat, maka dari itu tak heran jika pada masa Orde Baru isu SARA santer terdengar dan tak jarang menimbulkan banyak konflik terutama di daerah. Di sisi lain konflik-konflik yang timbul memang merupakan peluang emas bagi naiknya kekuatan militerisme, namun kekerasan yang banyak terjadi semakin menjauhkan Negara Indonesia dari Demokratisasi. Cara-cara lama seperti bentuk pengkambing hitaman sebagai bagian dari *political frame* yang dilakukan pemerintah Orde Baru bertujuan menyeragamkan jalan pikiran rakyat seperti apa yang dikehendaki pemerintah / versi pemerintah.¹⁰⁵ Tidak adanya ruang kebebasan menjadi *icon* dari pemerintahan Orde Baru.

2. Militerisme di tingkat Daerah

Beberapa lembaga sosial di tingkat lokal diciptakan oleh negara dengan maksud untuk terus memproduksi budaya militeristik, seperti Hansip, Kamra, Menwa, pengaturan kewajiban tamu lapor Rukun Tetangga, perijinan SKKB, dan ronda kampung.¹⁰⁶ Tidak banyak masyarakat yang menyadari bahwa lembaga-lembaga ini diciptakan untuk mengontrol masyarakat. Terlepas dari pandangan umum masyarakat tentang manfaatnya bagi keamanan, namun sangat jelas bahwa jika kembali ke tujuan utama kontrol

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ashadi Siregar,

¹⁰⁶ Sutoro Eko, loc.cit, hlm 88

pemerintah dan sifat militerisme yang terus selalu ingin dimasukkan dalam segala bidang ini, maka hal-hal seperti ijin bertamu dan memperoleh SKKB merupakan praktik yang agak berlebihan dalam mengontrol hak-hak individu tentu karena juga mengandung kekerasan. Pemimpin seksi keamanan biasanya ditunjuk dari tentara atau polisi yang tinggal di tempat itu. Bentuk-bentuk militerisasi dalam lingkup komunitas terkecil ini merupakan cara efektif untuk mempertahankan kekuasaan pusat yang telah memiliki abdi-abdi loyal di tingkat daerah. Masyarakat mau tidak mau, karena dijejali dengan semangat pembangunan dan kestabilan sosial akhirnya mereproduksi semua itu sebagai bagian dari sistem yang telah ada. Sanksi sosial yang telah membudaya merupakan salah satu bentuk kekerasan yang berlaku di tingkat lokal seperti ini.

Praktek militerisme yang berlaku di tingkat daerah tidak hanya sebatas berwujud pembatasan-pembatasan fisik namun juga ideologi. Contoh kekerasan fisik dalam hal ini nampaknya sudah jelas, diantaranya yaitu banyaknya terjadi kasus penggeroyokan massa terhadap pencuri, penangkapan terhadap orang yang berani memakai atribut partai di tempat umum, praktik perploncoan, dan lain-lain. Selanjutnya untuk pembatasan ideologi pemerintah biasanya melakukannya dengan pendidikan kemiliteran dalam wilayah sipil, banyaknya slogan-slogan seperti “Tamu Menginap 24 Jam Harap Lapor”,¹⁰⁷ dan yang sedikit lebih luas adalah politik pembingkaian berita, tentu supaya berita yang beredar termasuk dalam koran daerah tidak melenceng dari preferensi pemerintah.¹⁰⁸ Sikap penolakan masyarakat terhadap militerisme di daerah sebenarnya telah ada, namun karena terjebak oleh sistem pemerintahan yang ada, dan oleh karena pendidikan politik yang masih rendah maka rakyat lebih cenderung diam tak berdaya dan mengikuti alur

¹⁰⁷ ibid

¹⁰⁸ Bandingkan dengan Lukas Ispandiarno cs (ed), *Media-Militer-Politik Crisis Communication : Perspektif Indonesia dan Internasional*, Galangpress, Yogyakarta, 2002, hlm 272

yang ada. Praktek-praktek kekerasan seperti penggeroyokan terhadap pencuri yang tertangkap, aparat yang menghajar demonstran, perusakan tempat ibadah, tawuran antar desa, dan lain sebagainya terus terjadi, disebabkan oleh karena telah tertanamnya ideologi militerisme hingga ke lapisan masyarakat daerah, bahwa yang menentang / beda adalah musuh, dan yang harus dimusnahkan, kekerasan (perang) adalah solusi tepat yang wajar untuk dilakukan. Militerisme telah terlanjur melembaga dan mengakar secara kultural dalam masyarakat sehingga sangat sulit bagi masyarakat untuk menolak bermacam bentuk militerisme dan berjalannya proses reproduksi.

Terpasungnya kebebasan masyarakat juga terjadi dalam dunia pers tidak hanya di pusat namun juga di tingkat lokal, contohnya saja tindakan-tindakan keras yang menimpak jurnalis di daerah. Dengan terpasungnya pers, maka ini artinya masyarakatpun tidak mendapat kekebasan untuk memperoleh informasi dan menyalurkan aspirasinya, sebab pers yang sukses menyiarkan informasi kepada khalayak adalah pers yang mampu melayani hak untuk mengetahui yang dimiliki khalayak.¹⁰⁹ Eksistensi pers berada pada level yang sangat memprihatinkan, kebenaran yang merupakan basis utama kinerja pers tidak dapat berjalan dengan lancar oleh karena terjadi kontrol yang amat ketat dari pemerintah. Rajin didatanginya kantor berita oleh pejabat, diberikannya ruang khusus bagi pers untuk memperoleh informasi dalam lembaga pemerintahan, adanya badan pengontrol kinerja pers dalam setiap daerah, dan adanya keluhan wartawan tentang seringnya diimbau oleh aparat pemerintah seperti KADISPENDAM, DEPPEN, BAKORSTRANAS, BAKIN untuk tidak menyiarkan sebuah peristiwa¹¹⁰ merupakan

¹⁰⁹ Drs. Ana Hadhya Abrar, MA, *Panduan Buat Pers Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hlm 11

¹¹⁰ Ibid, hlm 14

bukti pembatasan hak-hak pers sebagai upaya memagari berita agar sesuai dengan versi pemerintah.

3. Pers daerah sebagai miniatur pers nasional

Tanggal 16 januari 1974 menjadi tanggal bersejarah bagi kehidupan pers, sebab saat itu terjadi pencabutan SIT (Surat Ijin Terbit) yang pertama oleh Departemen Penerangan akibat “Malari”, dan disusul dengan pembatalan SIC (Surat Ijin Cetak) oleh Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah (Laksus Pangkopkamtibda) Jakarta Raya dan sekitarnya. Harian Nusantara, Jakarta dilarang terbit karena dianggap telah melakukan pemberitaan subversif. Selang tiga hari setelahnya pencabutan SIC di daerah segera terjadi, dimana Laksus Pangkopkamtibda Jawa Timur melakukan pencabutan SIC dari harian *Suluh Berita*, Surabaya karena berita “Demonstrasi Belum Perlu di Surabaya, Tapi Jika Diperlukan Akan Terjadi yang Lebih Patriotik dari Jakarta” tanggal 18 Januari, juga berita tanggal 19 Januari mengenai pengalaman 41 pastor Yogyakarta yang dianggap dapat mempengaruhi situasi keamanan di Jawa Timur.

Penderitaan pelaku pers semakin nyata dengan dicabutnya SIT oleh Departemen Penerangan dari Surat-surat kabar yang SIC nya dibatalkan dalam kaitan dengan Malari pada tanggal 23 Januari 1974. Dari data yang ada tercatat pembedahan yang terjadi hingga saat itu mengakibatkan kurang lebih 417 wartawan dan karyawan pers di ibukota serta 85 di daerah kehilangan pekerjaan. Penderitaan pers tidak hanya dialami oleh pelaku pers dari Indonesia sendiri, bahkan jurnalis dari luar negeri pun harus mengalami nasib yang serupa di wilayah Indonesia, dimana pada tanggal 17 Oktober 1975, 5 Orang

Wartawan Australia dan 1 orang wartawan Inggris dibunuh oleh Kopassanda di Balibo, Timor Timur. Maraknya aksi penentangan terhadap pencalonan kembali Soeharto menjadi Presiden oleh mahasiswa mengakibatkan banyak Surat Kabar ditutup/ dibekukan hanya melalui telpon pada sekitar tahun 1978. Dengan digantinya Surat Ijin Terbit (SIT) menjadi SIUPP pada bulan September 1982, mulai saat itu juga Ijin SIUPP menjadi lebih keras daripada sebelumnya.

Intimidasi terhadap pekerja pers semakin nyata dengan maraknya fenomena PETRUS (Penembak Misterius) yang banyak terjadi di kota-kota besar Jawa dan Sumatra yang dimulai pada sekitar tahun 1983¹¹¹, bahkan pada bulan Juli 1985 beberapa bangunan di Jakarta, termasuk radio dan TV menjadi sasarannya. Hingga akhirnya pada tanggal 13 Agustus tahun 1996 terjadilah penyerangan Fuad Muhammad Syafruddin dengan menggunakan potongan besi di rumahnya dan yang kemudian meninggal 3 hari setelahnya. Beberapa waktu sebelum kematian, diketahui Udin tengah melakukan investigasi suatu kasus korupsi yang melibatkan Bupati bantul Kolonel Sri Roso Sudarmo. Menyusul kejadian ini, pada tanggal 12 Juni 1997 Muhamad Sayuti, seorang wartawan Mingguan Pos makasar, Ujung Pandang, ditemukan luka parah, dan meninggal 2 hari kemudian. Dia sedang melakukan penyelidikan tentang kasus korupsi di wilayah Kaya. Masih di tahun yang sama, tepatnya tanggal 25 Juli Naimullah, seorang reporter harian Sinar Pagi, Jakarta ditemukan terbunuh di kursi belakang mobilnya di pantai Peniungan, Kal Bar, dengan luka-luka tikaman di lehernya, dan memar di kepalanya. Sebelum terbunuh ia tengah melakukan investigasi kasus penebangan liar yang melibatkan orang-orang di lingkungan pemerintah daerah. Penting pula untuk diingat

¹¹¹ Y Argo Twikromo cs, *Tragedi Udin : Bingkai Kebusukan Kekuasaan dan Kekerasan*, Galangpress, Yogyakarta, 2001, hlm 34

bahwa antara tahun 1975-1994 seiring maraknya aksi demonstrasi baik oleh mahasiswa maupun banyak golongan masyarakat lain,¹¹² selama itu banyak terjadi peristiwa pembunuhan oleh militer terhadap para demonstran di daerah-daerah, termasuk Timor Timur, Aceh, Lampung, Jawa Barat, dan Madura. Selain itu, kasus Marsinah, terbunuhnya seorang aktivis buruh PT Catur Putra Surya, Surabaya, yang terjadi 8 mei 1993 seolah menandai betapa geramnya penguasa atas banyaknya aksi protes oleh organisasi buruh (di luar serikat pekerja seluruh Indonesia) dan lembaga-lembaga masyarakat yang terwujud melalui demo dan pemogokan- pemogokan.¹¹³

Usaha pers Indonesia untuk mencoba kritis dengan membeberkan realitas yang ada dalam masyarakat nampaknya dalam kurun waktu tahun 80 an hingga masa berakhirnya rezim ORBA juga banyak terbentur oleh peringatan-peringatan dari Departemen penerangan.¹¹⁴ Hanya bermodal kemampuan melaporkan fakta yang ada, seringkali pers segera harus mundur dikarenakan adanya peringatan atas berita yang dinilai mengganggu stabilitas keamanan, tendensius, dan meresahkan masyarakat.¹¹⁵ Beberapa contoh kasus yang mendapat peringatan tersebut diantaranya yaitu :

¹¹² Ibid, lihat hlm 33-37, mengenai rangkaian kasus kekerasan selama masa Orde Baru.

¹¹³ Tim penulis, *Kronologi Perkembangan Dan Pembredelan Pers Di Sekitar “MALARI” Januari 1974*, Proyek Penelitian Pengembangan Penerangan Departemen Penerangan RI kerjasama dengan Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoneisa (Leknas-LIPI), Jakarta , 247-253

¹¹⁴ Dimulai dengan adanya Peraturan Men Pen No. 01/Per/Menpen/1984 tentang keharusan memiliki surat ijin, Dr. Krisna Harahap SH.,MH, *Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia*, PT.Grafitri, Bandung, 2003, hlm 137

Tahun 1987, Majalah *Tempo* diperlakukan atas berita pemotongan kepala manusia oleh Suku Dayak Hindu Kaharingan, berita ini dianggap telah meresahkan masyarakat¹¹⁶

Tahun 1988, *Harian Pelita*, *Jawa Pos*, dan *Berita Buana* diperlakukan karena pemberitaan kasus lemak babi, yang dianggap telah meresahkan masyarakat / tindakan subversif. Tindakan-tindakan kekerasan terhadap pers daerah tersebut terjadi di berbagai daerah seiring terus terjadi pula kasus-kasus kekerasan serupa seperti pembreidelan, penculikan, penganiayaan sampai pembunuhan pekerja pers di pusat.

B. Contoh Kasus : Meninggalnya Wartawan Senior Bernas, Udin

1. Cengkeraman kuat militerisme dalam tangan-tangan kekuasaan

Berdirinya Orde Baru memang telah muncul dengan segala atribut militernya. Sebab angkatan bersenjata ini memang sangat dibutuhkan terutama sebagai benteng pertahanan dan salah satu elemen pokok dalam pengamanan situasi yang ada dalam negara tersebut, bahkan di Indonesia sendiri polisi telah melengkapi badan lembaganya dengan slogan pengayom masyarakat. Namun jika melihat suasana berkehidupan pada masa Orde Baru kaitannya dengan peran militer, maka dapat dikatakan ini telah sangat melampaui batas kewajaran. Dwi Fungsi ABRI yang disahkan menjadi hukum sejak bulan Mei tahun 1982, seolah menjadi alat legalitas bagi angkatan bersenjata untuk mengintervensi bidang kehidupan lainnya termasuk di ranah sipil. Hal ini menjadi sangat nyata dapat dilihat sebagai usaha penciptaan satu senjata pamungkas penguasa guna

¹¹⁶ Nurudin, *Pers Dalam Lipatan Kekuasaan : Tragedi Pers Tiga Zaman.*, UMM Press, Malang 2003, hlm 39

memudahkan dalam menyetir masyarakat, mengingat pada tahun 1967 secara resmi semua angkatan bersenjata berada di bawah penguasa tunggal Orde Baru.

Militerisme yang begitu kuat akan membawa sifat-sifat dasar militeristik masuk mempengaruhi dalam segala bidang kehidupan, hal ini diperkuat dengan masuknya banyak kekuatan-kekuatan militer ke ranah sipil, dan membuat masyarakat segera harus mengadaptasi diri dalam lingkungan yang serba berkiblat ke atas (elitis-birokratis).¹¹⁷ Masalahnya tidak semua cara-cara militeristik dapat luwes diterapkan dalam kehidupan sipil. Jika bertolak pada sifat militer yang berdisiplin tinggi, tegas, penuh integritas dan dedikasi, maka kemungkinan besar akan sukses jika diterapkan dengan baik dalam rangka menunjang segala aktifitas masyarakat termasuk dalam kehidupan sipil. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pada akhirnya kompleksitas kepentingan dan situasi jaman, kepribadian setiap individu serta tentu dinamika politik akan sangat berpengaruh pada praktek-praktek kehidupan yang kemudian terjadi. Sangat disayangkan jika dengan adanya berbagai faktor tadi justru perilaku yang muncul adalah otoriterisme, kekuasaan dengan kekerasan, dan tindakan represif yang berlebihan.

Pola-pola otoriter dan represif yang akhirnya diterapkan oleh rezim Soeharto dengan militerismenya tentu menimbulkan trauma yang cukup mendalam. Walaupun dalam hal ini tidak semua pengaruh miltarisme akan membawa rakyat ke arah ketertindasan, namun banyaknya aksi kekerasan demi kekuasaan, budaya “patuh” yang menjelma menjadi keotoriteran dan terpasungnya hak asasi manusia¹¹⁸ telah membuktikan gagalnya rezim ini melakukan pembangunan seutuhnya. Baik Ashadi Siregar selaku pengamat politik dan pers maupun Masduki sebagai praktisi yang juga

¹¹⁷ Sifat dasar militer yang “*follow the Leader*”/ sistem komando

¹¹⁸ Kecilnya ruang untuk membela diri ataupun kebebasan berbicara.

akademisi, sama-sama setuju bahwa militerisme pada masa Orde Baru sudah sangat melampaui batasnya. Jika Ashadi Siregar melihatnya melalui fenomena banyaknya militer yang masuk dalam birokrasi pemerintahan dan mendapat porsi yang begitu banyaknya,¹¹⁹ maka Masduki lebih melihat dominannya militer dari sangat sulitnya kasus-kasus kekerasan terutama kepada pers diungkap pada masa itu, salah satunya adalah kasus Udin.¹²⁰

Kasus Udin adalah contoh realita yang merupakan salah satu buah dari seluruh rangkaian yang ada. Kultur yang telah terlanjur terbentuk, memaksa masyarakat untuk mampu dan mau menerima / melegalkan praktik kekuasaan dengan kekerasan yang terjadi. Dalam proses advokasi kasus Udin, baik Masduki selaku ketua tim advokasi ini dan juga Idayani wartawan Tempo yang juga anggota tim ini, mengaku prihatin dengan sikap kepolisian yang seolah putus asa dalam menyelesaikan kasus ini. Dibalik ini semua Masduki melihat ada kesengajaan dari kepolisian untuk mengambangkan kasus tersebut, terbukti dari sekian kalinya fakta-fakta temuan PWI maupun AJI diajukan ke Kapolda, namun hasilnya nihil, tidak ada satu pun yang ditindak lanjuti secara serius dengan alasan yang selalu dilontarkan oleh Kapolda bahwa saksi-saksi mahkota¹²¹ sudah meninggal, maka sulit untuk menelusurinya. Tentu jika dengan alasan itu, mengapa kepolisian tidak secara serius mengungkapnya jauh-jauh hari sebelum saksi-saksi yang dimaksud meninggal ? Masduki juga mengatakan bahwa ini merupakan budaya lama yaitu hanya sekedar janji-janji untuk meyakinkan masyarakat tanpa berbuat apa-apa. “*Semacam service list saja.*” (Masduki)

¹¹⁹ Wawancara dengan Ashadi Siregar di LP3Y,..

¹²⁰ Wawancara dengan Masduki di Radio Unisi, 16 November 2006

¹²¹ Meminjam istilah yang dilontarkan oleh Idayani dalam papernya mengenai kasus Udin.

Penelusuran kembali kasus Udin (yang tak pernah tuntas ini) bertujuan untuk mengubah cara pandang masyarakat yang menerima “kewajaran” praktek-praktek kekerasan dan membuka ruang-ruang berpikir mengenai prospek perubahan bentuk kekuasaan yang ada sehingga tidak terulang lagi kasus-kasus kekerasan serupa, sebab terjegalnya usaha-usaha untuk mengungkap kasus tersebut telah juga melemahkan dukungan publik dalam mensikapi peristiwa kekerasan yang terjadi.¹²²



2. Kronologi Meninggalnya Udin

<http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Udin.jpg>

Kematian Udin seorang wartawan Bernas membawa keprihatinan berbagai pihak atas mentalitas penguasa sebagai hasil dari reproduksi kekerasan yang ada. Tulisan-tulisan Udin yang sarat dengan kekritisan khas seorang wartawan dinilai sebagai pemicu amarah pihak tertentu, dan yang membawa dirinya dalam kematian. Inilah beberapa tulisan yang dihasilkan Udin sebelum dirinya dianiaya :¹²³

- ` 3 Kolonel Ikut Ramaikan Bursa Calon Bupati Bantul
- ` Soal Pencalonan Bupati Bantul : banyak “invisible hand” pengaruhi pencalonan
- ` Di desa Karangtengah Imogiri, Bantul, Dana IDT Hanya Diberikan Separo
- ` Isak Tangis Warnai Pengosongan Parangtritis.

¹²² Y Argo Twikromo cs, *Tragedi Udin : Bingkai Kebusukan Kekuasaan dan Kekerasan*, Galangpress, Yogyakarta, 2001, hlm 31

¹²³ http://id.wikipedia.org/wiki/Fuad_Muhammad_Syafruddin

Berikut ini kronologi perkembangan kasus Udin sejak rumahnya diamat-amati, hingga penyiksaan, meninggal dunia, dan proses peradilan Iwik, seperti yang diungkapkan oleh Harian Bernas :¹²⁴

12 Agustus 1996: Kediaman Udin sekitar pukul 22.00 WIB telah diawasi oleh dua orang tidak dikenal dengan kendaraan sepeda motor. Satu di antaranya sempat mendekat ke rumah Udin dan mengamati keadaan dalam rumah melalui lubang kunci pintu depan rumah. Salah satu tetangga Udin yang berada di warung bakmi yakni Ny Ponikem memperhatikan tingkah aneh lelaki tersebut. Ia kemudian mencoba mendekat. Tetapi saat ditanya dan dibantu membangunkan pemilik rumah, lelaki tersebut cepat-cepat pergi. Sehingga Udin yang terlanjur keluar rumah tidak berhasil menjumpai lelaki mencurigakan yang menurut penuturan saksi ini ingin menemuinya.

13 Agustus: Selasa malam sekitar pukul 23.30 WIB, Udin dianiaya lelaki tak dikenal dirumahnya Jalan Parangtritis Km 13,5 Bantul hingga luka parah dan tak sadarkan diri. Ia kemudian dibawa ke RSU Je-bugan Bantul, karena tak mampu, Udin terus dilarikan ke RS Bethesda Yogyakarta. Peristiwa itu didahului dengan beberapa kejadian tidak biasa. Sebelumnya, sekitar pukul 21.00 WIB, di kantor harian BERNAS, Udin menemui seorang tamu yang sebelumnya ingin menemui Joko Mulyono (wartawan BERNAS untuk liputan Bantul). Lelaki tersebut mengaku sebagai Kaur Pemerintahan Desa Wirokerten Bantul dan kedatangannya untuk urusan tanah. Tetapi setelah pertemuan singkat itu, Udin terlihat gelisah di kantor. Pukul 21.30 WIB, selesai menulis berita, Udin bergegas pulang ke Bantul dengan Honda Tiger 2000 warna merah hati.

¹²⁴ ibid

Belakangan orang yang ditemui Udin tersebut adalah Hatta Sunanto (anggota DPRD Bantul dan adik Sukrisno, Kaur Pemerintahan Desa Wirokerten Bantul), serta ditemani seorang calo tanah bernama Suwandi.

14 Agustus: Rabu pukul 08.00 WIB di RS Bethesda Yogyakarta, Udin menjalani operasi karena terjadi pendarahan hebat di kepalanya akibat penganiayaan hebat yang dialami Udin malam sebelumnya.

16 Agustus: Jumat pukul 16.58 WIB, tim medis RS Bethesda menyatakan Udin meninggal dunia setelah tiga hari berjuang melawan maut tanpa pernah sadarkan diri. Malamnya, sekitar pukul 23.30 WIB, jenazah Udin disemayamkan sebentar di kantor Harian BERNAS untuk mendapatkan penghormatan terakhir dari rekan-rekannya.

17 Agustus: Jenazah Udin dilepas dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Trirenggo Bantul tepat pada saat bangsa Indonesia merayakan peringatan hari ulang tahun ke-51 kemerdekaan Republik Indonesia.

3. Penyelesaian Kasus Udin

Penyelesaian kasus Udin terasa sangat sulit menemui titik permasalahan yang jelas. Hal ini dikarenakan kesimpangsiuran data yang muncul berkaitan kasus ini. Pihak kepolisian selaku pihak yang diserahi tugas mengusut permasalahan ini memiliki versinya sendiri dalam arena persidangan, begitu pula dengan para wartawan yang dengan kepekaannya terhadap permasalahan yang muncul merasakan kegantilan dalam kasus ini sehingga mereka merasa terpanggil untuk turut andil mengantarkan kasus ini pada titik temu sebuah kebenaran. Berikut 2 versi yang berbeda dari pihak kepolisian dan TPF PWI mengenai pengusutan kasus Udin :

a. Pihak Kepolisian

Pengusutan kasus Udin tak dapat terlepas dari tanggung jawab Mulyono Sulaeman yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Yogyakarta dan menangani kasus tewasnya Udin. Mulyono selaku anggota militer sangat menyadari keberadaanya di tengah begitu kuatnya iklim militerisme yang ada di sekitarnya termasuk di daerah. Pimpinan sesuai etika kemiliteran tetap selalu mendapat tempat penghormatan yang tertinggi. Pernyataan yang dilontarkan Mulyono menanggapi kasus Udin memaksa kita untuk berpikir ulang mengenai pihak mana yang benar-benar bersikap obyektif, sebab beberapa hal yang dituturkan Mulyono setelah dilakukan kroscek ternyata sangat diragukan untuk dijadikan sebuah data. Misalnya saja ketika beliau mengatakan bahwa dalam pengusutan kasus ini sempat mendapat dukungan kuat dari Subagyo HS selaku Panglima Kodam Diponegoro untuk tak gentar bila kasus ini mengarah pada Sri Roso, namun setelah dikonfirmasi, ternyata Subagyo mengaku tak pernah secara serius membicarakan kasus Udin dengan Mulyono, dan pernyataan Subagyo yang mengatakan “Saya hanya mendukung Pak Mulyono untuk melaksanakan tugas penyelidikan sesuai prosedur yang ada” menjadi terkesan begitu klise.¹²⁵ Menurut Mulyono, Sri Roso diluar dugaan ternyata masih menghendaki untuk menjadi bupati untuk periode berikutnya saat itu, sementara Subagyo selaku Panglima Jkodam Diponegoro ternyata telah memiliki calon sendiri. Sri Roso tetap ngotot dengan segala usahanya untuk bisa kembali dipilih termasuk dengan menyuap Yayasan Dharmais. Mulyono menyatakan Subagyo sempat menanyakan mengenai keinginan Sri Roso dalam kepentingan ini, namun Subagyo

¹²⁵ Tempo, 3 september 2006 hlm 68

sendiri setelah dikonfirmasi ternyata menyatakan tak pernah menghubungi Sri Roso berkaitan jabatan bupati periode berikutnya tersebut. Namun Subagyo mengakui adanya langkah yang dilakukan Sri Roso dalam mendekati Noto Suwito, adik Presiden Soeharto, yang mengelola Yayasan Dharmais. Terbukti menurut Subagyo,¹²⁶ Noto Suwito pernah menghadapnya dan mnyarankan dukungan kembali atas Sri ros. Di tengah kondisi yang seperti ini jelas bahwa kestabilan situasi politik dan sosial menjadi sebuah kebutuhan penting yang harus terus terjaga, tentuya untuk menjaga situasi tetap terkontrol dalam dirinya hingga dapat terpilih kembali. Otomatis isu-isu sosial dan politik yang muncul dari berbagai pihak termasuk pemberitaan pers menjadi kendala yang akan sangat berarti. Mulyonopun mengaku perang didekati oleh Sri Roso terkait masalah ini, namun beliau mengatakan tak pernah meladeninya.

Dari apa yang disampaikan Mulyono selaku pejabat kepolisian saat itu tersebut, nampak bahwa ia memiliki dugaan kuat atas keterlibatan Sri Roso dalam kasus Udin. Namun yang muncul di permukaan adalah situasi lain yang tak pernah diduga ketika ternyata penyelidikan polisi lalu mengarah kepada Dwi Sumaji alias Iwik sebagai terdakwa utama. Dukungan yang diminta kepada Mabes Polri menjadi senjata andalannya utnuk menampik dugaan atas rekayasa polisi untuk mengaburkan pelaku sesungguhnya. Namun pihak ini selalu menegaskan bahwa berbagai pihak termasuk di antaranya Sri Sultan Hamengku Buwono X, Pangdam IV Diponegoro, Kapolda Jateng-DIY dan sejumlah pejabat pemerintahan meminta agar kasus Udin diusut tuntas. Dan siapapun yang terlibat dalam kasus ini harus diproses secara hukum.

¹²⁶ ibid

b. Tim Pencari Fakta Persatuan Wartawan Indonesia¹²⁷

Tudingan pihak kepolisian kepada Iwik sebagai pelaku utama dinilai ganjil oleh TPF (Tim Pencari Fakta) PWI, sebab dari beberapa data yang mereka temukan sangat berseberangan dengan hal ini. Tim pencari fakta PWI terbentuk dari ketidak puasan para wartawan selaku rekan seprofesi Udin atas kinerja kepolisian dalam mengungkap kasus terbunuhnya Udin, yang berbelit-belit dan hingga saat inipun masing belum terselesaikan. Secara gamblang data-data yang ditampilkan oleh TPF PWI mengatakan bahwa ada permainan-permainan dan upaya konspirasi untuk memunculkan sebuah fakta baru hasil rekayasa beberapa oknum dalam jajaran kepolisian yang mana orang-orang tersebut berkaitan erat dengan seorang pejabat teras yang sebelumnya banyak tersinggung oleh tulisan-tulisan Udin. PWI menyebutkan telah menemukan data mengenai kecurangan yang dilakukan dalam proses persidangan diantaranya melalui pengakuan beberapa saksi kunci. Supri, seorang tukang parker PN Bantul mengaku diminta polisi memberi pengakuan palsu bahwa dirinya melihat Udin berboncengan dengan seorang cewek, setelah sebelumnya telah sempat melakukan pengakuan tersebut di depan penyidik Polres Bantul, akhirnya setelah tersadar oleh hukuman yang mungkin menimpanya atas tuduhan melakukan pengakuan palsu, maka kepada wartawan dirinya mengaku bahwa pengakuannya itu telah diatur oleh polisi. Pengakuan Supri mengenai hal ini diperkuat dengan kesaksian Sumadiyono, salah seorang wartawan Yogyakarta Post, rekan Udin yang sama-sama bertugas di Bantul bahwa dirinya yang selalu ada bersama Udin waktu itu, termasuk yang berboncengan pada waktu dan hari yang dimaksud yaitu 12 Agustus 1996, jam 11.00-12.00. Data lain mengatakan bahwa Sri “Kuncung” Kuncoro, adik dari Sri

¹²⁷ Data langsung dari TPF PWI, dan wawancara dengan salah satu anggota TPF, Masduki.

Roso Sudarmo yang merupakan salah seorang pamong desa Patalan Kecamatan jetis Kabupaten Bantul, diketahui pernah dua kali mendatangi Tri Sumaryati seorang gadis warga Desa Patalan untuk memintanya mau mengaku sebagai Wanita Idaman Lain dari Udin dengan iming-iming beberapa hadiah, tapi skenario ini gagal karena ternyata Tri Sumaryati akan segera menikah. Beberapa data mengenai upaya konspirasi yang ditemukan ini menunjukkan bahwa ada praktek-praktek kecurangan yang sengaja diciptakan untuk memojokkan Udin dengan membuat beberapa fakta baru.

Selain fakta-fakta kecurangan yang telah terjadi dalam proses penyelidikan kasus ini, data lain yang ditemukan mengatakan bahwa telah terjadi ketidak paduan kinerja dari pihak kepolisian sendiri. Terbukti pada tanggal 21 oktober 1996 pihak kepolisian melalui Serma M Larodin menyarankan bahwa sebaiknya Iwik dipulangkan terlebih dahulu karena bukti-bukti yang masih belum kuat, tetapi lain halnya dengan Serma Edy Wuryanto yang dalam penanganan kasus ini sempat memakai nama Frangky menganggap cukup pengakuan Iwik sebagai bukti awal untuk membawa Iwik sebagai tersangka. Ketidak paduan lain terletak pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh seksi Dokkes Polda Jateng dan Dinas psikologi, sebagai lembaga-lembaga professional yang dalam hal inisama-sama turut berperan dalam upaya penyelesaian kasus ini, keduanya mengeluarkan hasil yang berbeda. Dokkes Polda Jateng merekomendasikan bahwa Iwik dapat ditahan sedangkan pemeriksaan Dinas psikologi mengutarakan sebaliknya sebab kondisi Iwik kurang stabil dan belum dapat bersikap tegas. Dari sini sudah dapat dipastikan bahwa jalannya penyelesaian kasus ini akan pincang dengan kesimpangsiuran dan ketidak paduan pihak-pihak terkait, yang seoalah memiliki tujuan berbeda-beda tersebut.

Kuatnya pengaruh atasan sebagai dampak dari begitu dominannya tradisi militerisme sampai ke daerah juga nampak dari data yang didapatkan TPF PWI dalam sebuah surat Dandenpom IV/2 Yogyakarta (Letkol CPM Poernomo) nomor : K/244/VIII/2001 tertanggal 14 Agustus 2001 angka 2 huruf f yang menyebutkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 1996, Koptu Slamet Wijayantu di Hotel Queen menyatakan penyesalannya karena belum tentu sdr. Dwi Sumaji alias Iwik sebagai tersangka pelaku pembunuhan Udin. Tetapi karena kemauan Serma Edy Wuryanto, maka sebagai bawahan ia menurut saja apa yang diskenariokan oleh Serma Edy Wuryanto.

Inilah fakta-fakta yang berbicara dari beberapa data yang ditemukan oleh Tim Pencari fakta PWI, data-data selengkapnya mengenai hal ini dapat dilihat pada bagian lampiran.

c. Gambaran Umum Penyelesaian Kasus Udin

Banyak data yang muncul berkaitan penyelesaian kasus Udin yang kini nyaris menjadi *Dark Number* tersebut. Maka berikut gambaran umum kronologi usaha penyelesaian kasus Udin di tingkat pengadilan :

Pada tanggal 19 Agustus, sekitar pukul 20.00 WIB, Serma Edy Wuryanto ditemani dua anggota Polres Bantul berangkat dari Mapolres Bantul ke kediaman orangtua Udin di Gedongan Trirenggo Bantul. Mereka bermaksud meminjam sisa darah operasi Udin yang tidak jadi ikut dikubur bersama jenazah Udin. Serma Edy Wuryanto mengatakan darah itu akan dipakai untuk kepentingan pengusutan dengan cara supranatural (akan dilarung ke laut selatan). Meninggalnya udin, sang wartawan nampaknya membawa duka berbagai komponen masyarakat, terbukti pada siang sebelumnya, di tengah-tengah pawai

pembangunan dalam rangka peringatan HUT ke-51 Kemerdekaan RI di Kabupaten Bantul, sejumlah warga Bantul turut menggelar pawai duka cita sambil menggelar spanduk dan mengarak foto Udin.

Dalam sebuah konferensi pers akbar tanggal 23 Agustus di kantor Pemda Bantul, Bupati Bantul Kolonel Art Sri Roso Sudarmo menyatakan diri tidak terlibat dalam kasus ini. Sementara Kapolres Bantul Letkol Pol Ade Subardan mengatakan tidak ada dalang dalam kasus Udin meski tersangka belum tertangkap. Ia juga mengatakan akan menangkap pelaku pembunuhan Udin dalam waktu tiga hari setelah konferensi pers tersebut berlangsung sambil mengatakan biar Bupati Bantul tidur nyenyak.

26 Agustus, sekitar pukul 09.00 WIB, Tempat Kejadian Perkara (TKP) di rumah Udin baru diberi police line setelah 13 hari kejadian pembunuhan Udin berlalu. Sementara itu di Jakarta, Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) ABRI Letjen TNI Syarwan Hamid menegaskan bahwa oknum ABRI yang terlibat dalam kasus Udin akan ditindak tegas. Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus sekitar pukul 10.30 WIB, police line di TKP rumah Udin dicopot kembali oleh polisi. Dengan demikian police line ini hanya berumur kurang lebih 25 jam setelah dipasang untuk kepentingan penyidikan.

Pihak kepolisian melalui Kapolda Jateng-DIY Mayjen Pol Harimas AS pada tanggal 2 september menyatakan sudah memiliki identitas lengkap pelaku kasus pembunuhan Udin. Hari berikutnya Mantan Mendagri Jenderal TNI (purn) Rudini mengatakan, sebaiknya Gubernur DIY Sri Paku Alam VIII memanggil dan meminta keterangan dari Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo.

4 September, Marsiyem secara resmi menjadi klien Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Di kantor LBH Yogyakarta, Marsiyem mengatakan selama ini dirinya

dipojokkan polisi agar mengakui adanya masalah perselingkuhan dalam keluarganya. Dari keterangan Marsiyem Seorang seniman lukis sehari kemudian berhasil membuat sketsa wajah pembunuh Udin. Sketsa wajah itu menurut Marsiyem, 90 persen mendekati wajah asli sang pembunuh. Menurut Sekwilda DIY Drs Suprastowo, Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo sudah menghadap Gubernur DIY dan melaporkan kasus Udin. Tapi dalam laporannya tidak menyinggung kematian Udin berkaitan dengan profesi atau tulisan-tulisannya.

Keluarga Udin terus mengkhawatirkan latar belakang kasus pembunuhan Udin akan dibelokkan ke masalah pribadi, namun Kapolwil DIY Kolonel Pol Darsono mengatakan polisi tetap lurus dalam mengadakan penyelidikan. Langkah yang dilakukan selanjutnya dalam penyelidikan ini adalah dipanggilnya Ketua DPC PPP Bantul oleh Komandan Kodim Bantul pada tanggal 13 September, dan dicecar pertanyaan seputar keterlibatan DPC PPP Bantul dalam upacara pemakaman Udin. Dandim Bantul mengatakan acara pemakaman Udin sudah dipolisir. Gubernur DIY Sri Paku Alam VIII akhirnya mengizinkan pemeriksaan terhadap Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo pada tanggal 23 September.

Di Jakarta, anggota Komisi II DPR RI dari FPP Ali Hardi Kiai Demak menanyakan penanganan kasus Udin kepada Mendagri Yogi S. Memet dalam rapat kerja DPR RI di Komisi II, yang akhirnya pada tanggal 27 September disikapi oleh Kapolri Letjen Pol Dibyo Widodo dengan mengatakan kasus pembunuhan Udin harus dibongkar. Dan ia menegaskan tidak akan ada pembelokan atas latar belakang terbunuhnya Udin ke masalah keluarga atau perselingkuhan. Sementara dari kalangan wartawan di daerah Yogyakarta sendiripun merasa terpanggil untuk turut serta menyelesaikan masalah ini,

sehingga pada tanggal 24 september Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Yogyakarta mengirim surat ke PWI Pusat disertai lampiran temuan Tim Pencari Fakta (TPF) PWI Yogyakarta soal kasus Udin. Pengiriman berkas laporan TPF PWI Yogyakarta tersebut dimaksudkan agar ditindak-lanjuti pengusutannya oleh Komnas HAM dan Mabes Polri. Janji-janji penyelesaian masalah secepat mungkin terus dilakukan, seperti halnya ketika pada tanggal 25 September Kapolwil DIY Kolonel Pol Darsono menegaskan siapapun yang terlibat dalam kasus pembunuhan Udin akan digebuk tanpa pandang bulu.

Pada tanggal 21 Oktober Dwi Sumaji alias Iwik, warga Kavling Panasan Triharjo Sleman dan sopir di CV Dymas Advertizing Sleman, diculik di perempatan Beran Sleman, kemudian dibawa ke Parangtritis. Di Hotel Queen of The South Parangtritis. Iwik disuruh mengaku sebagai pembunuh Udin oleh Franki (Serma Pol Edy Wuryanto) setelah sebelumnya di losmen Agung Parangtritis, Iwik dicekoki minuman keras hingga mabuk, disediakan perempuan, dan diberi janji-janji muluk soal pekerjaan, uang, dan jaminan hidup keluarganya. Sebelumnya ia dijebak oleh Franki dengan alasan diajak bisnis billboard.

Ketika masuk ke pemeriksaan tahap ke lima tepatnya tanggal 24 Oktober, Dwi Sumaji alias Iwik mencabut seluruh pengakuan dalam pemeriksaan tanggal 21, 22, 23, dan 24 Oktober 1996 (dalam 4 kali pemeriksaan sebelumnya). Pencabutan pengakuan sebagai pelaku pembunuhan Udin itu ia lakukan karena merasa dirinya hanya korban rekayasa. Dan pengakuan yang dulu itu karena ia berada di bawah ancaman, tekanan dan paksaan Franki alias Serma Pol Edy Wuryanto. 26 Oktober 1996. Ny Sunarti (istri Iwik) mengadu ke Komnas HAM dan Kapolri atas penangkapan suaminya.

Setelah mengadakan investigasi lapangan, Komnas HAM membuat kesimpulan penting pada tanggal 5 november dengan menyatakan bahwa dalam proses penangkapan Iwik telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, sebab dilakukan dengan cara-cara yang sangat tidak etis. Penyitaan barang bukti milik Iwik menurut Komnas HAM juga dilakukan secara spekulatif. Sehari kemudian yaitu pada tanggal 6 november Kapolda DIY Kolonel Pol Mulyono Sulaiman membenarkan masalah peminjaman sisa darah Udin oleh Serma Pol Edy Wuryanto dan beberapa aparat Polres Bantul. Tetapi setelah sebagian dilarung di laut selatan, sisanya sudah dibuang di tempat sampah Mapolres Bantul, dan keberadaannya tak diketahui lagi.

Polda DIY akhirnya menyerahkan berkas acara pemeriksaan (BAP) Iwik ke Kejaksaan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 20 November. Namun berbagai kalangan mengkritik penyidik terlalu memaksakan kehendaknya untuk menyerahkan BAP Iwik yang tak sempurna ini. Benar saja, karena kemudian Kejati DIY menyatakan BAP Iwik yang diserahkan Polda DIY tidak lengkap, dan meminta penyidik menyempurnakannya. (Selanjutnya BAP ini bolak-balik Polda DIY-Kejati DIY sebanyak 5 kali).

Pada tanggal 29 November (Malam) rencananya akan diadakan rekonstruksi namun sayang rekonstruksi paksa yang menjadikan Iwik sebagai tersangka batal dilaksanakan. Alasannya waktu itu penonton terlalu banyak. Hingga akhirnya pada tanggal 9 Desember: Polda DIY menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Udin di TKP dengan menghadirkan paksa Iwik. Tetapi Iwik berontak dan histeris saat ia dipaksa penyidik Polda DIY untuk memerankan diri sebagai pelaku pembunuhan Udin.

Permasalahan Iwik belum selesai walaupun pada tanggal 18 Desember Iwik dilepas dari tahanan Polda DIY dan penahanannya ditangguhkan, mengingat masa

penahannya telah habis dan pe- meriksaan atas dirinya dianggap selesai. Status Iwik masih tetap sebagai tersangka. Marsiyem istri Udin pantang menyerah dalam penyelesaian kasus ini. Tanggal 31 Desember, ia secara resmi mendaftarkan gugatan kasus pelarungan darah Udin ke PN Bantul. Gugatan ini diajukan Marsiyem mengingat terjadi kekisruhan atas nasib sisa darah Udin yang pernah di pinjam oleh Serma Pol Edy Wuryanto. Dalam kasus ini, Marsiyem didampingi kuasa hukum gabungan dari LBH Yogyakarta dan LPH Yogyakarta. Pihak yang digugat, tergugat I adalah Kapolri cq Kapolda DIY cq Kapolres Bantul. Sedang tergugat II adalah Serma Pol Edy Wuryanto. Dan yang kemudian Kasus gugatan kasus pelarungan darah Udin mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Bantul tanggal 22 Januari 1997. Nilai gugatan seluruhnya adalah Rp 105.890.240. Dalam perkara ini, tergugat diwakili kuasa hukumnya dari Diskum Polda DIY menolak upaya perdamaian yang ditawarkan Majelis Hakim. Sementara Hakim Sahlan Said SH yang semula diplot untuk memeriksa perkara ini ternyata kemudian mengundurkan diri. Namun Serma Pol Edy Wuryanto oleh Majelis Hakim ditolak sebagai saksi. Alasannya, Serma Edy Wuryanto adalah tergugat II dan keterangannya hanya akan dijadikan pelengkap kalau keterangan saksi lain dinilai kurang.

Keganjilan penyelesaian kasus ini nampaknya tidak hanya ditangkap oleh masyarakat dan rekan-rekan wartawan saja, namun juga oleh Pakar pidana dari Universitas Airlangga Prof Dr JE Sahettapy SH yang menilai pengusutan kasus Udin banyak direkayasa. Ia juga menilai motif yang selama ini diyakini polisi yaitu motif perselingkuhan terlalu dicari-cari.

BAP Iwik untuk yang terakhir kalinya diserahkan penyidik Polda DIY ke Kejati DIY tanggal 15 April:. Pihak Kejati DIY menyatakan menerima BAP Iwik. Iwik

berstatus tahanan kejaksaan. Namun pada tanggal 21 April Kepala Kejaksaan Tinggi DIY mengabulkan permohonan penangguhan status penahanan Iwik, dan kemudian Iwik berstatus tahanan luar.

Majelis Hakim dalam perkara gugatan darah Udin memutuskan mengabulkan sebagian gugatan Marsiyem pada tanggal 24 April, dan Serma Pol Edy Wuryanto dinyatakan bersalah telah melakukan tindakan melawan hukum. Se-dangkan keterkaitan atasan Serma Edy Wuryanto dikesampingkan oleh hakim, dengan alasan tindakan Serma Edy Wuryanto adalah tindakan yang bersifat pribadi dan bukan atas perintah atasan yang ber-sangkutan.

Iwik yang oleh banyak pihak dinilai sebagai pihak yang dikambing hitamkan semakin tak berdaya ketika BAP dirinya yang masih menikmati penangguhan penahanan tersebut diserahkan kepada Kejasaan Negeri Bantul oleh Kejati DIY pada tanggal 20 Mei. Kasus ini berjalan cukup lambat walaupun Kajati DIY Asrief Adam SH menyatakan Iwik bisa dituntut bebas apabila bukti yang terungkap di persidangan memberi kesimpulan Iwik tak bersalah. Tanggal 29 Juli Iwik mulai disidangkan dengan acara pemeriksaan terdakwa dan pembacaan surat dakwaan. Dakwaan primair, Iwik didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Udin dengan motif perselingkuhan. Iwik diancam dengan hukuman mati. Iwik yang dalam hal ini merasa sebagai korban, berusaha untuk membela diri dengan membaca eksepsi pada tanggal 5 Agustus, didampingi oleh penasehat hukumnya. Dalam eksepsinya, Iwik mengungkapkan dirinya hanya korban rekayasa orang bernama Franki alias Serma Pol Edy Wuryanto (Kanitserse Polres Bantul) untuk kepentingan bisnis politik dan melindungi Bupati Bantul. Namun sayang Eksepsi terdakwa dan penasehat hukumnya ditolak Majelis Hakim, dan sidang

dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Walupun Iwik dalam hal ini berada dalam posisi terhimpit namun beberapa saksi kunci terus berusaha membantu Iwik untuk keluar dari permasalahan ini dengan memberikan kesaksian-kesaksian mereka. Seperti halnya yang dilakukan oleh Marsiyem yang pada tanggal 2 September menyatakan bahwa pelaku pembunuhan Udin bukan Dwi Sumaji alias Iwik. Selain itu Saksi Sunarti (istri Iwik) pada tanggal 22 September menerangkan bahwa Iwik pada malam kejadian pembunuhan Udin tidur bersama dirinya di rumah. Sepulang kerja, Iwik tidak pernah pergi kemana-mana. Alibi ini didukung tetangga Iwik (Heri Karyono dan Gunarso Wibowo) yang mengatakan bertemu Iwik di teras rumah Iwik, tidak berselang lama dengan terjadinya pengaiayaan Udin di Bantul.

Sidang yang dilakukan tanggal 2 Oktober mulaui memanas dengan adanya iteror dari pendukung saksi Diharjo Purboko. Saksi ini memberikan pernyataan palsu di bawah sumpah sebagai sarjana hukum, padahal fakta menunjukkan ia adalah jebolan sebuah perguruan tinggi. Ia juga mengaku sebagai bos yang menemui Iwik di Hotel Queen of the South tanggal 21 Oktober 1996. Iwik menolak pengakuan Diharjo Purboko. Bos yang ditemuinya bukan Diharjo Purboko tapi bernama Jendra alias Ahmad Nizar, pengusaha asal Bogor dan kawan akrab Kapolda DIY Kolonel Pol Mulyono Sulaiman. Tak berhenti disini, aksi teror semakin brutal dilakukan tanggal 6 Oktober oleh pendukung saksi Serma Pol Edy Wuryanto. Hakim memberikan peringatan dan mengusir keluar seorang pengunjung sidang pendukung saksi Edy Wuryanto. Iwik menolak kesaksian Serma Edy Wuryanto, dan ia mengatakan saksi ini berbohong. Iwik tanggal 20 Oktober membeberkan kesaksianya. Selain menyatakan korban rekayasa dan bisnis politik, ia hanya dipaksa menjalankan ske-nario rekayasa Franki alias Serma Pol Edy Wuryanto

dengan alasan untuk melindungi kepentingan Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo. Melewati persidangan yang cukup menegangkan akhirnya 3 November Iwik dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Amrin Naim SH, Yusrin Nichoriawan SH, Ahmad Yuwono SH, dan Hartoko Subiantoro SH. Pertimbangannya, dalam persidangan tidak diperoleh bukti dan keterangan yang menguatkan dakwaan jaksa bahwa Iwik adalah pembunuhan Udin. keterangan memberatkan dari Serma Pol Edy Wuryanto dalam persidangan dinyatakan tidak dapat dipakai sebagai alat bukti keterangan. Selanjutnya muncul tuntutan agar polisi mencari, mengungkap motif, dan menangkap pelaku pembunuhan Udin yang sebenarnya.

4. Embrio sistem kekerasan yang Tumbuh Subur

Berkaitan dengan kasus Udin, mungkin kata-kata berikut menarik untuk disimak :

Malam itu jantungku sotak terpacu oleh degupan kencang tak terkontrol dari dalam diriku, jiwa ini rasanya tak siap menerima kabar kematianmu. Tak ayal pikiranku sempat tak mempercayainya, sebab 3 hari lalu ragaku masih bertemu dan sempat mendiskusikan tentang beberapa kasus yang menyita perhatianmu¹²⁸ Ya..Udin telah tiada

Termangu dalam kesadaran penuhku bahwa ragaku inipun sangat menggiurkan untuk dihabisi kapan saja, sama sepertimu.

Mengikuti alur persidangan yang terjadi, percaya diri kukatakan dengan naluriku sebagai jurnalis, usaha penyelesaian kasusmu penuh dengan kejanggalan, teman. Din... penyelesaian kasusmu yang tak pernah tuntas.

*Selamat jalan kawan, damai untukmu Din...*¹²⁹

Jika dibahasakan, mungkin begitulah isi hati Budi Santoso¹³⁰, dan juga wartawan-wartawan lainnya sebagai pelaku utama jurnalisme menanggapi kasus Udin ini.

¹²⁸ Sebelum meninggal Udin tengah melakukan investigasi atas kasus korupsi yang melibatkan salah satu pejabat teras setempat, Bupati bantul Sri Roso Sudarmo.

¹²⁹ Dibahasakan dari kata pengantar yang ditulis oleh Budi Santoso. SH

¹³⁰ Salah satu sumber primer yang menuliskan kata pengantar dalam buku “Tragedi Udin : Bingkai Kebusukan Kekuasaan dan Kekerasan”

Terbunuhnya Fuad Muhammad Syafruddin, seorang wartawan senior Bernas, Agustus 1996 menjadi suatu tragedi yang seharusnya menggiring ruang pikir masyarakat untuk mempertanyakan kembali bagaimana sebenarnya kebebasan pers di negara ini, dan tentu termasuk di dalamnya para pelaku pers.

Bertolak dari kasus Udin, yang dianiaya dan akhirnya meninggal saat melakukan investigasi atas kasus korupsi yang melibatkan pejabat setempat, yaitu Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo, maka secara gamblang tugas dan tanggung jawab wartawan sebagai pelaku jurnalistik sama sekali tidak dihargai oleh pejabat yang ada. Sebab seperti halnya yang pernah dikatakan oleh tokoh pers Adinegoro,¹³¹ sejumlah sifat wartawan yang baik dan yang tentu menunjang kredibilitasnya sebagai insan pers yaitu :

- a. Minat yang mendalam terhadap masyarakat dan apa saja yang terjadi
- b. Sikap ramah terhadap segala jenis manusia, pandai membawa diri
- c. Dapat dipercaya dan menimbulkan kepercayaan orang yang dihadapinya
- d. Sanggup berbicara dan menulis dalam bahasa Indonesia/ Inggris/ Lokal
- e. Memiliki daya peneliti yang kuat, setia pada prinsip kebenaran
- f. Memiliki rasa tanggungjawab dan ketelitian
- g. Kerelaan mengerjakan lebih dari apa yang ditugaskan
- h. Bekerja cepat dan dalam deadline
- i. Bersikap obyektif dan terbuka
- j. suka membaca dan memperkaya bahasa komunikasinya.

Maka jelas dalam studi kasus tragedi Udin, hampir sebagian besar sifat yang coba dipraktekkan oleh Udin sebagai jurnalis dengan mudahnya disingkirkan oleh kekuasaan

¹³¹ Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 37-38

dengan cara kekerasan. Proses meneliti suatu kasus yang tengah dilakukan dengan berlandaskan kebenaran, begitu mudahnya sengaja dijegal di tengah jalan, bahkan dengan cara membinasakan manusia. Lalu mengapa dengan entengnya tindakan ini bisa dilakukan, bukankah ini suatu produk reproduksi dari cara-cara yang telah mengakar dari pejabat tingkat atas dalam menyelesaikan masalah dengan cara paksa “mencabut” sampai pada pangkal masalahnya? Menangkap dan memenjarakan tanpa peradilan (marak terjadi pada seputar tragedi 65), membunuh tanpa mempedulikan benar salah, peneroran, penyegelan tanpa surat resmi, pembatalan SIUPP dengan alasan yang tak jelas, pemberhentian suatu dialog di tengah berlangsungnya suatu siaran acara TV, pemanfaatan pers sebagai corong pemerintah tanpa mengutamakan kepentingan rakyat, dll. Jika ditarik benang merah, nampaknya segala usaha dan kebijakan yang dilakukan / dikeluarkan oleh penguasa OrBa dengan sukses mempengaruhi semua pejabat dalam stratifikasi pemerintahan, baik pusat maupun daerah dalam segala cara berkuasa dan kebijakannya. Kasus Udin merupakan salah satu bukti dari banyak kasus kekerasan lain yang pernah terjadi di Indonesia dimana terusiknya kepentingan penguasa cenderung ditanggapi dan diselesaikan dengan cara-cara kekerasan bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.¹³²

5. Reproduksi Kultural dan Kehidupan Pers

Adanya banyak definisi yang dimunculkan oleh banyak tokoh mengenai pengertian kultur, membuat tidak dapatnya “kultur” didefinisikan ke dalam satu

¹³² Y. Argo Twikromo dan Lukas S. Ispandiarno, *Tragedi Udin : Bingkai Kebusukan Kekuasaan dan Kekerasan*, Galang Press, Yogyakarta, 2001 hlm 173

pengertian saja.¹³³ Beberapa definisi yang muncul diantaranya oleh Martens (1999) yang menggambarkan kultur sebagai model pemaknaan, penilaian, dan tindakan sosial yang terkoordinir, sedangkan menurut Renger (2000), kultur terdiri dari sumber-sumber (*resources*) dan kode-kode (*codes*) yang menentukan pemaknaan, nilai-nilai dan norma-norma sosial, dan oleh Welsch (1994) kultur dilihat sebagai dasar kebiasaan-kebiasaan sosial. Yang pasti pada intinya teori kultur kontemporer mengatakan bahwa praktek-praktek sosial dimungkinkan dan dibatasi oleh model-model pemaknaan yang dimiliki secara kolektif, dan praktek merupakan salah satu dari elemen reproduksi kultural.¹³⁴ Reckwitz juga mengatakan bahwa praktek-praktek tersebut dapat bertahan lintas batas ruang dan waktu.

Lukas S Ispandiarno,dkk sebagai editor dalam buku *MEDIA-MILITER-POLITIK Crisis Communication: Perspektif Indonesia dan Internasional* menuliskan:

Menurut Giddens (1984). Tindakan dan perilaku rutin adalah bagian yang paling elementer dan paling mendasari kehidupan sosial. Tindakan dan Perilaku rutin tersebut berdasarkan struktur. Struktur sendiri terdiri dari aturan-aturan (*rules*) dan sumber-sumber (*resources*) yang berada di luar ruang dan waktu- tanpa kehadiran subyek (individu). Konsekuensi, kultur adalah proses yang refleksif. Dengan mengacu ke struktur, subyek justru mereproduksikan struktur tersebut dengan setiap tindakan rutin yang menjadi awal dari proses reproduksi kultural berikutnya.¹³⁵

Kembali ke kasus Udin, tampak bahwa aturan-aturan, cara-cara dan bentuk penguasaan Rezim ORBA disadari atau tidak telah berubah menjadi mata rantai yang susah untuk diputus begitu saja sebab telah melalui proses reproduksi dan melebur dalam “budaya / kultur” yang ada, tanpa batas ruang dan waktu sehingga keberadaannya

¹³³ Baca Lukas S Ispandiarno,dkk, *Media-Militer-Politik Crisis Communication: Perspektif Indonesia dan Internasional*, hlm 303-305

¹³⁴ Ibid.,304

¹³⁵ Lukas S Ispandiarno,dkk,ibid, hlm 305

menjadi dilegalkan. Kita lihat saja, hingga sampai masa-masa akhir kejayaannya, tahun 1996¹³⁶, dengan terbunuhnya Udin menunjukkan bahwa cara-cara penyelesaian masalah dengan kekerasan masih dirasa sah untuk dilakukan, sebagai bentuk dari hasil reproduksi kultur yang susah untuk dihilangkan karena telah menyatu juga dengan cara pikir dan mentalitas penguasa yang ada.

Berikut petikan wawancara D&R, tanggal 2 Oktober 1996 dengan Sri Roso Sudarmo pasca terbunuhnya Udin. Dalam wawancara singkat ini akan nampak cerminan warisan mentalitas dari penguasa ke penguasa sampai ke tingkat daerah yang tumbuh bersamaan dengan kultur praktek kekuasaan dengan kekerasan, dimana tindakan memangkas habis untuk mencegah gejolak yang mungkin timbul, terus saja dilegalkan.

Sejauh ini, apa yang Anda keluhkan dari perkembangan kasus Udin?

Yang saya keluhkan adalah masyarakat akan resah. Sebenarnya, kasus meninggalnya seseorang itu bisa saja karena berbagai kasus. Menurut saya, kasus itu tidak mengandung masalah yang luar biasa. Yang menulis keras tentang Bantul juga bukan cuma dia sendiri. Orang lain juga banyak. Tapi, karena orang punya pendapat bahwa kasus Udin ini begitu, digiring ke masalah itu. Opini (publik) kan dibentuk. Kalau orang punya opini begitu. terserah saja. Tapi, bagaimana kalau gara-gara kasus Udin ini kemudian terjadi pemberontakan,misalnya?

Apakah itu tidak berlebihan... pemberontakan?

Lho, bisa saja. Kenapa tidak bisa? Wong, kita sudah banyak pengalaman. Tapi, kalau masyarakat terus resah? Tapi, ini kan pendapat pribadi. Kami sebagai aparat kan ingin agar masyarakat tenteram, tenang, tidak terjadi apa-apa. 137

Hal ini ironis bahwa dengan mudahnya pejabat ini mengutarakan ketakutan akan terjadinya pemberontakan (suatu istilah yang cukup ekstrem pada masa ini), oleh

¹³⁶ Disusul terjadinya tindak kekerasan lain terhadap jurnalis pada tahun 1997, dengan terbunuhnya Mohamad Sayuti, setelah dianiaya sebelumnya (wartawan mingguan Pos makasar, Ujung Pandang) tanggal 12 juni 1997, kemudian di Jakarta tanggal 25 juli di tahun yang sama, Naimullah (reporter Harian *Sinar Pagi*) juga tewas terbunuh.

¹³⁷ <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/10/06/0046.html>

karena pemberitaan kasus tersebut. Solusi membungkam pers, olehnya dirasa lebih efektif daripada bekerjasama dengan pers dan masyarakat untuk mengungkap kasus tersebut.

6. News Framing

Dari seluruh pembahasan yang ada, satu hal yang tidak boleh ketinggalan untuk dikaji sebab tidak bisa dilepaskan pula dengan terbentuknya kultur, adalah adanya cara-cara pembingkaian berita (*News Framing*).¹³⁸ Ashadi Siregar mengatakan sifat dari frame itu ada 2 yaitu framing yang dilakukan oleh *newsroom* management itu sendiri (*internal*), dan oleh penguasa (*eksternal*) yang dalam hubungannya dengan pers dan kepentingan yang ada.¹³⁹ Namun dalam hal ini sangat nampak adanya hubungan korelasi diantaranya, dimana *framing* yang dilakukan oleh redaksipun atas dasar dorongan faktor eksternal yang ada. Walaupun pada realita *news framing* yang dilakukan oleh penguasa disesuaikan pada kompleksitas kepentingan yang ada semasa rezim itu, namun yang pasti hal ini dilakukan atas dasar 1 kepentingan utama yaitu mempertahankan kekuasaan, dan berpusat pada sang penguasa itu sendiri, sehingga pejabat di bawahnya sekali lagi hanya seolah robot yang terkadang tersudut dalam kepentingan pribadinya sendiri juga.

Bentuk-bentuk *News Framing* sebenarnya telah nampak sejak awal lahirnya Orde Baru, dengan berangkat dari Tragedi 1965, Soeharto sebagai orang paling berpengaruh saat itu segera menggembarkan segala hal mengenai kekejaman PKI, bahwa PKI adalah musuh bersama yang harus segera dimusnahkan. Salah satu usahanya dengan cara memanfaatkan pers sebagai media propaganda yang cukup berpengaruh dalam membentuk opini masyarakat mengenai seseorang, suatu hal atau peristiwa. Munculnya

¹³⁸ Media-Militer-Politik, loc.cit, hlm 272

¹³⁹ Wawancara langsung dengan Ashadi Siregar di kantor LP3Y, jumat 17 november 2006, jam 14.30 WIB.

penyebutan tragedi berdarah yang terjadi pada dini hari awal bulan oktober dengan gestok dapat dimaknai pula sebagai upaya awal *news framing* dengan tujuan untuk memusatkan perhatian rakyat pada kejadian pembunuhan 7 jendral yang saat itu diberitakan telah dibunuh oleh PKI tersebut, bukan pada tragedi yang lebih besar yang terjadi setelahnya, yaitu pembunuhan massal setengah juta jiwa yang diduga PKI. Setelah meredanya aksi pemberantasan PKI di berbagai daerah dan tentu menandai suksesnya salah satu jargon terkenal “ganyang PKI”, *news framing* kembali dilakukan di masa-masa setelahnya dengan mempopulerkan slogan-slogan lain yang senada, seperti “waspada bahaya laten komunis”, sehingga tanpa disadari rakyatpun terprovokasi dan selalu hidup dalam kecurigaan 1 sama lain, dalam lingkup suatu negara yang selalu bersenjatakan kata-kata “demi menjaga stabilitas nasional” ini, bahkan kemudian yang ironis adalah terjadinya aksi pemata-mata an oleh keluarga, teman, dan tetangga sendiri, bahkan pembunuhan yang sempat terjadi diantaranya.¹⁴⁰

News framing tidak hanya dilakukan dari dalam, tapi juga dari luar. Seiring dengan diberangusnya banyak media cetak maupun elektronik di negeri ini pasca Tragedi 1965, Malari dan kemudian berlanjut ke masa berikutnya dalam rezim Orde Baru, rasanya akan sangat beruntung bagi mereka yang saat itu dapat memiliki kesempatan mencari alternatif media lain sebagai sumber berita. Alhasil sebagian masyarakat terutama yang “berkecukupan” (tolok ukur : punya radio) mencari alternatif sumber informasi dari luar melalui media elektronik yang ada tersebut, seperti dari BBC, Radio Australia, dll. Namun sayang, rupanya penguasa telah satu langkah lebih maju memikirkan mengenai hal ini sebelumnya. Masih dalam kerangka *News framing*, bahkan

¹⁴⁰ Pengakuan seorang algojo yang membunuh tetangganya sendiri karena dianggap PKI ketika terjadi sebuah peristiwa pembantaian di Klaten Jawa Tengah. Dalam acara “Kick Andy” Metro TV, Agustus 2006.

siaran-siaran luar itu pun tanpa banyak yang menyadari telah mengalami proses perekayasaan, sehingga isi beritanya pun tetap sesuai order. Di belakang semua itu, tetap penting untuk segera disadari pula bahwa situasi politik dunia internasional juga cukup berpengaruh. Negara-negara Barat yang dalam konteks PD II digawangi oleh AS, berdasar Doktrin Trumannya merasa perlu untuk mendukung segala bentuk penumpasan komunisme. Oleh karenanya bukan hal yang mustahil jika akhirnya ada kepentingan Barat dalam hal ini. Salah satu bukti nyata adalah pengakuan salah seorang wartawan Eropa, Norman Rudeway yang secara khusus ditugaskan untuk melakukan rekayasa berita-berita seputar kejadian di Indonesia saat itu.¹⁴¹ Dalam film dokumenter yang diproduseri oleh Silvie Le Clezio dan Chris Hilton berjudul “*Shadow Play*”, Frank Palmos seorang koresponden *Herald Sun* tahun 1962-1972 juga mengakui akan adanya propaganda barat di Indonesia melalui media massa tersebut. Dirinya juga mengaku sering mengirim berita rekayasa ke BBC dan NBC. Hal itu juga dibenarkan oleh Rolland Challis koresponden BBC ASIA tahun 1964-1969 dan Don North seorang Jurnalis yang ditugaskan di Indonesia tahun 1965-1966.

News Framing terus dilakukan sepanjang rezim ini, sehingga tak mengherankan jika terjadi pula pada kasus Udin, dimana pasca terbunuhnya Udin, muncul wacana-wacana baru tentang seorang Udin yang merupakan wartawan hidung belang, suka main perempuan, dll, dan oleh karenanya terbentuklah opini masyarakat bahwa dirinya merupakan musuh bersama yang memang harus disingkirkan. Semua itu tak lain adalah suatu pola serupa yang pernah dialami oleh Bung Karno dengan pemberitaan yang membawa beliau lekat dengan image komunisme, hidung belang, suka berfoya-foya dan tak sanggup membawa kesejahteraan bagi rakyat, sehingga terpaksa diamini rakyat jika

¹⁴¹ Lihat film dokumenter *Shadow Play*, A Hilton Cordell / Vegabond Films Production.

harus segera turun dari jabatannya. Begitu pula dengan PKI yang dikabarkan telah dengan kejam membunuh 7 Jendral, memotong alat kelamin mereka¹⁴², dengan keji menganiaya dan berpesta pora di atas sebuah sumur tua, lubang pembantaian itu, sangat kejam, sehingga merupakan musuh bersama yang sah untuk segera dihabisi sampai ke akar-akarnya.

Meninjau ini semua maka dapat disimpulkan bahwa tumbuhnya keseragaman mentalitas dan ideologi juga *mind set* rakyat Indonesia pada masa Orde Baru tak lepas dari kultur yang diciptakan oleh penguasa saat itu berkaitan dengan kepentingan individu yang ada. Kaitannya dengan pers, tidak dapat dipungkiri bahwa telah tercipta suatu bentuk-bentuk kekuasaan dengan kekerasan yang menimpa pers diluar preferensi penguasa.¹⁴³ Pernyataan Masduki, seorang praktisi pers dan akademisi ini mengenai politik pengkambing hitaman sebagai bagian dari politik frame telah memperjelas bahwa cara-cara seperti ini memang telah menjadi identitas gaya-gaya pejabat Orde Baru.¹⁴⁴ Kuatnya pengaruh oleh karena iklim yang telah sangat lama melingkupi, membuat warisan cara berpikir, budaya, dan praktek-praktek kehidupan dari masa OrBa ini sangat sulit untuk diubah bahkan dalam jangka waktu jauh setelahnya, setelah kekuasaan Orde Baru berhasil dirobohkan.

Kembali ke sifat dasar militerisme yang menganggap bahwa yang menentang adalah pemberontak dan harus dilenyapkan, maka dalam kasus ini, tentu bagi pemerintah

¹⁴² Prof Arif Budiarto Ahli forensik dan patologi tahun 1965 dalam film “Shadow Play” menyangkal pemberitaan banyak surat kabar mengenai pemotongan kelamin (*torturing*) para jendral, sebab dirinya sama sekali tidak menemukan bukti-bukti terjadinya tindakan tersebut.

¹⁴³ Ashadi Siregar

¹⁴⁴ Wawancara langsung dengan Masduki di Radio Unisi, Kamis 16 november 2006, jam 20.00 wib

di masa Orde baru Udin masuk dalam kategori wartawan menentang yang memang harus segera disingkirkan. Strategi lama yang tetap dijalankan sebagai strategi pemenangan yaitu dengan pengkambing hitaman, yang dalam kasus ini Udin berada dalam posisi yang dinegasikan juga dengan pembingkaian berita dimana Udin, divonis sebagai wartawan “brengsek” yang kematianyapun akhirnya akan dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar.

“The essence of framing is sizing-magnifying or shrinking elements of the depicted reality to make more or less salient” - Robert M. Entman -¹⁴⁵

¹⁴⁵ Agus Sudibyo, *Citra Bung Karno : Analisis Berita per Orde Baru*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1999
hlm24

BAB V

KESIMPULAN

Pemerintah Orde Baru yang dibangun atas dasar kekuatan militer, telah menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang identik dengan rangkaian kekerasan dalam perjalanan sejarahnya. Penyelesaian masalah dengan kekuatan fisik atas dasar dalih menjaga kestabilan nasional ini secara tak langsung telah menanamkan ideologi kekerasan dalam masyarakat Indonesia secara umum. Nilai-nilai militerisme yang telah tertanam dalam diri pejabat-pejabat pemerintah pusat hingga daerah otomatis mempengaruhi pola pikir, yang terealisasi dalam setiap kebijakan-kebijakan yang ada. Dengan bergulirnya waktu, nilai-nilai militerisme ini berubah menjadi sebuah kultur yang tumbuh subur dalam masyarakat Orde Baru, keberadaannya pun mau tak mau diwajarkan dalam segala bentuk yang tercipta.

Konflik yang selalu ada dalam masyarakat Orde Baru dapat dimaknai sebagai sebuah wujud suksesnya Orde Baru menanamkan keberagaman yang ada dalam militerisme ke ranah sipil. Kurang adanya ruang bagi kebebasan, dan tidak menghendaki adanya perbedaan merupakan perwujudan dari hal ini. Kondisi masyarakat Indonesia yang plural tentu pada dasarnya sangat tidak sesuai dengan penerapan pola-pola militerisme semacam ini. Adanya pemaksaan dan intervensi mendorong timbulnya bentrokan sosial dan konflik berbau SARA. Pada akhirnya, situasi ini juga membuktikan adanya kecenderungan pemerintahan Orde Baru yang lebih mengarah ke bentuk pemerintahan militerisme fasis. Konflik tersebut terus ada karena bagi sebuah pemerintahan fasis yang mengandalkan kekuatan militer inilah salah satu jalan untuk melakukan intervensi demi melegitimasi kekuasaannya. Karena militer adalah kendaraan

pemerintah untuk tetap eksis, maka merajanya militer dalam segala bidang merupakan prestasi bagus untuk mempertahankan kekuasaan yang ada.

Pada bagian-bagian sebelumnya telah diberikan beberapa contoh dominasi militer dalam masyarakat dengan menjabarkan beberapa bukti intervensi militer sebagai basis kekuatan pemerintah Orde Baru dalam berbagai bidang kehidupan, seperti birokrasi pemerintah, ekonomi, sosial, politik termasuk juga dalam kehidupan pers.. Pers disadari sebagai lembaga yang penting untuk tetap dikontrol mengingat pengaruhnya yang begitu kuat bagi masyarakat. Tak heran jika mulai dari awal hingga masa-masa pemerintahannya Orde Baru selalu memanfaatkan pers sebagai alat propaganda untuk melegitimasi massa dengan cara menyetir kinerja pers baik di pusat maupun daerah. Birokrasi pemerintah yang dijejali penuh dengan personil militer membuat mudahnya pemerintah mengontrol pers sampai ke daerah, sebab sistem komando yang ada dalam tubuh militer memungkinkan terciptanya sebuah pemerintahan sentralistik birokratis.

Di era Orde Baru, situasi politik dan ekonomi merupakan faktor-faktor utama yang paling mempengaruhi segala kebijakan pemerintah saat itu. Dari apa yang sudah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya, terbukti bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah saat itu memang dirasa sangat memberatkan bagi kinerja pers dan pekerjanya. Seperti apa yang telah dijabarkan dalam bab I, sejak awal berdirinya pemerintahan inipun politik pembingkaian atau politik *frame* itu telah dilakukan dengan tujuan mengontrol dan menekan pers agar tidak mempublikasikan berita yang di luar preferensi pemerintah.¹⁴⁶ Memang bagi masyarakat secara umum hal ini cukup dapat dimaklumi jika kebijakan dan aturan yang berlaku tetap menghargai adanya hak-hak asasi manusia di dalamnya, namun

¹⁴⁶ Tersusun pada masa *Bulan Madu* dengan memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi pemberitaan yang menyangkut kebobrokan dan kegagalan Orde lama.

akan sangat disayangkan jika kemudian pers sebagai salah satu pilar demokrasi justru menjadi begitu lemah oleh karena terlalu ditundukkan oleh aturan-aturan yang sangat membelenggu dan yang mengakibatkan pers kehilangan kredibilitas serta tanggung jawab sosialnya. Kontrol sosial dari pers menjadi sulit dilakukan oleh karena begitu mudahnya diblokkan dengan kata-kata “mengganggu”, “mengancam”, dan lain sebagainya.

News framing yang telah cukup lama dilakukan juga telah banyak menciptakan gambaran “logis” atas banyak peristiwa sehingga rakyat terbiasa untuk mewajarkan semua kebijakan pemerintah. Tanpa banyak disadari permainan ideologi semu telah terjadi di sini. Bertolak dari hal ini tak mengherankan jika kemudian, kasus-kasus kekerasan yang melibatkan penguasa seperti kasus Udin (Marsinah, dll) tak pernah tuntas karena memang tidak mendapat cukup porsi perhatian dari rakyat, maka dengan ini jangan pernah pula banyak berharap akan muncul usaha untuk secara serius menyelesaiakannya. Telah menjadi kebiasaan yang tumbuh subur dari Era Orde Baru juga, dimana penguasa selalu lebih dulu menyadari bahwa usaha-usaha ke arah penampilan realitas berlandaskan kebenaran terutama yang dilakukan pers, akan sangat “mengganggu”, jadi harus segera dibungkam atau disingkirkan. Ironisnya rakyatpun menjadi susah untuk melihat kebenaran dan akan menjadi mudah untuk dijaring menjadi bagian dari aksi penyingkiran tersebut karena tidak punya pilihan selain menyerap derasnya arus pemaksaan ideologi oleh penguasa dan yang otomatis menjadi kekuatan maha dahsyat untuk melegitimasi kekuasaan. Sejumlah aturan (*rule*), konvensi, keterikatan sistematik, norma dan generalisaasi yang bersifat *taken for granted*, serta

kekuatan-kekuatan simbolik yang turut menentukan formasi textual presentasi berita telah mengingkari media sebagai entitas yang “bebas nilai”.¹⁴⁷

Mekanisme lama yang pernah begitu membelenggu pers yaitu pencabutan SIUPP yang pernah dengan sangat wajarnya diberlakukan untuk mengesahkan kehidupan pers yang dianggap melanggar kaidah berita, telah sangat bertentangan dengan hakekat kebebasan pers yang bertanggung jawab, atau setidaknya dapat dijabarkan dengan kata lain, kondisi pers saat itu yaitu bebas bersuara sejauh tidak melanggar kemauan pemerintah dan wajib bertanggung jawab terhadap penguasa, bukan bertanggung jawab sebagai jurnalis, yang pada hakekatnya merupakan bagian dari masyarakat. Banyaknya aksi kekerasan yang lebih tepat sebagai aksi premanisme, telah melemahkan kinerja pihak-pihak yang menginginkan penuntasan setiap kasus kekerasan yang terjadi, entah aparat maupun wartawan sebagai pelaku pers, tentu bertolak dari realita bahwa hukum dan peradilan di Indonesiapun terbatas.

Banyaknya terjadi aksi intelegen membuat Orde Baru megarah kepada sebuah pemerintahan fasis. Kuatnya miliarerisme fasis di era Orde Baru, membawa ekses buruk bagi berbagai bidang kehidupan di era-era berikutnya, dan berimplikasi pada banyak bidang kehidupan yang lebih luas. Pembredelan sepihak yang banyak terjadi pada masa Orde Baru, jelas tidak menghormati prosedur Hukum Internasional yang ada.¹⁴⁸ Tidak adanya pembelaan dan hak membela diri, serta tanpa banding maupun kasasi merupakan bentuk pengingkaran terhadap Hak-hak asasi manusia. Tidak heran jika pada masa-masa selanjutnya kehidupan hukum dan peradilan di Indonesia berada pada tingkat yang memprihatinkan. Pemogokan buruh banyak terjadi, terlantarnya TKI, pembunuhan

¹⁴⁷ *Citra Bung Karno : Analisis Berita per Orde Baru.*, op.cit, hlm 38

¹⁴⁸ Salah satu bentuk dari fasisme yaitu melawan hukum-hukum dan peraturan Internasional / kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

sekaligus koruptor kelas kakap yang segera menghirup udara kebebasan dengan waktu pemenjaraan yang cukup singkat, pengusutan kasus Munir (pembela HAM) yang tak pernah menemui titik temu, tak beda jauh dengan pengusutan kasus Udin yang tak pernah tuntas, bahkan mungkin hampir terlupakan, karena dalam hal ini kembali lagi kita akan berbicara mengenai kultur. Wajarnya model birokrasi yang semaunya sendiri, dan terlanjur terbiasa menggunakan *frame-frame* untuk kepentingannya, sehingga *framing* tersebut berakibat pada terbiasanya pemerintah menggunakan jargon-jargon yang tanpa disertai implementasi yang jelas. Bukankah sejak masa Orde Baru negara ini telah mengklaim diri sebagai negara hukum? namun jika melihat praktek-praktek yang ada dimana birokrasi memiliki *double function* sebagai hakim yang berhak mencabut SIUPP sekaligus membredel pers secara sepihak, tanpa peran hakim, hukum ataupun pengadilan, maka bukan mustahil ketidak jelasan hukum seperti yang telah disebut tadi akan terus banyak terjadi. Sudah saatnya kembali dipertanyakan kapankah kultur tersebut akan mengalami perubahan, ataukah dari waktu ke waktu penguasa dan birokrasi yang ada selalu harus nyaman dibuai oleh angin sepoi dari iklim yang sarat kepentingan politik dan terlanjur menjadi kebiasaan tersebut. Hal ini penting supaya praktek-praktek kekuasaan dengan kekerasan di negara ini tidak terus mengakar serta kehidupan hukum dan peradilan akan berjalan dengan menghargai hak-hak asasi manusia. Nampaknya dengan berdasar pada contoh kasus yang ada perlu segera disadari pula bahwa fenomena dalam masyarakat yang suka menghakimi tersangka yang dianggap salah, merupakan ekses negatif budaya militerisme.

Berangkat dari teori politik yang digunakan sebagai landasan penulisan karya tulis ini, maka adanya kesadaran dari penguasa untuk mengenalkan sedini mungkin

pendidikan politik yang sebenarnya bagi rakyatnya adalah pilihan bijak untuk mewujudkan suatu negara demokrasi yang sesungguhnya. Dengan cara-cara pendidikan politik yang sederhana, setidaknya warga negara akan lebih tahu mengenai posisi yang mengandung nilai dalam kehidupan berdemokrasi, diantaranya yaitu posisi individu dalam bernegara, posisi konstitusi dalam kehidupan bernegara, dan posisi negara dalam menjalin relasi dengan warganya.¹⁴⁹ Dengan demikian hak-hak warga negara sebagai individu akan senantiasa terjaga dalam hubungan bernegara yang harmonis dan seimbang, sebab Hak Asasi Manusia merupakan bagian penting dalam pembentukan demokrasi, oleh karenanya penghargaan terhadap hak-hak tersebut adalah syarat utama terwujudnya demokrasi dalam suatu bangsa. Dengan belajar dari sekelumit sejarah bangsa ini, maka ke depan perlu usaha nyata untuk mengeksiskan kembali kultur masyarakat sipil yang lebih mengutamakan dialog dan menghargai setiap perbedaan yang ada, cara ini rupanya lebih cocok untuk diterapkan di negara plural seperti Indonesia. Namun juga perlu untuk tetap mempertahankan dan mengembangkan media sosialisasi warisan militerisme yang selama ini cukup efektif bagi kepentingan hidup bermasyarakat. Pers adalah wahana yang menjembatani hubungan warga negara dan pemerintah tersebut, dalam upaya mewujudkan kehidupan bersama yang harmonis. Oleh karena itu pemasungan pers apalagi dengan praktek-praktek kekerasan oleh penguasa hanya akan semakin menjauhkan terciptanya masyarakat yang kondusif ataupun negara yang bermartabat di mata dunia. Sebab ideologi, nilai, etika, dan perilaku masyarakat sangat berpengaruh bagi sukses tidaknya sebuah demokratisasi.

¹⁴⁹ Khoirun, M Nur., Pendidikan politik Bagi Warga Negara (Tawaran Operasional dan Kerangka Kerja), Yogyakarta: LKiS. hlm 45

Lampiran

Data Tim Pencari Fakta Persatuan Wartawan Indonesia terhadap kasus Udin.

1. Sejak awal Serma (sekarang Aiptu) Edy Wuryanto bersama oknum pamong desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, Sri Kuncoro alias Kuncung, telah berupaya membujuk Tri Sumaryani, gadis warga Dusun Gelangan Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul agar mau menjadi WIL Udin. Tri Sumaryani adalah kawan ngebrik Win. Skenario dibatalkan karena Tri Sumaryani akan menikah. Cewek ini lebih dulu didatangi Sri "Kuncung" Kuncoro dibujuki dengan "iming-iming" akan dikasih sejumlah hadiah. Kunung yang keponakan Bupati Sri Roso Sudarmo diketahui dua kali tnendatangi rumah Tri Sumaryani.
2. Suwarto (45), warga Jl Paris atau sekitar 1 Km dari rumah Udin, pekerjaan bengkel motor, dalam persidangan Iwik diperiksa sebagai saksi ke 21. Dalam kesaksianya dia mengatakan diminta oleh polisi untuk menyelingkuhi Ny Sunarti. Tapi Suwarto tidak mau.
3. Supri, tukang parkir di depan PN Bantul, diminta polisi mengaku pada hari Senin (12/8/1996) melihat Udin boncengan dengan cewek. Didampingi pengacaranya, Nurcholis SH, waktu itu Supri sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Bantul. Setelah dikonfirmasi wartawan dan disadarkan ancaman hukuman kalau dia membuat keterangan palsu, akhirnya Supri mencahut keterangannya Sebab, kata Supri, dia disuruh ngaku oleh polisi).

4. Nyonya Windarmiyati (40), saksi ke 29, mengaku pada 12/8/96 sehabis menyaksikan/ikut sidang perdata di PN Bantul melihat Udin boncengan dengan cewek di depan PN Bantul. Kemudian saksi diajak Kopral Pol Slamet Wijayanto ke rumah Sunarti di Dusun Panasan untuk mengecek kecocokan Sunarti dengan orang yang diboncengkan. Bahwa dalam pengamatan Windarmiyati. Sunarti tidak mirip dari rambut maupun wajah. Cuma tinggi badan yang agak mirip. TPF melalui PWI Yogyakarta melalui surat nomor: 311/PWI-YK XI/2000 tanggal 14/11/2000 menanyakan tentang ada tidaknya sidang perdata tersebut. Oleh PN Bantul melalui surat nomor: W22.De.HT.04.10-1958 tanggal 25/11/2000 dijawab hari itu (Senin, 12/8/1996) tidak ada sidang perdata.
5. Nyonya Kadarweni binti Kapiarso (ketika dimintai keterangan di Polda DiY pada 12/9/2000 berumur 42), pekerjaan guru SMA Setya Dharma, Kecamatan Pandak Bantul dan PNS di SMEA Wonosari, Gunungkidul, 1997-1999 anggota DPRD Bantul dari Golkar. Kepada penyidik; Istri Heru Sudibyo ini menyatakan suatu hari pada bulan Agustus 1996 diberitahu oleh kakak perempuannya (Nyonya Windarmiyati) melihat istri Udin (Nyonya Marsiyem) di TV lain dari ketika dia melihat Udin boncengan dengan cewek di depan PN Bantul. Nyonya Kadarweni juga membenarkan dirinya pernah diajak Ny Windanniyati dan bersama beberapa anggota Polres Bantul (al Edy Wuryanto, Slamet Wijayanto dan Slamet) untuk mengamati sosok Ny Sunarti. Dan pengamatan itu Ny Kadarweni mengatakan/menyimpulkan bahwa Ny Sunarti

bukan orang yang diboncengkan Udin. Ny Kadarweni tidak diajukan sebagai saksi dalam sidang.

6. Nyonya Sunarti (41/istri Iwik), saksi ke 19, teman satu sekolah dengan Udin di MAN Sabdodadi Bantul karena Sunarti tinggal di tempat saudaranya di wilayah Kecamatan Jetis Bantul. Waktu itu karena Udin Ketua Osis dan Sunarti Bendahara, mereka sering dipacok-pacokke. Dalam rangka merekayasa Udin menyelingkuhi Nyonya Sunarti, Edy Wuryanto mengambil pas foto pernikahan Sunarti di kantor KUA Jetis dan kemudian kepada wartawan diakui diperolehnya dari dompet Udin. Pada tanggal 12/8/ 1996 siang Nyonya Sunarti berada di rumah Joyowijo, Dusun Morangan VIII Desa Triharjo Sleman untuk merias pengantin.
7. Sumadiyono (36), saksi ke 37 sebagai saksi meringankan keenam. Wartawan Yogyakarta Post, rekan Udin yang sama-sama bertugas di Bantul. Dialah orang yang berboncengan dengan Udin pada hari senin (12/8/1996) sekitar jam 11.00 - 12.00.
8. Surat Dandenpom IV/2 Yogyakarta (Letkol CPM Poernomo) nomor: K/244/VIII/2001 (*Sifat Konfidensial*) tanggal 14 Agustus 2001 angka 2 huruf f yang menyebutkan: Pada tanggal 21 10/1996, Koptu Slamet Wijayantu di Hotel Queen menyatakan penyesalannya karena belum temu sdr. Dwi Sumaji alias Iwik sebagai tersangka pelaku pembunuhan Udin. Tetapi karena kemauan Serma Edy Wuryanto, maka sebagai bawahan ia menurut saja apa yang diskenariokan oleh Serma Edy Wuryanto.

9. Surat yang sama angka 2 huruf g menyebutkan, pada tanggal 21/10/1996, Serma M .larodin, satu tim dengan Serma Fdy Wuryanto, menyarankan agar sdr nwi Sumaji alias Iwik dipulangkan dulu karena ini baru pengakuan yang belum didukung oleh bukti yang lain. Tetapi oleh Serma Edy Wuryanto tetap dilanjutkan penangkapannya dan untuk dilaporkan ke Kapolres Bantul.
10. Edy W mengambil foto Nyonya Sunarti waktu menikah dengan Iwik di KUA kecamatan Bantul. Pasfoto ini diakui Edy W diperoleh dari dompet Udin waktu kejadian. Padahal setelah kejadian dompet Udin berada di tangan keluarga Udin sementara Edy W sedang berada di daerah Prambanan, Sleman (angka 14) . Pertanyaannya, mengapa Edy demikian nekat/keras hati menjadi Nyonya Sunarti sebagai WIL Udin. Padahal Nyonya Windarmiyati sudah mengatakan bukan.
11. Ketika diperiksa sebagai saksi ke 30 (tambahan ke lima Edy Wuryanto yang dalam menangani Iwik mengaku bernama Frangky, dalam keterangannya menganggap cukup pengakuan Iwik sebagai bukti awal untuk mengantarkan Iwik dibawa sebagai tersangka kepada penyidik. Keterangan Edy Frangky Wuryanto dibenarkan penyidik Hadi Prayitno yang didengar keterangannya sebagai ke 31 (tambahan keenam).
- 12 Dari pemeriksaan kesehatan oleh seksi Dokkes Polda Jateng terhadap Iwik pada 22/10/1996 direkomendasikan bahwa Iwik dapat ditahan. Tapi dari pemeriksaan psikologi oleh Dinas Psikologi, di antaranya diketahui emosi Iwik kurang stabil dan tidak bisa bersikap tegas.
13. Hasil Jajak Pendapat yang dilakukan secara sederhana dengan 200 responden dan dimuat koran Bernas (Minggu, 26 Oktober 1996) diketahui tidak ada satu pun (0

%) yang percaya Iwik sebagai pembunuh Udin. Begitu pula tidak ada satupun yang percaya Udin tewas karena perselingkuhan. Sebaliknya. 88.5 % (177 orang) responden) percaya Udin dianiaya (tewas) karena berita. Akibat pemuatan hasil Jajak Pendapat ini, Kapolres Bantul mengirim surat yang entah kenapa diklasifikasikan Rahasia kepada PWI Yogyakarta. Surat dengan nomor: R/215/X/1997/IPP tanggal 27/10/1997 itu ditembuskan ke Pangdam IV, Kapolda dstnya sampai ke Bernas.... (Yang tidak ke kuburannya Udin)

Catatan: Putusan persidangan kasus Dwi Sumaji alias Iwik no: 1G./Pid/R/1997/PN Btl tanggal 27 November 1997.

14. Ketika peristiwa penganiayaan Udin terjadi sekitar jam 22.30, Kuncung herada di antara kelompok pemuda desa setempat. Kedatangan mereka ke TKP yang hanya beberapa saat setelah kejadian rncnimhulkan tanda tanya besar. Baik dalam hal waktu kedatangan mereka maupun waktu mereka membelokkan mobil setelah datang dari arah Utara. Kuncung yang mengendarai sepedamotor Honda GL Max mengaku tidak berpapasan dengan orang. Sedangkan menurut Yanari yang duduk di tengah mobil jip Hardtop mengaku sekitar 200 meter di Utara TKP melihat sepasang suami-istri, Bambang dan Watik, warga Dusun Ngangkruk Desa Patalan Kecamatan Jetis Bantul. Dekat situ Yanari melihat ada penjual jagung bakar dan melihat ada sebuah sepeda motor.
15. Kuncung dkk. bersama Nyonya Marsiyem kemudian membawa Lidin ke RS Tebugan Bantul. Sementara menunggu penanganan P3K, Marsiyem sempat mendengar ada yang mengatakan: "**Mas Udin sih, nek nggawe berita kekendelen (Mas Udin sih, kalau membuat berita terlalu berani)**" Tapi

Marsiyem tidak begitu ingat pasti siapa yang mengucapkan kalimat dalam bahasa Jawa itu.

16. Karena terbatasnya peralatan, Udin dihawa ke RS Bethesda, Yogyakarta dengan ambulan. Tapi Kuncung sebagai Kabag Kesra Desa malahan tidak ikut mengantarkan salah seorang warganya yang sekarat.
17. Sementara Win dibawa ke RS Bcthesda, Kuncung dkk. pergi ke warung hakmi mbok Ikul. Di sini terekam ada yang mengatakan: "Gawat, sinb dituthuk kok nggon sirah. iso mati". Terhadap Kuncung sudah dilakukan proses pemeriksaan dengan alat uji kebohongan (lie detector). Hasilnya?"?
18. Ketika penganiayaan, Edy Wuryanto diketahui sedang berada daerah Prambanan, Sleman. Setelah menerima pemberitahuan lewat radio panggil, Edy W langsung meluncur ke RS Bethesda. Selanjutnya ke kantor Bernas di Jl Jenderal Sudirman, Yogyakarta. Sebagai Kanit Serse Umum Polres Bantul dia tidak memerintahkan, paling tidak mengecek, apakah sudah dilakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Kalau benar Edy W sebagai salah seorang handalan di jajaran Polres Bantul seperti selama ini dikenal, Polwil/Polda DIY maupun mabes Polri, seharusnya dia lakukan olah TKP lebih dulu. Kepada TPF (13110/1998), menurut Edy W urusan olah TKP adalah tugas Pamapta. Padahal, dengan olah TKP paling tidak akan bisa menemukan sidik jari tersangka pelaku, jejak ban sepeda motor di sekitar rumah Udin yang bisa segera dimanfaatkan untuk perhandangan dengan sidik jari Iwik dan jejak ban Vespa tuanya, no pol AB 6739 KF.

19. Edy W juga tidak melakukan penyelidikan terhadap mohil jip Hard Top no pol AB 8581 EB untuk diidentifikasi. Bekas darah di mobil ini sudah dibersihkan oleh pemiliknya.

20. Gunawan, kakak Bupati Sri Roso Sudanno, ketika ditemui TPF di rumahnya pada 14/9/1996, secara gamblang dan berani mengatakan bahwa Udin maupun Marsiyem sama-sama tukang selingkuh. "Wong Bapaknya saja begitu," ujar Gunawan. Katanya, ketika ditemui di rumahnya, Udin punya WIL dengan orang tak jauh dari rumahnya. Marsiyem dikatakan mempunyai PIL seorang PNS. Mbah Wagiman tukang kawin cerai. Bahkan, ketika ditemui sekitar lima minggu sebelum Iwik ditangkap, dengan berdalih di balik kata "katanya", ada orang yang melihat Udin berboncengan dengan seorang cewek di depan pengadilan sehari sebelum kejadian (penganiayaan). Ketika diminta menyebutkan siapa orang yang melihat (untuk dikonfirmasi agar tidak melahirkan fitnah). Gunawan menyebut nama Windarmiyati, Iwik ditangkap pada 21 Oktober 1996. Hal yang sama dikatakan Gunawan kepada wartawan Thoyib Jumadi alm. yang menemuinya pada 9/9/1996¹. Demikian juga dia mengatakan Bupati Bantul sudah sangat sakit hati atas pemberitaan Bernas. Ibaratnya olah pemberitaan Bernas sudah seperti "dinyunukke bathuke". Maka berlakulah peribahasa lawa "sedhumuk bathuk sak nyari bumi".

21. (Dari sini mari kita kembali ke peristiwa beberapa saat setelah kejadian).

Dalam hati ini cermati detail hal-hal sebagai berikut:

¹ lihat majalah Jayabaya., 13/10/1996, tulisan seri ketiga.

- a. Sementara Udin masih dalam dekapan istrinya di teras rumah, rombongan mobil/motor Kuncung cs sudah pas berada clan slap menepi (memberi sein dari arah Utara) ke depan rumah TKP. Mobil/motor rombongan sempat menghalangi Nyonya Nur Sulaiman dan anaknya, Ayik Fatonah, yang akan menyeberang. Pada awalnya Ny Nur Sulaiman meminta Kuncung mengejar ke Utara, tapi dengan naik motor dia malah ke Selatan.
- b. Pada saat kejadian kami mendapat informasi tentang keberadaan Serka Mardi Utomo alias Mamok di sekitar lokasi kejadian (ada orang yang melihatnya di kegelapan) di sebelah utara TKP di belakang salah satu rumah. Padahal diketahui malam itu dia yang anak keponakan Bupati Sri Roso Sudarmo, seharusnya piket malam di Polres Bantul. Orang ini sempat dicurigai Kapolres Bantul, Letkol (AKBP) Ade Subardan yang pada Jumpa Pers tanggal 23/8/1996 di komplek Pemda Bantul, menegaskan akan menangkap tersangka tidak dalam hitungan minggu atau bulan. "Dalam dua-tiga hari agar Bupati bisa tidur nyenyak," ujar Ade Subardan.
- c. Ketika TPF menemui Gunawan, Mamok meminta untuk bertemu dengan mas Putut Wiryawan guna berbincang-bincang soal kasus Udin. Demi pertimbangan keamanan, Putut didampingi Asril bertemu dengan Mamok. Dalam pertemuan di sebuah warung makan di kawasan Prawirotaman, Mamok menceritakan kepada Putut tentang kecurigaan Kapolres terhadap dirinya. Dalam perjalanan pulang sekitar jam 01.30, Mamok sempat mengucapkan pesan "Agar mas Putut dan mas Asril berhati-hati dan selalu waspada. Karena baginya sangat mudah menghabisi".

- d. Dalam keterangannya kepada wartawan, salah seorang tim dokter RSUP Dr Sardjito yang mengautopsi jenazah Udin (dr Gani) memperkirakan dari luka-luka yang dialami Udin dianaya oleh orang yang terlatih dan terampil. Kabag Reskrim Polda Jateng/DIY, Letkol Drs M Ansyad Mbai kepada wartawan mengakui tersangka pelaku adalah orangnya professional. Sementara itu, selain anggota Polri, Mamok adalah seorang Karateka (atlet karate) yang ahli memainkan senjata *double stick*. Dia juga senang dan hobi memakai celana jin, sepatu kets, kaos oblong. Sama dengan ciri-ciri orang yang mencari Udin di rumahnya pada jam 22.00 tanggal 12/8/1996 dan jam 01.00 tangga(13/8/1996. Pada kedatangan pertama sekedar menanyakan (memastikan?) rumah Udin karena waktu mau diantar oleh Sujarah, orang itu justru ngeloyor pergi. Pernah, tanpa suatu sebab yang jelas, mendadak Mamok "ndepron" (mengaku lepat) di hadapan mbahnya Udin, seorang purnawirawan TNI-AD
22. Pada kegiatan peresmian angkutan pedesaan di lapangan Paseban Bantul, istri Bupati bertemu Udin. Ketika bertemu dan dikenalkan oleh Bupati Sri Roso Sudarmo, istri Bupati mengatakan: "Oh, ini toh yang namanya mas Udin".
23. Bernas tanggal5/7/1996 Bupati menjelaskan: "Tugas Utama Kades Memenangkan Golkar 200 % pada Pemilu 1997", 9/7/1996 Bernas menurunkan berita/laporan berjudul: "Tuah Politik Badai Dari Bantul. Bernas 17/7/1996 Bupati mengatakan: "Dana Bangdes Bisa Digunakan untuk Memenangkan Golkar".

24. Tanggal 17/7/1996 Camat Pleret, Drs Yundan, membuat surat nomor 410/519 tentang Penjelasan dana IDT di Dusun Karang Tengah. Disusul 26/7/1996 giliran Camat Imogiri, Hardi Purnomo BA membuat surat nomor 411.2/748 tentang Penjelasan dana IDT Karang Tengah. Surat ini diberi memo oleh Bupati dengan tulisan tangan: Sebelum 17/8/1996 sudah selesai Surat diteruskan ke Bagian 1 Hukum dengan memo: Segera sebelum 17/8
25. Tanggal 29/7/1996 Itwilkab membuat surat nomor 790.04/829/PM tentang hasil pemeriksaan Dana IDT.
- 26 Tanggal 1/8/1996, ItWilkab membuat surat nomor 045.2/T.269 tentang Laporan pemantauan dana 1DT.
- 27 Hari Senin, 5/8/1996, Rakor pemda (Bantul, antara lain dihadiri Wakil ketua PN, Tuti Timur, Kasi Intel Kejari; Kakan Sospol; Kabag⁺ Kesra; Kades Bawuran., Kades Karang Tengah Kecamatan Pleret.)
- 28 Hari Rabu, 7/8/1996, bagian Hukum membuat surat tanpa nomor tentang Hasil Rakor Bangdes Dana IDT. Surat ini direspon Bupati dengan memo: Susun Telaah/dievaluasi. Rombongan pemda Bantul, antara lain terdiri dari Kabag Humas Drs Sumantri Widodo, Kabag Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Drs Sunarto dan Camat Imogiri, Hardi Purnomo, mendatangi kantor Bernas di Jl Sudirman. Mereka marah-marah dan minta redaksi (R Soebadhi/alm dan Sulaiman Ismail) datang untuk minta maaf kepada Bupati. Permintaan ini ditolak karena Bernas sudah meralat (memberikan koreksi) terhadap hal yang dianggap salah.

29. Tanggal 9-12/8/1996 rapat-rapat di lingkungan pemda Bantul makin intens, di antaranya memutuskan rencana akan menggugat Bernas. Tapi pada rapat terakhir tanggal 12/8/1996, karena menurut hasil penelitian Reserse Bantul benar terjadi pemotongan biaya administrasi Bangdes bawuran sebesar Rp 130.000,- jika tetap menggugat pemda akan kalah karena dalam posisi lemah. Sedangkan menyangkut dana IDT, menurut Edy Hidayat, tidak ada masalah atau tidak ada pemotongan. Karena pemotongan Rp 10.000,- bukan dari dari dana IDT tapi dari kas kelompok. Sementara itu Hak Jawab sudah diberikan Bernas oleh Kelompok Mawar. Oleh karena itu jika tetap menggugat dikhawatirkan justru akan mempermalukan pemda Bantul. Atas hasil lidik dan syaran yang diberikan, Bupati memberi catatan/memo: Yang penting Koran Harus Bertanggungjawab....
30. Menjadi catatan kami adalah bahwa berdasar pendalamannya watak Bupati (dalam kasus Kades Guwosari/Daim Raharjo yang dipecat tanpa alasan kuat) patut diduga orang-orang yang dating ke kantor Bernas maupun yang mencari Udin adalah orang suruhan Bupati. Berkait dengan watak Bupati ini, perhatikan pernyataan dalam memo-memo Bupati (Yang' Penting Koran Harus Bertanggung Jawab.) Selesaikan Sebelum 17/8, Saya "Tidak Mau Dengar Lagi Ada Berita Mega Proyek). Pada bulan April 1994, Sri Roso juga "memanggil" Udin ke kantornya gara-gara berita.
31. Pada awal Juni 1996² kami mencatat Bernas menurunkan berita dengan judul menarik: *Hina Sri Roso Dua Pemuda Ditimpuk Sate* (Jok/Had). Perbuatan dilakukan oleh Sukrisno. Kaurpem (Keamanan) Desa Wirokerten

² beberapa hari pasca pilbup periode kedua

Kecamatan Banguntapan Bantul. Diduga kuat berkait dengan kasus tewasnya Udin, oknum yang dikenal merupakan orang dekat (tangan kanan) Sri Roso ini pernah mengancam akan menghabisi nyawa pemilik bengkel, warga setempat, Dipo dan keluarganya, karena Sukrisno meminjam besi (as mobil) sebelum kejadian penganiayaan. Besi itu dikembalikan setelah kejadian disertai ancaman. Karena diancam akan dihabisi Dipo sekeluarga mengungsi ke Lampung.

32. Tanggal 121811996, sekitar jam 22.00 ada orang laki-laki menggunakan jaket, sepatu ket, kaos oblong putih, celana jins mencari rumah Win.
33. Tanggal 13/8/1996:
 - a. Sekitar jam 01.00: orang yang sama datang lagi
 - b. Sekitar 20.30: Hatta Sunanto dan Suwandi datang ke kantor Bernas. Setelah bertemu sekitar lima menit kedua tamu pulang, Win terlihat gelisah. Sebelum meninggalkan kantor Redaksi Bernas, selama satu-dua menit kedua tamu masih ngobrol dengan Udin di pintu depan di bawah penerangan cahaya terang. Ini patut dicatat sebagai upaya Hatta Sunanto/Suwandi menunjukkan kepada eksekutor yang berada di kegelapan di luar kantor untuk memastikan sosok Udin.
 - c. Sekitar 21.30: Udin pulang ke rumah naik motor sendiri.
 - d. Sekitar 22.23 ada mobil patroli Potres Bantul melintas 'TKP
 - e. Sekitar 22.30: Penganiayaan terjadi. Beberapa saat sebelumnya, Nyonya Marsiyem yang sedang menyeterika mendengar suara ketukan dari pintu depan. Ketika pintu terlihat seorang laki-laki menggunakan baju lengan

panjang warna merah bata terkancing penuh, ikat kepala warna lebih tua dari warna baju, celana jins, sepatu kets putih, tinggi sekitar 170 cm. Orang itu mengatakan akan bertemu mas Udin karena akan menitipkan motor yang rusak. Ini dikatakan orang itu sambil menunjukkan bagian motor yang rusak. Marsiyem sempat melihat alat itu seperti besi krom-kroman (*stainless*) ujungnya bundar panjang sekitar 30 cm.

34. Tanggal 14/8/1996 PWI Yogyakarta rapat membentuk TPF
35. Tanggal 16/8/1996 sekitar jam 16.58 Udin menghembuskan nafas terakhir
36. Tanggal 17/8/1996 Udin dimakamkan setelah sholat Jum'at.
37. TPF menemukan nota pekerjaan (order) pembongkaran shock breaker depan dan belakang mobil sedan Esteem no pol: AB 7526 EE a/n Hardi Purnomo (Camat Imogiri, Bantul?) senilai Rp 685.000,-. Temuan diperoleh setelah mendapat informasi dan pelacakan ke sebuah showroom di JI P Diponegoro dan bengkel di JI Magelang, Yogyakarta. Camat Hardi Purnomo sudah diperiksa sebagai saksi. Pada satu kesempatan rapat setempat, Hardi Purnomo pernah berkata: "Kalau ada wartawan macam-macam begitu akihatnya."
38. Dari Jumpa Pers 23/8/1996:
 - a. Sri Roso mengatakan tidak pernah ada rapat Muspida membahas, masalah Udin. Untuk meyakinkan dia mempersilahkan wartawan melakukan cek ke

notulen rapat. Padahal ada (lihat angka 24 s/d 29). TPF memperoleh dokumen itu herkat PLH Bupati, Drs Kismo Sukirdo.

b. Kapolres Letkol Drs Ade Subardan mengatakan akan menangkap tersangka pelaku tidak dalam hitungan minggu atau bulan. "Tapi dalam hitungan hari, 2-3 hari" katanya meyakinkan sambil menambahkan: "Agar Pak Bupati bisa tidur nyenyak". Ciri-ciri orang yang akan ditangkapnya: postur seperti dia, kulit sawo matang, kumis tipis, ketika kejadian memakai celana jins, kaos oblong ketat clan sepatu kets. Tapi sampai sekitar dua minggu berlalu tersangka belum juga ditangkap, pada 7/11/1996 Ade Subardan dimutasi ke Polda Irja sebagai Irwasda. Ciri-ciri tersangka versi Kapolres Bantul ini sama dengan ciri orang yang datang sebelum kejadian maupun orang yang dilihat Nyonya Marsiyem (tamu).

39. Kepada TPF (13/10/1996), Edy Wuryanto mengaku dia pernah mengenal Mamok

DAFTAR INFORMAN

Ashadi Siregar : Pelaku Pers, Penulis, Akademisi, Ketua LP3Y

Masduki : Staff pengajar di Fisipol UGM, FISIP Atma Jaya, STENKO, Akademi Komunikasi Yogyakarta, Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia 2002-2004, Pendiri Udin Center tahun 2003, Jurnalis, Tim advokasi anti kekerasan terhadap wartawan.

Ketjuk Sahana : Pelaku Pers dan Kepala Penyiaran Radio Unisi.

DAFTAR PUSTAKA

Abar, Akhmad Zaini., *Kisah Pers Indonesia 1966-1974*, Yogyakarta, LkiS, 1995

Abidin, Wikrama Iryans., *Politik Hukum Pers Indonesia*, Jakarta, PT Grasindo, 2005

Abrar, Ana Hadhya MA, *Panduan Buat Pers Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995

Ebeinstein, William., *Today's Isms*, Prentice-Hall.Inc., Englewood, New Jersey, 1985

Eko, Sutoro (ed)., *Masyarakat Pascamiliter*, Yogyakarta, IRE dan Pact Indonesia, 2000

Gottschalk, Louis., *Mengerti Sejarah*, Jakarta, Yayasan Penerbit UI, 1975

Harahap, Krisna., *Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia*, Bandung, PT Grafiti, 2003

Ispandriarno, Lukas S dkk., *Media-Militer-Politik Crisis Communication : Perspektif Indonesia dan Internasional*, Yogyakarta, Galangpress, 2002

Khoirun, M Nur., *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara*, Yogyakarta, LkiS, 1999

Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah II*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1994,

Latief, Abdul., *Pledoi Kolonel A Latief : Soeharto Terlibat G 30 S*, ISAI, Jakarta 2000

Masduki., *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Yogyakarta, UII Pers, 2003

Notosusanto, Nugroho., *Sejarah Nasional Indonesia IV*,

Nurudin, *Pers Dalam Lipatan Kekuasaan : Tragedi Pers Tiga Zaman*, Malang, UMM Press, 2003

Purwanta, H dkk., *Sejarah XII*, Yogyakarta, Grasindo, 2007

Roeder, O.G., *The Smiling General President Soeharto Of Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung LTD, 1969

Sudibyo, Agus., *Citra Bung Karno : Analisis Berita per Orde Baru*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1999

Tim penulis, *Kronologi Perkembangan Dan Pembredelan Pers Di Sekitar "MALARI" Januari 1974*, Proyek Penelitian Pengembangan Penerangan Departemen Penerangan RI kerjasama dengan Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoneisa (Leknas-LIPI), Jakarta, 1980

Tim Penulis LP3Y, *Jurnalisme Indonesia di Lima Kota*, Yogyakarta, LP3Y, 2006

Wardaya, Baskara T., "Bung Karno Menggugat" Galang Press, Jogjakarta, 2006

Wardaya, Baskara T (ed.), *Menuju demokrasi Politik Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Gramedia, Jakarta, 2001

On line

<http://www.kalyanamitra.or.id/kalyanamedia/1/2/fokus.htm>

http://www.sekitarkita.com/comments.php?id=183_0_7_0_C

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0403/16/nas4.htm>

<http://pjvermonte.wordpress.com/2007/02/24/diskusi-sistem-politik-dan-pemilu-kita/>

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/9907/23/OPINI/deja04.htm>

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0610/10/opi01.html>

<http://kontak.club.fr/Suharto%20bertanggungjawab%20terhadap%20kerusakan%20ABRI.htm>

<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/10/06/0046.html>

Mahardika, Mirah., *Siaran Pers Atas Pengadilan 14 Aktivis PRD*, Jakarta, 12 Desember 1996, Google.com

Perundingan Menuju Aceh Damai, Divisi Kampanye Koalisis NGO HAM Aceh, koalisi@asia.com

_____, *Upaya Memayungi Kemerdekaan Pers*, Kompas 4 Mei 2004, Google.com

Santoso Aboeprijadi., *Pers Kita Masih Pers Orde Baru* (Pendapat Jus Sumadipradja), 27 Juni 2005, Google.com

Makalah/Papper

Wardaya, Baskara T., makalah “Mencari Cara Lain Memandang Supersemar” dalam rangka launching buku *Membongkar Supersemar*, USD, 10 Maret 2007.

Majalah/Koran

Suara Pembaharuan, 11 Desember 1998

The Straits Times, 16 September 2006

Tempo, 3 september 2006

Gatra, Perang Lawan Preman, 18 Maret 1995

Majalah Jayabaya., 13 Oktober 1996, tulisan seri ketiga.